

MAJALAH **DISKOMINFO**

Amazing



PASAR RAKYAT WANARAJA



**MEMACU INFRASTRUKTUR
DAN PERTUMBUHAN EKONOMI**



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



**PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN SERTA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK
DITUNJANG PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR
GUNA MENCAPAI GARUT YANG BERMARTABAT, NYAMAN DAN SEJAHTERA**

— Tema Pembangunan Kabupaten Garut —



 Diskominfo Kabupaten Garut  @DiskominfoGRT
 @diskominfo_kabupaten_garut  Diskominfo Garut

Sekapur Sirih



Pembaca yang budiman,

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT, majalah Diskominfo kembali hadir dihadapan pembaca. Kali ini menyuguhkan tema utama tentang penyerapan tenaga kerja, dimana permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kabupaten Garut.

Disamping itu edisi kali ini menyuguhkan tulisan tentang peran serta koperasi dan UMKM, ditunjang dengan perkembangan koperasi yang menjadi salah satu kekhasan Kabupaten Garut dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Dari bidang perindustrian perdagangan kami sajikan tulisan mengenai potensi industri perdagangan yang diharapkan menjadi referensi bagi pembaca dalam mewujudkan usahanya di Kabupaten Garut. Salah satu yang kami sajikan liputannya mengenai keberadaan perusahaan sepatu olah raga ternama serta dampak yang terjadi dengan berdirinya perusahaan PT. Changshin di wilayah Kecamatan Leles.

Dari bidang sosial, kami menyajikan tentang catatan penting sebagai dampak dari ekonomi yang kian berkembang yang memungkinkan berdampak terhadap status sosial masyarakat setempat.

Edisi kali ini sengaja kami turunkan tulisan mengenai revitalisasi pasar tradisional. Kabupaten Garut memang saat ini sedang gencar-gencarnya membangun kembali pasar tradisional semi modern. Keberadaan pasar ini diharapkan memberikan kenyamanan masyarakat yang masih akrab dengan keberadaan pasar tradisional dengan keunggulan lain dari sisi komunikasi antara penjual dan pembeli yang menjadi tipikal pasar tradisional, sedangkan kemoderannya diharapkan ada sisi kenyamanan orang untuk berbelanja.

Akhirnya, kami ucapkan selamat membaca. Kami senantiasa membuka diri terhadap segala masukan dan kritikan. Semoga Majalah Kominfo akan selalu tampil lebih baik dan optimal.

Salam.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Garut

Drs. H. Nurdin Yana, M.H.



Pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Garut periode 2014-2019, Rudy Gunawan dan Helmi Budiman, Kamis, 23 Januari 2014, oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Garut, kedua pasangan ini langsung pasang badan, salah satunya bagaimana menjawab tantangan agar Kabupaten Garut keluar dari julukan sebagai daerah tertinggal.

6 MEMACU INFRASTRUKTUR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



18

KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT



26

PT CHANGSHIN REKSA JAYA MENUJU INDUSTRI INTERNASIONAL, BERDAYAKAN SDM LOKAL GARUT



24

REVITALISASI PASAR TRADISIONAL JALAN TERUS

24 **PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL**

44 **PERAN DISNAKERTRANS DALAM MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN**

54 **KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2017**

62 **KEMENKO PEREKONOMIAN LIRIK SELAAWI JADI PILOT PROJEK KAWASAN**

Diterbitkan Oleh	: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
Pelindung	: H. Rudy Gunawan, SH., MH., MP. (Bupati Garut) dr. H. Helmi Budiman (Wakil Bupati Garut)
Penasehat	: H. Iman Alirahman, SH., M.Si (Sekda Garut)
Penanggung Jawab	: Drs. H. Nurdin Yana, MH. (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut)
Pengarah	: Ricky Rizki Darajat, SH, M.Si
Penyunting	: M. Anies Fikry, SE, Tantan Herdiana, SIP, Anita Saraswati, Yanyan Agus Supianto, S.IP, M.Si, Firman Lutfi
Penyaji Data	: Yogi Gunawan, Nurhadimiharja, S.Sos
Fotografer	: Fendi Dian Conisa, Cuncun Sunarya, Yogi Budiman, Tono Suhartono
Percetakan	: CV. Bangkit Jaya



Suasana di depan Pasar Rakyat Wanaraja.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut
Jl. Pembangunan No. 181 – Garut Telp (0262)489500
www.garutkab.go.id email: webmaster@garutkab.go.id



Bupati Rudy Gunawan dan Wakil Bupati dr. Helmi Budiman saat monitoring pembangunan infrastruktur Desa Pamalayan Kec. Pameungpeuk.

MEMACU INFRASTRUKTUR DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Bila Anda ingin berusia panjang tinggalah di Kota Depok, tapi manakla ingin hidup lebih pendek, tinggal di Kabupaten Garut. Selorohan itu kerap muncul sekitar tahun 2006-an. Bukan tanpa alasan, tahun itu memang Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Garut paling bontot dibanding kabupaten/kota di Jawa Barat dengan AHH 64,00, sedangkan Kota Depok tertinggi AHH-nya dengan 72,60, atau dibawah rata-rata Jawa Barat (67,40).



Pasar Rakyat Wanaraja.



Jujur, stempel sebagai daerah tertinggal kala itu bukan sesuatu yang mengesankan, padahal potensi Kabupaten Garut tidak akan kalah dibanding kabupaten/kota di Jawa Barat saat itu. Kondisi inilah yang kemudian menjadi pekerjaan rumah bagi para pemimpin yang memimpin negeri bernama Garut ini.

Pasca dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati Garut periode 2014-2019, Rudy Gunawan dan Helmi Budiman, Kamis, 23 Januari 2014, oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Garut, kedua pasangan ini langsung pasang badan, salah satunya bagaimana menjawab tantangan agar Kabupaten Garut keluar dari julukan sebagai daerah tertinggal.

Tidak lama berselang delapan bulan kemudian, akhirnya daerah ini ditetapkan sebagai salah satu daerah yang mampu menanggalkan status daerah tertinggal. Garut akhirnya resmi menyandang status baru sebagai daerah berpotensi maju. Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal resmi menyerahkan sertifikat tersebut kepada Pemkab Garut. Saat itu sertifikat diserahkan oleh Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Helmy Faisal Zaini kepada Wakil Bupati Garut, Helmi Budiman dalam prosesi yang dihelat di Grand Mercure Hotel Jakarta, Senin (29/09/14) malam.

Kabupaten Garut sendiri merupakan bagian dari 70 kabupaten lainnya yang dinyatakan keluar dari ketertinggalan, yang kemudian pernyataan itu tertuang dalam Keputusan Menteri

Jalan Bungbulang-Cisewu.



Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 141 tahun 2014 tentang Penetapan Kabupaten Tertinggal yang Terentaskan Tahun 2014. Tertanggal 25 September 2015.

Selain masuk katagori daerah berpotensi maju, dalam penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Garut juga masuk peringkat “Sepuluh Besar” Kabupaten Daerah Tertinggal Terbaik dalam peningkatan angka harapan hidup pada kurun waktu 2010 sampai 2014.

Usai menerima sertifikat saat itu, Helmi Budiman menegaskan Garut masih perlu bekerja keras menjawab tantangan pergantian status. Persoalan terbesar adalah pembangunan infrastruktur dan

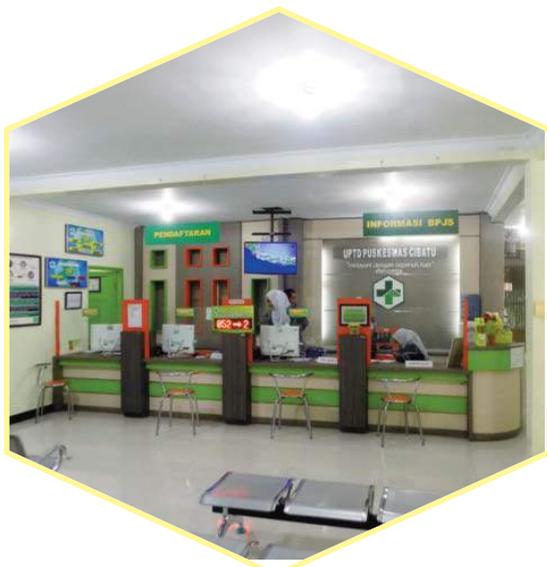
peningkatan laju pertumbuhan ekonomi. “Kami semua berharap akan banyak investor yang segera datang menanamkan modalnya di Garut,” kata Helmi.

Putusan untuk memberikan status daerah berpotensi maju kepada Garut berdasar pada evaluasi terhadap 183 kabupaten tertinggal pada RPJMN 2010-2014. Penilaian juga mengacu pada indikator penetapan daerah tertinggal yang meliputi kriteria ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah.

Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Ahmad Helmy Faisal Zainisat itu, berpesan agar potensi Garut untuk maju kini bergantung pada kepiawaian pemerintah daerah dalam mengelola potensi modal demi pembangunan di daerahnya. Hal itu perlu didorong pula oleh

Berdasarkan penilaian Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, memang saat itu indikator utama yang dimiliki Garut adalah peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada pada angka 72,12 poin. Angka tersebut sesuai dengan estimasi Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang berada pada angka 68,46 poin. Namun, Garut masih berada di bawah IPM provinsi Jawa Barat, 73,19 poin dan IPM nasional, 73,29 poin.

Sementara sejumlah indikator yang masih harus terus mendapat



KETERANGAN FOTO

(kiri-kanan)

- Puskesmas Cibat
- Gedung Perpustakaan
- Islamic Center



perhatian adalah angka kejadian bencana, laju pertumbuhan ekonomi, serta masih

ditetapkannya Garut sebagai daerah konservasi. Memang Garut hingga saat ini menjadi daerah rentan bencana. Puncaknya, 16 September 2016, Kabupaten Garut kembali dilanda bencana banjir bandang yang meluluhlantakkan rumah dan fasilitas umum lainnya, disamping korban nyawa.

Namun dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan, maka persolan bencana yang semula berparadigma penanganan bersifat responsif menjadi preventif dan dari tanggap darurat menjadi pencegahan dan kesiapsiagaan. Tentu saja ini akan berdampak

keinginan masyarakatnya yang akan sangat menentukan akselerasi kemajuan suatu daerah dan bukan hanya ditentukan pemerintah pusat.

Salah satu kendala yang membuat Garut selama ini dikategorikan daerah tertinggal adalah karakteristik dan demografinya yang sangat menyulitkan pembangunan. Setelah dinyatakan terlepas dari status daerah tertinggal, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal tidak lantas meninggalkan begitu saja tetapi terus melakukan pendampingan selama tiga tahun.

terhadap status yang kini direngkuh daerah ini bukan lagi sebagai daerah tertinggal.

Secara wilayah, Kabupaten Garut merupakan daerah terluas kedua di Propinsi Jawa Barat. Tak hanya memiliki wilayah yang luas, Garut juga memiliki Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia yang melimpah, sebagai bonus demografi bagi kabupaten tersebut. Sebagai daerah pegunungan, Garut sesungguhnya memiliki sumber daya alam yang berlimpah. Sumber energi dari panas bumi berkapasitas 1.500 MW yang dikelola oleh perusahaan multi internasional CHEVRON (kini oleh STAR Energy) dan juga Pertamina Geothermal. Sedangkan dibidang energi lain, Garut memiliki sumber daya air - micro hidro - yang berkapasitas sekitar 200 MW.

Dengan sumber daya yang sedemikian, maka Kabupaten Garut sebenarnya termasuk kabupaten yang memiliki potensi alam yang bisa menghasilkan untuk kesejahteraan masyarakat dan daerahnya. Namun, karena

“Berbagai treatment pun dilakukan, dengan komitmen untuk bisa mengentaskan kemiskinan dengan kewenangannya melalui politik anggaran dan berbagai regulasi. Komitmen itu bukan hanya berlaku untuk dirinya dan aparatur pemerintahan kabupaten Garut saja, masyarakat juga diminta membuat komitmen bahwa mereka akan keluar dari kemiskinannya sendiri dengan semangatnya

karakteristik daerahnya yang berbukit-bukit dan penduduknya yang terpencar-pencar diberbagai wilayah dalam keminiman aksesibilitas terutama jalan, maka pada tidak berlebihan bila beberapa tahun yang lalu Kabupaten Garut masih termasuk Daerah Tertinggal.

Bupati Garut, Rudi Gunawan sadar akan potensi besar yang dimiliki oleh kabupaten yang dipimpinnya saat ini. Ia juga sadar betul, bahwa untuk

“menaikkelaskan” Garut harus melalui langkah awal yaitu membangun dan memperbaiki infrastruktur dasar.

Berbagai treatment pun dilakukan, dengan komitmen untuk bisa mengentaskan kemiskinan dengan kewenangannya

Bupati Garut Rudy Gunawan



“
Ketika masih termasuk sebagai Daerah Tertinggal, Garut PDRB-nya atas harga yang berlaku hanya 31 Triliun, sekarang meningkat menjadi 39 Triliun. Nah ini diakibatkan oleh semakin membaiknya ekonomi yang ditopang juga semakin membaiknya infrastrukturnya

Bupati Rudy Gunawan mengecek hasil pembangunan jalan saat kunjungan ke daerah.

melalui politik anggaran dan berbagai regulasi. Komitmen itu bukan hanya berlaku untuk dirinya dan aparat pemerintahan kabupaten Garut saja, masyarakat juga diminta membuat komitmen bahwa mereka akan keluar dari kemiskinannya sendiri dengan semangatnya.

Dengan komitmen bersama tersebut, program-program yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Pemerintah Propinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat ini menjadi bagian untuk mendorong percepatan pengentasan kemiskinan.

Program Ekonomi Kerakyatan

Dalam rangka menggerakkan ekonomi kerakyatan yang difokuskan sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat Garut. Ekonomi kerakyatan di Kabupaten Garut ini didorong oleh berbagai pihak, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yang pada saat itu memberikan dorongan dalam bentuk program kegiatan, mulai dari industri rumahan diantaranya adalah makanan, bahan-bahan bangunan seperti bata dan juga beberapa kegiatan-kegiatan yang sifatnya jasa.

Dibidang Agro Industri, menyediakan berbagai makanan olahan yang dihasilkan dari berbagai

komoditas dan di kita pun memang ada kebersamaan di dalam memberikan pelayanan terhadap petani-petani kecil yang bisa memasarkan produksinya, dan dilaksanakan melalui ekonomi kerakyatan serta banyak lagi yang dikembangkan.

Perkembangan Ekonomi Pasca Terlepas Dari Status Sebagai Daerah Tertinggal

Ketika masih termasuk sebagai Daerah Tertinggal, Garut PDRB-nya atas harga yang berlaku hanya 31 Triliun, sekarang meningkat menjadi 39 Triliun. “Nah ini diakibatkan oleh semakin membaiknya ekonomi yang ditopang juga semakin membaiknya infrastrukturnya. Dengan semakin membaiknya infrastrukturnya, maka pergerakan orang dan barang menjadi lebih efisien, terutama barang-barang yang dihasilkan oleh produksi dibidang pertanian, perkebunan dan kehutanan”, ujar Bupati Garut dalam satu kesempatan wawancara.

Menurutnya, pendapatan dari masyarakat sendiri meningkat. Peningkatan ini diakibatkan oleh siklus bahwa apa pun yang diproduksi di kampung-kampung karena jalannya sudah bagus sekarang bisa masuk ke kota.

Di kota ini, ibu Rudy, misalnya mulai dari produk-produk pertanian yang eksklusif seperti akar wangi





Peresmian proyek-proyek pembangunan Garut Amazing Tahun 2016.

ditanam di berbagai tempat, ada juga paneli dan sebagainya ada di Kabupaten Garut. Nah, ini dimasukkan ke dalam satu sistem dimana fungsi di sub terminal agri bisnis ini dijadikan sebagai tempat menampung semua hasil produksi untuk di ekspor.

Ada peningkatan pendapatan lagi dari sektor lain, dari sektor jasa dan industri dengan terserapnya tenaga-tenaga kerja pengangguran sehingga sekarang Kabupaten Garut pendapatan perkapitanya semakin tinggi.

Potensi Unggulan Kabupaten Garut

Unggulan Kabupaten Garut terdapat 3 (tiga), pertama, dari segi wilayah yang luar biasa mulai dari laut sampai pegunungan. Lautnya terbentang sampai 80 km, dimana hasil tangkapan lautnya yang eksklusif seperti udang, lobster dan makanan-makanan laut lainnya. Sedangkan di dataran tinggi Garut memiliki pemandangan yang luar biasa mulai dari gunung cikurai, papandayan, telaga bodas, guntur dan gunung cakra buana. Garut juga punya sungai, punya sungai yang terkenal itu adalah cimanuk,

cikandang, cilaki dan banyak lagi sungai-sungai yang menghasilkan energi listrik.

Yang kedua, dari alam Garut memiliki potensi pariwisata. Pariwisata cipanas, ditopang dengan tempat-tempat bagus untuk bisnis hotel. Sehingga Garut perkembangan hotel-hotel, di pusat-pusat pariwisata cenderung meningkat.

Dan yang ketiga adalah dalam bidang perdagangan, dimana sebagai ibukota priangan ini menghasilkan jaket kulit berkualitas yang tidak ada ditempat lain, di Garut ada jaket kulit, di Garut juga menghasilkan dodol Garut, kita juga ada cokodot dan kita juga banyak kuliner.

Fokus Dari RPJMD Garut Hingga 2019

RPJMD Garut adalah RPJMD 2014-2019. Tahun 2015, Garut keluar dari statusnya sebagai Daerah Tertinggal. Dari prosesnya, RPJMD Garut sudah diuji. Tahun 2015, Garut menjadi juara kedua Pangripta Nusantara tingkat propinsi Jawa Barat. Dan ditahun 2016 meningkat menjadi juara kesatu.

RPJMD Garut adalah RPJMD

Pembangunan jembatan, salah satu prioritas Pemda Garut.



Peningkatan Jalan Permukiman di Kel. Pataruman Kec. Tarogong Kidul.



66
 Untuk fokus anggaran, Kabupaten Garut mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur dasar sebesar 70%. Karena itu, hingga tahun 2019, pemerintah Kabupaten Garut akan fokus membenahi infrastruktur dasar. Karena, salah satu penyebab ketertinggalan itu diakibatkan oleh buruknya infrastruktur dasar tersebut

Amazing, makanya setiap program kerjanya juga ada Amazing-nya, intinya bagaimana sekarang Pemerintah Daerah beserta DPRD dan seluruh Masyarakat sama-sama bertekad untuk membuat terobosan-terobosan sebagai sebuah inovasi. Misalnya, membuat 65 km jalan baru, membuat 5 jembatan, Garut juga menginginkan adanya industri yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, Garut juga menginginkan ada tempat wisata laut yang dapat menandingi Bali.

Sehingga RPJMD Garut 2014-2019 ini benar-benar menentukan masa depan Garut, karena kalau ini gagal maka masa depan Garut akan sulit untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain yang sudah maju terlebih dahulu. Makanya kita membuat sebagai program Amazing Garut.

Politik Anggaran

Politik anggaran di Pemda Garut ini juga telah diuji oleh Bappenas, karena inovasinya itu benar-benar harus diwujudkan dan dilaksanakan dengan politik anggaran. Politik anggaran yang ada sekarang ini kita dorong untuk inovasi dalam rangka memberikan kenyamanan, misalnya infrastruktur dasar kita gelontorkan hampir 500 miliar, pembuatan jalan-jalan di ibukota kecamatan juga dilakukan dengan sangat masif.

Politik anggaran yang selanjutnya adalah untuk mengentaskan

kemiskinan, program-program yg langsung menyentuh untuk mengentaskan kemiskinan. Garut juga dihadapkan kepada satu kendala besar yaitu masih rendahnya rata-rata lama sekolah, hal ini memang sudah lama tidak tertangani. Masalah-masalah di bidang pendidikan inilah yang menjadi kendala, karena banyak sekolah dasar yang rusak, Garut memerlukan setidaknya 1 triliun, untuk membuat sekolah-sekolah dasar dengan keadaan yang baik.

Untuk fokus anggaran, Kabupaten Garut mengalokasikannya untuk pembangunan infrastruktur dasar sebesar 70%. Karena itu, hingga tahun 2019, pemerintah Kabupaten Garut akan fokus membenahi infrastruktur dasar.

Karena, salah satu penyebab ketertinggalan itu diakibatkan oleh buruknya infrastruktur dasar tersebut. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Garut fokus membuat dan membuka jalan-jalan baru, pemantapan jalan yang sudah ada, membuat jembatan-jembatan untuk akses antar kecamatan. Begitu pula dengan infrastruktur pengadaan air bersih dan energi, dengan demikian kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat dapat terpenuhi. Kemiskinan pun dapat terentaskan di Garut.

Kiat Bisa Terlepas Dari Ketertinggalan

Di Garut, bila menghitung rasio

antara jumlah pegawai dengan standar pelayanan minimal. Maka, menurut Bupati Rudy kita tidak perlu banyak pekerja yang harus diangkat sebagai PNS. Ia mencontohkan, di Garut sekarang ini jumlah penduduknya berdasarkan Disduk ada 3,2 jt jiwa dan berdasarkan BPS penduduk Garut hanya 2,6 juta jiwa.

Untuk bisa mengefisienkan anggaran diantaranya, Garut tidak menambah kembali dengan jumlah yang pensiun pada tiap tahunnya sebanyak 600 orang. “Kami efisienkan, kecuali guru dan tenaga medis. Tenaga guru dan kesehatan ditingkatkan, dengan kondisi pembayaran gaji dan sertifikasi yang hanya 1,4 triliun”, ujarnya

Ini juga menjadikan Kabupaten Garut sebagai kabupaten yang mempunyai tingkat kesehatan APBD yang cukup baik dan sehat. Karena itu, Garut mendapatkan lagi kuota untuk mengganti guru SD yang

pensiun sekitar 400 orang. Tahun berikutnya bisa saja mendapatkan penambahan kuota 1000 orang.

Menghadapi Kebijakan Presiden Soal Money Follow Program Prioritas

“Saya selalu menekankan, di Kabupaten Garut tidak boleh ada uang yang keluar tanpa memiliki manfaat langsung bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam penyusunan APBD, pemerintah kabupaten Garut menggunakan pendekatan indeks kepuasan masyarakat. APBD itu harus mampu meningkatkan indeks kepuasan masyarakat”, kata Bupati Rudy Gunawan dalam suatu wawancara. Sehingga APBD sendiri harus bisa meningkatkan IPM, karena tanpa itu, ujar bupati pihaknya tidak akan membiayai pelaksanaan program kegiatan. “Kebijakan money follow prioritas, kita ini lebih dari itu”, tegasnya.(*)



Peletakan batu pertama pembangunan jaringan air bersih Kec. Talegong.



Pembangunan sarana prasarana pendidikan.



Pembangunan sarana prasarana lingkungan.



Pembangunan kirmir di Kec. Leles.



**PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN SERTA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK
DITUNJANG PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR
GUNA MENCAPAI GARUT YANG BERMARTABAT, NYAMAN DAN SEJAHTERA**

Tema Pembangunan Kabupaten Garut



TIGA PRIORITAS PEMBANGUNAN

1

**BERKAITAN DENGAN TEMA ATAU PROGRAM UNGGULAN (DEDICATED) KEPALA DAERAH
SESUAI DENGAN 8 (DELAPAN) JANJI KAMPANYE, YAITU :**



Gratis SPP bagi seluruh siswa SD, SMP, SMA
serta beasiswa kuliah bagi putra-putri petani, pedagang kecil



Subsidi harga pupuk dan benih bagi petani kecil



Gratis berobat dan ambulance bagi keluarga miskin



Bantuan modal bagi usaha perempuan,
perbaikan 10.000 rumah rakyat miskin, gratis akte kelahiran



Pemberian insentif bagi RT dan RW,
guru honorer, kader Posyandu dan Guru Ngaji



Bantuan sarana prasarana olah raga, seni budaya
serta pengembangan keunggulan pariwisata lokal



300 milyar untuk pembangunan infrastruktur desa



Bantuan keuangan bagi masjid dan madrasah diniyah

2

**BERKAITAN DENGAN PROGRAM UNGGULAN DAERAH DI TINGKAT SKPD ATAU PROGRAM AMAZING GARUT
YANG MEMBERIKAN DAMPAK LUAS PADA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
SESUAI DENGAN 3 (TIGA) PILAR PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT YAITU :**

**PENGUATAN
EKONOMI KERAKYATAN**



**PEMANTAPAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH**



**OPTIMALISASI
PELAYANAN PUBLIK**



3

**DIALOKASIKAN UNTUK BELANJA-BELANJA TIDAK LANGSUNG SEPERTI BANTUAN SOSIAL
ORGANISASI KEMASYARAKATAN, SERTA BELANJA BAGI HASIL KEPADA PEMERINTAHAN DESA**

Design by

DISKOMINFO GARUT



Diskominfo Kabupaten Garut



@DiskominfoGRT



@diskominfo_kabupaten_garut



Diskominfo Garut



KEBIJAKAN UMUM APBD TAHUN ANGGARAN 2018 DIFOKUSKAN PADA 3 (TIGA) PILAR PEMBANGUNAN KABUPATEN GARUT, YAITU :

1. Penguatan Ekonomi Kerakyatan
2. Pemantapan Infrastruktur Wilayah
3. Optimalisasi Pelayanan Publik melalui Pelayanan Aparatur yang Profesional, Santun dan Amanah dalam 3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro serta kecil;
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan seperti pembangunan rumah tidak layak huni, akses sanitasi, pembangunan infrastruktur pemukiman dan peningkatan rasio elektrifikasi.

PROGRAM KEGIATAN YANG AKAN DILAKSANAKAN:

1. Menurunkan angka kemiskinan
Berdasarkan basis data kemiskinan tahun 2015 di Kabupaten Garut masih terdapat 315.606 Kepala Rumah Tangga Sasaran yang terdiri :
 - 81.756 dengan kategori sangat miskin
 - 108.659 kategori miskin
 - 105.104 dengan kategori hamper miskin
 - 19.987 dengan kategori rentan miskin
2. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia, khususnya peningkatan Indeks Daya Beli Masyarakat yang sampai dengan tahun 2016 berada pada kisaran Rp 7,079 juta/tahun
3. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan potensi investasi dan penanaman modal yang akan mendorong perluasan kesempatan kerja

UPAYA PENANGGULANGAN PENURUNAN ANGKA KEMISKINAN AKAN DILAKUKAN :

1. Perbaikan dan pengembangan system perlindungan sosial;
2. Peningkatan akses pelayanan dasar;
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat;
4. Pembangunan yang inklusif

STRATEGI YANG AKAN DILAKSANAKAN, YAITU :

1. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin;
2. Peningkatan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin;
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha makro serta kecil;
4. Membentuk sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan seperti pembangunan rumah tidak layak huni, akses sanitasi, pembangunan infrastruktur pemukiman dan peningkatan rasio elektrifikasi.







KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN SEKTOR INDUSTRI DAN PERDAGANGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

Kebijakan ekonomi mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum.



Dalam menghadapi era persaingan global tidak ada pilihan selain meningkatkan daya saing nasional. Untuk mempertahankan dan meningkatkan daya saing nasional dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan suatu arah kebijakan pembangunan nasional dengan paradigma baru. Era reformasi yang berkembang sejak 1998 telah membawa banyak perubahan di berbagai bidang. Pemusatan kekuatan ekonomi nasional pada sekelompok tertentu telah surut seiring dengan terjadinya krisis ekonomi dan moneter.

Paradigma pembangunan ekonomi yang semula lebih berorientasi pada pertumbuhan industri dan perdagangan berskala besar telah bergeser kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Perubahan paradigma tersebut telah berpengaruh terhadap proses pemulihan ekonomi yang tercermin dari beberapa indikator ekonomi.

A. Selang Pandang Kebijakan Per-ekonomian

Pembangunan nasional merupakan upaya semua komponen bangsa yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berdasarkan Pancasila. Pencapaian Tujuan ini dilaksanakan secara bertahap, mulai dari jangka panjang, jangka menengah, hingga tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 menggariskan Visi Indonesia tahun 2025 yaitu "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" yang pelaksanaannya dibagi ke dalam 4 (empat) tahap pembangunan jangka menengah.

Pembangunan tahun 2019 berada pada tahap jangka menengah yang ketiga yang arahnya digariskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014-2019 sesuai Tema Pembangunan Kabupaten Garut : "PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN SERTA OPTIMALISASI PELAYANAN PUBLIK DITUNJANG PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR GUNA MENCAPAI GARUT YANG BERMARTABAT, NYAMAN DAN SEJAHTERA".

Pembangunan Kabupaten Garut dipahami sebagai pelembagaan proses pembangunan multidimensional pada arah perubahan struktur yang alami. Paradigma baru Kabupaten Garut didasarkan pada paradigma pembangunan manusia sebagai kunci dari proses pembangunan.

Kegiatan manusia diketahui amat beragam yang sebagian besar difokuskan pada sejumlah kegiatan ekonomi. Beberapa kegiatan ekonomi berada dalam lingkup masyarakat disebut sebagai sektor-sektor ekonomi. Sektor-sektor ekonomi di Kabupaten Garut sebagian besar didominasi oleh proses kegiatan ekonomi yang berdasarkan potensi sumber daya ekonomi.

Potensi sumber daya ekonomi yang paling banyak dimanfaatkan sebagai input dalam proses kegiatan ekonomi adalah sumber daya alam, baik yang terbaru maupun yang tidak terbaru. Sebagian besar pengelolaan sumber daya tersebut berada dalam lingkup kegiatan ekonomi pertanian, industri, dan perdagangan dalam satu lingkaran kegiatan

sekaligus, meskipun masih dalam skala yang masih terbatas.

Isu strategis yang saat ini berkembang dalam wacana pembangunan Kabupaten Garut adalah bagaimana upaya memperbesar skala dari lingkup keterkaitan kegiatan ekonomi pertanian, industri, dan perdagangan itu dalam rangka lebih mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat. Salah satu konsep yang ditawarkan adalah mencoba meningkatkan potensi sumber daya ekonomi Kabupaten Garut melalui kebijaksanaan pengelompokan industri (industrial cluster policy).

Keluaran dari kebijaksanaan ini adalah terciptanya suatu formula keterkaitan sisi kelembagaan pembangunan lintas sektor yang tinggi antara sektor-sektor primer dengan sektor-sektor sekunder dan sektor-sektor tersier (atau sektor jasa). Sementara itu pada sisi sumber daya terjalin keterkaitan yang tinggi antara sektor-sektor hulu, sektor antara, dan sektor hilir.

B. Kebijakan Pembangunan di Sektor Industri Kabupaten Garut

1. Transformasi Kebijakan Pembangunan Di Sektor Industri

Sampai saat ini, sektor perindustrian Kabupaten Garut telah berkembang cukup pesat, mulai dari pengembangan sarana dan prasarana penunjang sampai pada peningkatan kualitas SDM, yang nantinya diharapkan dapat mengembangkan perindustrian nasional dan mendorong pembangunan perekonomian Kabupaten Garut.

Pembangunan industri, sebagai motor penggerak perekonomian, akan terus didorong perannya karena telah terbukti memberi kontribusi yang berarti terhadap pembangunan Kabupaten Garut. Mengingat perannya yang strategis, sektor industri khususnya industri manufaktur, perlu ditingkatkan kinerjanya. Berbagai upaya perbaikan untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kemerosotan kinerja sektor industri telah dilakukan, namun kinerja itu tampaknya belum sepenuhnya pulih.

Namun demikian, industri manufaktur masih menghadapi tantangan yang harus segera diatasi. Belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di Kabupaten Garut meru-

pakan masalah utama yang dihadapi. Kondisi ini berakibat pada lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir, sehingga struktur industri secara keseluruhan menjadi rentan. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dalam mendukung pembangunan industri di daerah juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Keterbatasan infrastruktur, yang menyebabkan pembangunan industri, terutama industri kecil sulit berkembang, berpotensi menimbulkan kesenjangan pembangunan antar daerah.

Masalah lain yang menuntut perhatian bersama adalah lemahnya penguasaan teknologi industri. Fakta di pasar menunjukkan bahwa sebagian besar produk lokal dihasilkan oleh industri berbasis teknologi rendah, yakni industri yang menghasilkan nilai tambah relatif rendah. Kondisi ini juga disebabkan oleh belum terpadunya pengembangan iptek di lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansi dengan dunia industri. Keteringgalan atas penguasaan teknologi membuat daya saing produk industri lemah dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Di pasar lokal, daya saing produk kita semakin terancam akibat belum meluas-

nya penerapan standarisasi nasional.

2. Kebijakan Industri Kabupaten Garut

a. Tujuan Pembangunan Industri Kabupaten Garut

1. Tujuan Jangka Menengah
 - (1) Mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian dan menyerap tenaga kerja.
 - (2) Mampu merambah pasar dalam negeri dan luar negeri.
 - (3) Mampu mendukung perkembangan sektor infrastruktur
 - (4) Mampu memberikan sumbangan terhadap penguasaan teknologi nasional
 - (5) Mampu meningkatkan pendalaman struktur industri dan mendiversifikasi jenis-jenis produknya.
 - (6) Tumbuh menyebar ke luar Pulau Jawa.
2. Tujuan Jangka Panjang :
Membangun industri dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada :
 - (1) Pembangunan ekonomi,
 - (2) Pembangunan sosial, dan
 - (3) Pembangunan lingkungan hidup.

3. Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Garut

1. Jangka Menengah
 - (1) Tersesainya permasalahan yang menghambat
 - (2) Tumbuhnya industri yang mampu menciptakan lapangan kerja yang besar
 - (3) Terolahnya potensi sumber daya alam daerah menjadi produk olahan
 - (4) Semakin meningkatnya daya saing industri untuk pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan luar daerah
 - (5) Tumbuhnya industri-industri potensial yang akan menjadi kekuatan penggerak pertumbuhan industri di masa depan
 - (6) Tumbuh berkembangnya IKM, khususnya industri menengah sekitar dua kali lebih cepat daripada industri kecil
2. Jangka Panjang
 - (1) Kuatnya jaringan kerjasama (networking) antara IKM dan industri besar serta industri di dunia.
 - (2) Kuatnya industri manufaktur
 - (3) Seimbangny sumbangan IKM terhadap PDB

4. Program Peningkatan Daya Saing Industri Prioritas Kabupaten Garut

- a. Sasaran Peningkatan Daya Saing
- (1) Penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya
 - (2) Penciptaan lapangan usaha dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Kabupaten Garut
 - (3) Meningkatkan nilai tambah di dalam Kabupaten Garut melalui pengolahan sumber daya alam, baik yang berbasis agro maupun mineral
 - (4) Sebagai motor penggerak bagi pencapaian target pertumbuhan industri Kabupaten Garut

5. Fokus Pengembangan Industri Prioritas

1. Industri Padat Karya

Program peningkatan daya saing industri padat karya dilaksanakan melalui: program restrukturisasi permesinan untuk industri, pengembangan bahan baku alternatif, pengembangan desain dan merek, serta program P3DN untuk pe-



Peresmian dan perpindahan Kantor UPTD Perindag & Esdm Wilayah Limbangan (GTC).

Menteri Perindustrian Saleh Husen dan Bupati Garut Rudy Gunawan bersama karyawan PT Changshin, Leles.



ngadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN/BUMD.

2. Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang diprioritaskan adalah industri kreatif, seperti industri fesyen, kerajinan dan barang seni, serta terus mendorong pengembangan industri pangan, sandang dan kerajinan melalui konsep One Village One Product (OVOP). Program peningkatan daya saing Industri Kecil dan Menengah adalah modernisasi peralatan IKM, pendidikan dan pelatihan, promosi serta fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR).

3. Industri Berbasis Sumber Daya Alam

Untuk mendorong tumbuhnya investasi industri berbasis sumber daya alam dalam rangka meningkatkan nilai tambah di dalam negeri, Pemerintah sedang mengupayakan fasilitas tax holiday, tax allowance, dukungan fasilitasi pembangunan infrastruktur (jalan, energi, air bersih, dll) melalui dukungan pemerintah maupun swasta.

C. Kebijakan Pembangunan di Sektor Perdagangan Kabupaten Garut

1. Transformasi Kebijakan Pembangunan Di Sektor Perdagangan

Pembangunan perdagangan meru-

pakan salah satu kegiatan dibidang ekonomi yang mempunyai peran strategis dalam rangka pembangunan yang berwawasan nusantara. Sektor perdagangan berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, memenuhi kebutuhan pokok rakyat, serta mendorong pembentukan harga yang wajar.

Pembangunan perdagangan Kabupaten Garut sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan. Kegiatan sektor perdagangan saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan.

Dengan senantiasa berusaha untuk menjawab setiap tantangan yang dihadapi dan mengambil kesempatan atas potensi yang dimiliki, maka pencapaian kondisi perdagangan Indonesia yang diharapkan di masa mendatang, adalah:

- Peran sektor perdagangan yang akan bertambah penting, ditandai dengan munculnya keunggulan Ekonomi Kreatif sebagai pemicu inovasi perdagangan tanpa batas, kont ribusi subsektor

perdagangan eceran yang semakin signifikan dalam pembentukan PDB, dan penciptaan lapangan kerja secara luas. Hal ini terjadi karena: terbentuknya integrasi domestik di sektor perdagangan; terciptanya intensitas mutual partnership dan linkage antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar;

- Terciptanya transaksi domestik dan ekspor dari UKM maupun perusahaan skala besar;
 - Terciptanya intensitas koordinasi antara fasilitator Daerah Kabupaten Garut (Dinas Perdagangan, Perdagangan dan ESDM) dalam pengembangan perdagangan eceran, perdagangan besar, dan pembinaan sektor informal; dan tingginya tingkat penerapan manajemen dan teknologi perdagangan, termasuk yang terkait dengan jaringan.
 - Penggunaan metode perdagangan dan bisnis berbasis teknologi informasi semakin umum digunakan sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi, baik secara individu, kelompok atau antarkomunitas pelaku bisnis perdagangan, antara lain maraknya pemasaran melalui internet dan bisnis periklanan. Selain itu, keterlibatan pelaku perdagangan eceran dan perdagangan besar dalam ekspor dan impor semakin signifikan dan produktif.
- Implikasi kondisi di atas terhadap ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat sangat baik sekalipun pertumbuhan jumlah penduduk merambat naik. Transportasi yang terkendala oleh faktor geografis relatif teratasi karena sinergi antar wilayah. Faktor terpenting yang mendasari hasil pembangunan perdagangan adalah peningkatan indeks kepercayaan bisnis pada semua lini perdagangan di Kabupaten Garut.
- Perkembangan jumlah usaha dan nilai transaksi sektor perdagangan mengalami peningkatan, yaitu nilai transaksi perdagangan eceran. Sedangkan dalam kategori nilai transaksi perdagangan besar, terlihat proporsi nilai transaksi perdagangan nasional didominasi oleh transaksi perdagangan antar daerah
 - Faktor kelangkaan informasi dan ekonomi biaya tinggi secara signifikan teratasi melalui perkuatan jaringan

sistem perdagangan dan pengembangan hukum perdagangan secara simultan. Daya saing Kabupaten Garut meningkat signifikan, Hal ini didorong oleh antara lain hasil reformasi ekonomi perdagangan yang mempengaruhi pelayanan serta efektivitas upaya mengurangi ekonomi biaya tinggi sepanjang jalur distribusi.

- Peran sistem logistik, intermediasi perdagangan, jaringan koleksi, pengumpul, pengecer, grosir, dan distribusi umumnya semakin berkembang dan meningkat, yang didorong oleh meningkatnya penggunaan teknologi elektronik, transportasi yang memadai, dan meningkatnya indeks kepercayaan bisnis di semua lini perdagangan dan perekonomian.
- Daya beli konsumen dan tingkat tabungan masyarakat semakin baik, hal ini ditunjukkan dari tingkat upah minimum dan realisasinya yang semakin baik serta terciptanya semangat kewirausahaan baru.
- Sistem hukum perdagangan dan penegakan hukum lahir dan berkembang secara positif mengikut ikecepatan dinamika bisnis, menopang eksistensi usaha, memberi kepastian usaha serta memperkuat kredibilitas kebijakan perekonomian.

- Pasar domestik dan pelaku usaha dalam Kabupaten Garut yang semakin aman dalam menghadapi terbukanya akses pasar.

- Sektor perdagangan memberi kontribusi positif terhadap penciptaan tenaga kerja, lingkungan hidup, kebudayaan, dan keamanan Kabupaten Garut serta pembentukan norma sosial Kabupaten Garut.

2. Peran Sektor Perdagangan Dalam Perekonomian

Peran sektor perdagangan semakin penting dalam perekonomian nasional, baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, pentingnya peran sektor perdagangan terlihat dari peningkatan kontribusi PDB Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran.

Secara kualitas, semakin pentingnya sektor perdagangan terlihat dari kegiatan-kegiatan yang lebih mengedepankan kualitas jasa perdagangan untuk mendukung sektor industri, pertanian, kehutanan, perikanan, turisme, dan lain-lain. Dukungan kegiatan tersebut memberikan pengaruh yang positif terhadap meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.

Kegiatan-kegiatan ini antara lain meliputi perbaikan pelayanan publik, iklim

usaha, infrastruktur, pembangunan sekaligus revitalisasi dan harmonisasi pasar tradisional-pasar modern, penyediaan kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga serta sinergi pengembangan UKM dan petani di bidang perdagangan.

Pentingnya peran sektor perdagangan juga terlihat dari banyaknya jumlah tenaga kerja di sektor ini. Jumlah tenaga kerja sektor perdagangan UMK semakin meningkat, peringkat kedua setelah sektor pertanian. Jika digabung dengan hotel dan restoran, dimana terdapat transaksi perdagangan di dalamnya, maka jumlah tenaga kerja sektor-sektor tersebut terus tumbuh semakin signifikan dalam meningkatkan perekonomian rakyat Kabupaten Garut.

Upaya Pemerintah Kabupaten Garut untuk mengembangkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dinilai efektif dalam menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat termasuk bagi usaha kecil dan menengah.

Sementara itu, tenaga kerja di bidang perdagangan lebih didominasi pada perdagangan eceran di pertokoan, warung, eceran tradisional, eceran modern, kecuali mobil dan motor. Dengan peningkatan sinergi dan koordinasi, maka 70 persen tenaga kerja sektor perdagangan yang terisi oleh usaha informal dapat dit-



tingkatkan statusnya. Selain itu, integrasi strategis dengan segmen komunitas ekonomi kreatif diyakini akan membuka peluang kesempatan kerja yang signifikan.

Membaiknya kinerja perdagangan tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut, antara lain:

- a. Perbaikan iklim usaha untuk meningkatkan daya saing ekspor dan investasi. Melalui upaya ini telah dilakukan penyempurnaan berbagai kebijakan dalam rangka mendukung peningkatan komoditi pertanian, industri, dan pertambangan.
- b. Fasilitasi perdagangan melalui peningkatan kelancaran arus barang dan pengurangan ekonomi biaya tinggi.
- c. Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan National Single Window untuk pelayanan perizinan satu pintu.
- d. Penerapan strategi pengembangan melalui pendekatan produk-produk utama dan produk potensial dan pendekatan pasar (pasar utama atau tradisional, pasar prospektif, dan pasar potensial).
- e. Peningkatan produk dan akses pasar melalui: part isipasi pada pameran dagang

Dari uraian diatas maka Kebijakan ekonomi Kabupaten Garut merupakan seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi dan menyangkut kepentingan umum.

Paradigma pembangunan ekonomi Kabupaten Garut yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan industri dan perdagangan namun juga kepada pembangunan ekonomi yang lebih ditekankan pada ekonomi kerakyatan. Perubahan paradigma tersebut telah berpengaruh terhadap proses pemulihan ekonomi yang tercermin dari beberapa indikator ekonomi.

Pembangunan industri, sebagai motor penggerak perekonomian Kabupaten Garut, akan terus didorong perannya karena telah terbukti memberi kontribusi yang berarti terhadap pembangunan Kabupaten Garut. Mengingat perannya yang strategis, sektor industri khususnya industri manufaktur, perlu ditingkatkan kinerjanya. Berbagai upaya perbaikan



Gedung Garut Trade Center di Kec. Limbangan.

untuk mengatasi dampak krisis ekonomi terhadap kemerosotan kinerja sektor industri telah dilakukan, namun kinerja itu tampaknya belum sepenuhnya pulih. Hal ini disebabkan adanya permasalahan yang membutuhkan perhatian dan perlu segera diatasi.

Pembangunan perdagangan Kabupaten Garut sangat penting dalam upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan, dan memberikan sumbangan yang cukup berarti dalam penciptaan lapangan usaha serta perluasan

kesempatan kerja dan peningkatan pendapatan.

Kegiatan sektor perdagangan saling berkait dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya, seperti sektor produksi, yaitu pertanian, industri, dan pertambangan, dan lain-lain. Pembangunan perdagangan berperan penting pula dalam menciptakan dan mempertahankan Stabilitas ekonomi Kabupaten Garut dalam mengendalikan inflasi sekaligus dapat meningkatkan daya beli masyarakat Kabupaten Garut. (*)



Revitalisasi Pasar Tradisional Jalan Terus

Pembenahan pasar tradisional yang kumuh menjadi nyaman merupakan salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, Jawa Barat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Bupati Garut Rudy Gunawan mengatakan, Kabupaten Garut memiliki potensi pertumbuhan perekonomian yang baik sehingga harus terus didorong untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Ekonomi kerakyatan terus kita dorong, salah satunya kita menjalankan program merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Garut,” kata Bupati Garut Rudy Gunawan, beberapa waktu lalu.

“Para pedagang maupun pengunjung pasar harus nyaman, ini kita lakukan

sebagai wujud mendongkrak potensi ekonomi,” tambahnya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Garut telah mencanangkan program revitalisasi lima pasar tradisional yang ditargetkan selesai 2019.

Besaran anggaran yang disiapkan Pemkab Garut, kata dia, ada yang mencapai Rp36 miliar untuk selanjutnya pasar yang dibenahi diberikan untuk kepada para pedagang.

“Beberapa pasar yang kita bangun nilainya ada yang Rp36 miliar, ada Rp28 miliar juga,” katanya.

Ia menyampaikan, pembenahan pasar itu karena selama ini pasar tradisional selalu diidentikan dengan kotor sehingga tidak memberikan

kenyamanan bagi pengunjung.

Namun sekarang, lanjut dia, pasar tradisional tidak lagi kumuh, melainkan sebagai tempat perdagangan yang menarik, nyaman dan aman bagi pengunjung maupun pedagang.

“Kita targetkan 2019 lima pasar di Garut tuntas dibangun layak, modern, sehingga pasar rakyat tidak lagi kumuh,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Garut saat ini sedang memperbaiki pasar tradisional Samarang di Kecamatan Samarang yang ditargetkan selesai akhir 2017, selanjutnya akan membangun Pasar Tradisional Leles pada tahun anggaran 2018.

Sedangkan pasar tradisional yang sudah selesai dibangun yaitu Pasar Wanaraja dengan kondisi megah dan



Peresmian Pasar Rakyat Wanaraja oleh Bupati Garut Rudy Gunawan.



nyaman bagi pedagang maupun pengunjung.

"Sekarang pasar tidak lagi kumuh, buktinya sekarang di Pasar Wanaraja menjadi tempat foto-fotoan

masyarakat karena tempatnya bagus," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral Kab. Garut,

Wawan Nurdin



Wawan Nurdin menjelaskan pihaknya sudah mengembangkan program revitalisasi terhadap sejumlah pasar tradisional di kabupaten Garut.

Sejak tahun 2016, sedikitnya enam pasar desa dan satu pasar kabupaten. Sementara untuk tahun 2017 ini akan merevitalisasi dua pasar desa masing-masing pasar Desa Pangauban Cisurupan dan Pasar Desa Pasirwangi.

Sokongan anggaran untuk revitalisasi Pasar Desa dan Kabupaten tersebut menurut bersumber dari APBD Garut, DAK Pusat dan juga dari anggaran Pemprov Jabar.

"Khusus untuk Pasar induk Guntur Ciawitali Garut, kami menargetkan 2019 sudah selesai direvitalisasi," tambahnya. (*)



Wakil Bupati dr. Helmi Budiman saat monitoring Pembangunan Pasar Samarang.

PT Changshin Reksa Jaya

MENUJU INDUSTRI INTERNASIONAL, BERDAYAKAN SDM LOKAL GARUT



Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Bupati Garut Rudy Gunawan pada opening PT Changshin Reksa Jaya.

Bila membicarakan pusat industri manufaktur pasti yang terbersit adalah daerah Bekasi atau Karawang dengan kawasan industrinya yang begitu megah dan komplit dengan berbagai perusahaan mulai dari yang kecil, menengah sampai besar. Industri manufaktur sendiri adalah suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual.

Tetapi bila bicara industri di Garut pasti sebagian besar akan tercetus industri kerajinan kulit dengan Sukaregang sebagai pusatnya, kemudian industri Bulu Mata palsu oleh PT. Danbi Internasional/ Surya Garut Indah, kemudian pangan seperti

dodol dan coklat. Selebihnya Garut dikenal sebagai daerah wisata juga hasil pertanian dan peternakannya. Diantaranya yang terkenal adalah Domba Garut, jeruk, akar wangi dan kopi.

Hal ini wajar karena berdasarkan

Perda No 29 tahun 2011 mengenai Rencana Tata Ruang dan Tata Wilayah Kabupaten Garut 2011-2031 tercatat sekitar 84,99% atau sekitar 261.256,88 Ha dari luas wilayah Garut merupakan kawasan lindung. Sedang untuk kawasan industri ditetapkan sekitar 31.100 Ha itupun tersebar diseluruh Kecamatan.

Tetapi seiring perbaikan sistem birokrasi dan infrastruktur yang terus digenjot. Maka mulai menarik minat investor salah satunya adalah Konsorsium asal Korea yaitu Changshin Inc. Tidak tanggung-tanggung Changshin langsung menggelontorkan dananya sebesar US\$ 60 juta atau sekitar Rp. 720 miliar. Maka terbentuklah PT. Changshin Reksa Jaya pada tahun 2014 berlokasi di Jl.Raya Leles No. 134 Dusun Karang Mekar RT

02 RW 08 Desa Ciburial Kecamatan Leles Garut.

Bila yang sering bepergian ke arah Bandung, selepas Tutugan Leuweung Tiis setelah STKIP Siliwangi pabrik manufaktur yang memproduksi bagian sepatu salah satu brand sepatu terkenal yaitu NIKE, tampak berdiri kokoh dibalik rimbunnya pepohonan. Keseriusan PT Changshin dalam membangun industrinya terlihat sejak pertama kali tim peliput Diskominfo memasuki gerbang halaman parkirnya yang cukup luas. Gerbang besi yang cukup tinggi yang dijaga ketat oleh beberapa petugas keamanan tersebut cukup membuat segan siapapun yang hendak masuk ke area pabrik.

Usai mendapat konfirmasi dengan Sinta, staf karyawan bagian HRM (Human Resources Management) yang sudah membuat janji, perlahan satpam membukakan pintu gerbang. Dan sekali lagi mobil diminta berhenti agar salah satu diantara kami bersedia memberikan jaminan kartu identitas. Terlihat deretan parkir kendaraan roda dua yang berjajar rapi menandakan banyaknya pegawai.

Perlahan kendaraan dinas yang kami tumpangi melaju mendaki jalan berkelok dengan hotmix yang mulus. Sekilas tidak tampak lokasi tersebut adalah sebuah pabrik manufaktur karena rimbunnya pohon yang menyamarkan bangunan sekaligus mempercantik dan menjadikan area gedung menjadi ramah lingkungan.

Dibalik rimbun pepohonan tersebut

Menteri Perindustrian Saleh Husin (kiri) berbincang-bincang dengan karyawan PT Changshin Reksa Jaya.



berdiri megah kompleks pabrik yang terbagi beberapa bagian kompleks gedung yang tertata rapih. Sesuai dengan arahan petugas keamanan kami langsung menuju gedung kantin yang luasnya sama hampir seperti gedung-gedung produksi lainnya. Ratusan bahkan mungkin ribuan kursi dan meja makan berjajar rapih. Sambil menunggu kedatangan bagian HRM, kami sempat mencoba duduk di kantin yang luas tersebut, sambil membayangkan bagaimana ramainya suasana kala tiba waktu istirahat makan siang.

Akhirnya Tim Diskominfo diterima

oleh Sobirin Asisten Manager General Fair, Yusuf dan Sinta staf Dep. HRM. Dalam ruang meeting yang letaknya satu bangunan dengan Klinik, kami diterima dengan hangat. Terlihat dibalik kaca ruang meeting, Gunung Guntur menjulang ditambah dengan background langit biru semakin menambah kemegahan gunung berapi tersebut.

Berdayakan SDM Lokal

Dalam obrolan ringan, Sobirin mulai menceritakan perjalanan perusahaan yang sudah menjadi sumber mata pencahariannya selama 1,5 tahun. Menurutnya, salah satu alasan



Top Management PT Changshin Reksa Jaya.



Changshin grup menginvestasikan dananya di Garut adalah karena potensi sumber daya manusia (SDM) yang besar.

Besarnya SDM Garut karena berdasarkan kondisi alamnya yang sebagian besar hutan lindung ini menjadikan mayoritas penduduk menggantungkan hidupnya dari pertanian dan peternakan atau masyarakat Agro menurut Sobirin. Ini bisa dilihat dari industri yang berkembang besar sebelumnya adalah industri kulit dengan pusatnya di daerah Sukaregang dan industri bulu mata palsu yang diproduksi oleh PT. Danbi Internasional/Surya Garut Indah yang produknya sudah diekspor hingga ke mancanegara.

“Berdirinya PT Changshin Reksa Jaya

ini salah satunya adalah calon pekerjanya banyak. Walau ada masa transisi dari masyarakat agro menuju industri tapi kalau dibandingkan tempat-tempat lain yang sudah menjadi pusat industri, di Garut sumberdayanya melimpah. Jadi memilih lokasi di Garut karena SDM yang melimpah,” ungkap Sobirin yang sudah memiliki tiga orang anak serta sudah menetap dan menjadi warga Garut.

Selain karena potensi SDM serta sumber daya lainnya yang melimpah, faktor lain dalam memilih Garut adalah karena lokasinya yang dekat dengan jalur utama khususnya tol Purbaleunyi (Purwakarta-Bandung-Cileunyi) yang menghubungkan dengan Tol Cikampek-Jakarta. Bahkan dengan program Tol

DATA KARYAWAN PT CHANGSHIN REKSA JAYA

JENIS KELAMIN

LAKI-LAKI	7.73%
PEREMPUAN	92.27%

PENDIDIKAN

HIGH SCHOOL BELOW	29.73%
SR. HIGH SCHOOL ABOVE	70.27%

MASA KERJA

1-3 BULAN	0.76%
3-12 BULAN	43.44%
1-2 TAHUN	33.43%
2-3 TAHUN	22.38%

DOMISILI

GARUT	96.39%
LUAR GARUT	3.61%

STATUS

TETAP	99.92%
OUTSORSING	-

Cigatas (Cileunyi-Garut-Tasik) yang akan segera terealisasi semakin mendukung proses produksi, Karena selama ini Changshin Garut tidak membuat utuh produk sepatu, baru sebagian. Dan untuk tahap assembling (perakitan) dilakukan di Pabrik Pusat yaitu di PT Changshin Indonesia yang berlokasi di Karawang.



Semangat untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam dan manusia di Garut ini memang menjadi misi dan visi PT Changshin Reksa Jaya yaitu dengan “Menjadi yang terdepan dalam industri manufaktur dengan berbasis budaya saling menghormati manusia dan investasi manusia, yang diwujudkan dengan performa terbaik, ketangguhan sistem produksi dan inovasi”. Sedang Visi-nya adalah “Perusahaan pemimpin yang inovatif dan berkesinambungan”.

Untuk lebih membumikan dan merealisasikan Visi dan Misi perusahaan tersebut manajemen Changshin Garut mewajibkan setiap karyawan di setiap divisi sebelum bekerja mengumandangkan visi dan misi tersebut atau disebut Changshin Moral Vision. “Visi misi ini semua karyawan sudah hapal, sudah melekat. Karena pada penerimaan karyawan itu ada training selama satu minggu dimana penanaman misi dan visi tersebut. Sehingga setiap sebelum bekerja visi-misi ini disebutkan agar ada internalisasi,” papar Sobirin yang diamini rekan kerjanya Yusuf atau biasa dipanggil Abah.

Selain visi dan misi tersebut Changshin mendirikan pabriknya di Garut memiliki beberapa tujuan yaitu Penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan khususnya di daerah Garut/membantu mengurangi pengangguran, Menggali potensi Sumberdaya Manusia agar memiliki daya saing yang lebih baik dan membantu meningkatkan perekonomian daerah Garut.

Target Changshin Garut Menuju Perusahaan Bertaraf Internasional

Walau selama ini Changshin Garut masih mengerjakan sebagian dari produksi sepatu yaitu bagian Upper (atas). Tetapi target produksinya sudah begitu besar yaitu sebanyak 2.310 pasang per har/line. Untuk pencapaian target produksi selama 1 bulan sekitar 950 ribu pasang/bulan. Bahkan diharapkan nantinya bisa mencapai produksi 40 ribu pasang per hari.

Akan tetapi total produksi tersebut bisa terus berkembang dan ditingkatkan karena dari luas lahan 53 Ha yang dimiliki Changshin, baru

sekitar 25 % lahan yang dijadikan tempat produksi. Dan sampai saat ini Changshin telah memiliki karyawan sekitar 6.681 orang dengan pembagian sebanyak 5.663 di bagian produksi sisanya 1.017 karyawan di bagian admin dan supporting. Dan bila kapasitas pabrik terus ditingkatkan diperkirakan bisa menampung sekitar 20 ribu pekerja.

Dengan upaya pengembangan fasilitas yang tengah ditempuh, manajemen Changshin Garut juga terus membenahi kualitas SDM yang dimiliki. Salah satunya adalah dengan melakukan pelatihan baik diawal saat pertama kali diterima dan terus berjenjang. Bahkan sebagian karyawan tersebut dikirim untuk studi banding baik dengan pabrik utama di Karawang hingga ke pabrik Changshin yang berada di luar negeri.

Selain menuntut karyawannya untuk terus berkembang dan berkerja sesuai target, manajemen Changshin Garut juga tidak luput akan hak karyawan. Selain mendapat gaji pokok dan tunjangan tetap tanpa pernah ada keterlambatan, karyawan juga mendapatkan upah lembur yang sesuai. Bahkan untuk lembur ini dilakukan atas kesediaan karyawan

yang dituangkan dalam surat persetujuan lembur.

Kemudian memberikan Apresiasi Kerajinan Bekerja bagi karyawan yang dalam satu bulan penuh hadir terus menerus, mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Selain itu, karena produksi sepatu yang membutuhkan keuletan dan ketelitian maka sebagian besar karyawan yaitu sekitar 92% wanita dan pihak manajemen perusahaan memberikan cuti melahirkan dan menyusui secara penuh. Bahkan bagi karyawan yang tengah hamil mendapat perlakuan yang khusus yaitu mendapat porsi istirahat dan pulang kerja yang lebih awal.

Selain Hak dan Kewajiban tersebut manajemen senantiasa menjaga kedisiplinan para karyawan sehingga tercipta situasi bekerja yang kondusif. “Sistem yang dijalankan di perusahaan untuk menjaga kedisiplinan yang konsisten adalah senantiasa berpatokan pada aturan yang berlaku yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku untuk semua karyawan PT Changshin Reksa Jaya,” ujar Sinta, staf HRM yang merupakan warga asli Leles dan sudah berkerja selama 2 tahun di

DATA PESERTA PENJAMIN SOSIAL

JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
BPJS KESEHATAN	519	6.065	6.584
BPJS KETENAGAKERJAAN	524	6.246	6.770



Bupati Garut Rudy Gunawan sedang menerima secara simbolis bantuan unit rumah dari PT Changshin Reksa Jaya bagi korban bencana banjir bandang yang lalu.

Changshin Garut.

Ditambahkannya, pihak manajemen juga senantiasa membangun komunikasi yang baik dengan karyawannya. Antara lain mengadakan beberapa sarana komunikasi/ penyampaian keluhan bagi karyawan, seperti Grievance Boxes, VoE (Voice of Employee), Hotline Number, tim khusus untuk menangani permasalahan kasus kekerasan dan pelecehan, serta Departemen HR yang senantiasa terbuka untuk menangani keluhan karyawan.

Prestasi dan Tantangan Changshin Garut

Keseriusan Changshin Garut dalam mengelola perusahaan juga dalam menegakkan peraturan perundang-undangan justru menjadikan perusahaan yang baru berdiri sekitar 3 tahun ini telah beberapa kali menorehkan namanya sebagai perusahaan yang berprestasi. Diantaranya adalah Juara ke-2 se-Jabar sebagai perusahaan yang memperkerjakan perempuan terbanyak. Kemudian ada Penghargaan dari Bupati sebagai pionier promosi kesehatan wanita, karena perusahaan secara rutin mengadakan acara bulan kesehatan wanita. Lalu ada Penghargaan KPPBC Tasikmalaya sebagai posko hanggar bea cukai terbaik.

Sedang prestasi yang terbaru 2017 adalah, Penghargaan 10 Perusahaan Se-Indonesia yang mempekerjakan penyandang disabilitas. Ini dikarenakan sampai 2017 perusahaan telah mempekerjakan sebanyak 28 orang

karyawan disabilitas. Dan untuk memenuhi kuota minimal 1% dari total karyawan perusahaan tengah melatih calon karyawan baru penyandang disabilitas.

Prestasi paling anyar lainnya yakni Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai Perusahaan Tertib Administrasi terbaik I Se-Priangan Timur Tahun 2017.

Selain berprestasi Changshin Garut juga mengadakan program Corporate Social Responsibility (CSR) kepada lingkungan sekitar. Diantara yang tengah dan akan dilakukan adalah



KETERANGAN FOTO

Contoh ragam program kegiatan pengembangan SDM dan bakti sosial PT Changshin Reksa Jaya

1. Pelatihan kepemimpinan
2. Pelatihan situasi kegawat daruratan/kebencanaan
3. Santunan kepada anak yatim
4. Kegiatan keagamaan

Bantuan untuk korban bencana banjir Bandang Cimanuk, Pemberian hewan Qurban untuk masjid di sekitar perusahaan, Bantuan untuk Panti Asuhan, Penanaman 1.000 pohon di area perusahaan, Membuka kesempatan bekerja bagi warga Garut yang cacat/difabel (sesuai dengan kondisi pekerjaan yang ada di pabrik) dan Aktif berpartisipasi dengan berbagai aspek kemasyarakatan & pemerintah daerah.

Berbagai pencapaian yang telah diraih oleh Changshin Garut, menurut Sobirin, tidak luput dari peran pemerintah daerah yang memberikan kemudahan perijinan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian menjadi rekan dalam mempersiapkan SDM yang terampil. Dalam hal ini perusahaan bekerja sama dengan BLK dalam melatih dan meningkatkan kemampuan warga Garut.

“Peran Pemerintah Kabupaten Garut dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan diantaranya Mempermudah proses aspek legalitas perusahaan, Penyediaan infrastruktur dan perbaikan fasilitas pendukung lainnya, Pemberian keyakinan dan perlindungan akan rasa aman berinvestasi, aman dan nyaman dalam menjalani aktivitas perusahaan dan Turut membantu dalam mempersiapkan kualitas sumber daya manusianya untuk dapat diserap sebagai karyawan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan Perusahaan,” papar Sobirin.

Walau begitu tentu perjalanan perusahaan bukan tanpa ada hambatan. Menurut Sobirin tantangan yang saat ini masih menjadi permasalahan yang krusial adalah ketersediaan Tenaga Listrik.

Menurutnya kondisi Listrik di Garut belum stabil dalam memenuhi kebutuhan industri, karenanya sering terjadi pemadaman listrik. Dengan berbagai teknologi canggih yang telah terkomputerisasi tentu dengan listrik yang tidak stabil ini

sering menghambat produksi, yang akhirnya memaksa untuk dilakukan lembur.

Selain itu permasalahan yang mungkin akan menjadi krusial bila ada penambahan karyawan adalah air. Menurutnya saat ini Changshin untuk memenuhi kebutuhan air menggunakan sumber air berjarak 7 KM yang dialiri oleh pipa yang dikelola oleh vendor. Walau secara produksi

tidak memerlukan suplay air, tetapi kebutuhan yang besar adalah diperuntukan bagi karyawan. Saat ini dengan jumlah karyawan sekitar 6 ribu orang menggunakan air sebanyak 254 m3/hari. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut selain dilakukan penghematan juga dilakukan pengolahan air, sehingga air bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Sobirin sangat berharap Peran Pemerintah

terutama pemerintah daerah mendukung langkah perusahaan untuk menjadi perusahaan industri besar bisa segera terealisasi. Diantara langkah-langkahnya adalah Memberikan bantuan kepada pihak Perusahaan melalui program-program pengembangan kapasitas Karyawan, Mempermudah semua proses perizinan dan perpajakan, dan Memberikan program-program bantuan bagi kesejahteraan karyawan. ■MD

PENGHARGAAN



Penghargaan dari Presiden RI dalam menciptakan lapangan kerja, Tahun 2015.



BPJS Labor Implementation Performance East Prangran Region, Tahun 2015



Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai Perusahaan Tertib Admitansi terbaik I Se-Prangran Timur Tahun 2017.



Foto bersama Wagub Deddy Mizwar usai penyerahan Penghargaan dari Gubernur Jawa Barat sebagai Peringkat II Perusahaan Terbaik yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan, Tahun 2015



Diah Kurniasari Rudy Gunawan saat menyerahkan Penghargaan atas Kampanye Kepedulian terhadap HIV-AIDS, Tahun 2016.



Penghargaan 10 Perusahaan se-Indonesia yang mempekerjakan penyandang disabilitas, Tahun 2017

- PENGHARGAAN dari Bupati Garut, atas prestasi Peringkat II Perusahaan Terbaik yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Perempuan Tingkat Provinsi Jawa Barat, Tahun 2015.
- BPJS Health Implementation Performance, West Java, 2015.
- PENGHARGAAN dari Bupati Kabupaten Garut sebagai Pionir Promosi Kesehatan Wanita, Tahun 2016
- PENGHARGAAN dari KPPBC Tasikmalaya sebagai Posko Hanggar Bea dan Cukai Terbaik, Tahun 2016
- PENGHARGAAN atas Pelaksana dan Motivator Kegiatan Donor Darah, Tahun 2016.

PERHATIKAN HAK KARYAWAN

Masuknya investasi PT Changshin Reksa Jaya di Kabupaten Garut pada tahun 2014 lalu, menunjukkan langkah nyata Pemda Garut dalam membuka lapangan kerja guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Bagaimana kiprah perusahaan ini setelah sekira tiga tahun beroperasi, Tim Diskominfo berkesempatan mewawancarai Sobirin, Asisten Manager General Fair PT Changshin Reksa Jaya, belum lama ini.



Dapatkah Anda menjelaskan mengenai sejarah dan latar belakang perusahaan ini! Kapan didirikan? Siapa yang mendirikannya?

PT. Changshin Reksa Jaya didirikan pada tahun 2014 berlokasi di Jl. Raya Leles No. 134 Dusun Karang Mekar RT 02 RW 08 Desa Ciburial Kecamatan Leles Garut. PT Changshin Reksa Jaya memulai produksi pertamanya pada bulan April 2015 dan di bulan yang sama tepatnya pada tanggal 27 April 2015 dilakukan Grand Opening Ceremony yang dihadiri oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia, Bapak Saleh Husin.

Apakah Misi dan Visi dari perusahaan ini?

Misi PT. Changshin Reksa Jaya : Menjadi yang terdepan dalam industri manufaktur dengan berbasis budaya saling menghormati manusia dan investasi manusia, yang diwujudkan dengan performa terbaik, ketanggungan system produksi dan inovasi.

Visi Changshin : Perusahaan pemimpin yang inovatif dan berkesinambungan.

Dalam bidang bisnis apakah perusahaan ini bergerak? Produk apa yang ditawarkan?

PT. Changshin Reksa Jaya bergerak dalam bidang manufaktur. Produk yang dibuat adalah sepatu dengan salah satu merek terkenal di dunia.

Apakah tujuan dari didirikannya perusahaan ini?

PT. Changshin Reksa Jaya didirikan bertujuan untuk :

- Penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat yang membutuhkan pekerjaan khususnya di daerah Garut/membantu mengurangi pengangguran
- Menggali potensi Sumberdaya Manusia agar memiliki daya saing yang lebih baik

c. Membantu meningkatkan perekonomian daerah Garut
Dapatkah Anda jelaskan mengenai struktur organisasi perusahaan yang ada saat ini? Uraian tugas dan tanggung jawabnya?

Struktur organisasi saat ini dibentuk berdasarkan kebutuhan organisasi. Terbagi ke dalam beberapa bagian yaitu GM Director, BU Group & VGM Group, Quality Group, Development Group, Production Group, Supporting Group dan Admi Group.

Berapakah jumlah karyawan yang dimiliki perusahaan saat ini? tolong jelaskan dalam setiap bagian yang ada, serta peranannya dalam bagian tersebut?

Jumlah karyawan PT.Changshin Reksa Jaya saat ini +/- adalah 6.681 orang karyawan (update Agustus 2017), dengan pembagian jumlah karyawan produksi 5.663 karyawan dan non produksi (Supporting dan Admin) sebanyak 1.017 karyawan. Karyawan produksi adalah karyawan yang job desknya berhubungan dengan kegiatan produksi, sedangkan non produksi (Supporting dan Admin) adalah karyawan yang job desknya berkaitan dengan pemberian support produksi dan maintenance karyawan agar keberlangsungan proses produksi berjalan dengan baik.

Salah satu prestasi yang pernah dicapai adalah penghargaan atas banyaknya penyerapan tenaga kerja wanita, apa yang melatari kebijakan tersebut? Serta dampak positif dan negatif hal tersebut? Selain prestasi tersebut, prestasi apa saja yang pernah diraih PT.Changshin dari tahun 2016-2017?

Prestasi yang pernah diraih pada tahun 2016 - 2017 adalah:

- Penghargaan dari Bupati Kabupaten Garut sebagai Pionir

- promosi kesehatan Wanita
- b. Penghargaan dari KPPBC Tasikmalaya sebagai Posko Hanggar Bea dan Cukai terbaik tahun 2016
- c. Nominasi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja disabilitas tahun 2017

Bagaimana pembagian kerja (job description) yang diterapkan?

Pembagian kerja secara garis besar berdasarkan keahlian karyawan. Adapun karyawan yang memang belum memiliki keahlian di bagian yang ia tempati, maka perusahaan memberikan training agar karyawan tersebut mampu menempati posisinya.

Seperti apa pendapatan tambahan bagi karyawan?

Selain gaji yang diterima (gaji pokok dan tunjangan tetap), perusahaan memberikan upah lembur bagi pekerja yang lembur, memberikan Apresiasi Kerajinan Bekerja bagi karyawan yang dalam satu bulan penuh hadir terus menerus, mendaftarkan karyawan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Bagaimana sistem untuk menjaga kedisiplinan yang konsisten?

Sistem yang dijalankan di Perusahaan untuk menjaga kedisiplinan yang konsisten adalah senantiasa berpatokan pada aturan yang berlaku yaitu Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang berlaku untuk semua karyawan PT Changshin Reksa Jaya.

Apa saja hak-hak karyawan perusahaan?

Hak-hak yang diberikan kepada Karyawan (sesuai dengan PKB PT Changshin Reksa Jaya), yaitu:

- a. Memberikan upah tepat waktu
- b. Memberikan upah lembur bagi pekerja non *all in*
- c. Memberikan hak cuti sesuai dengan perundang-undangan
- d. Memberikan perlindungan dengan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- e. Ahli waris berhak menerima klaim atas manfaat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku

- f. Karyawan berhak mengemukakan pendapat, saran, usul yang disampaikan dengan layak
- g. Karyawan berhak berserikat dan berkumpul
- h. Memperlakukan karyawan secara manusiawi sesuai dengan Undang-undang
- i. Memberikan fasilitas tertentu yang berhubungan dengan pekerjaannya (perlindungan kerja)
- j. Memberikan pelatihan/pengembangan personel untuk pengembangan karirnya
- k. Memberikan apresiasi atas prestasi yang diraih karyawan

Program CSR yang sudah dan akan dilakukan?

Program CSR yang sudah dan akan dilakukan diantaranya adalah:

- a. Bantuan untuk korban bencana banjir Bandang Cimanuk
- b. Pemberian hewan Qurban untuk Mesjid di sekitar perusahaan
- c. Bantuan untuk Panti Asuhan
- d. Penanaman 1000 pohon di area perusahaan
- e. Membuka kesempatan bekerja bagi warga Garut yang cacat/difabel (sesuai dengan kondisi pekerjaan yang ada di pabrik).
- g. Aktif berpartisipasi dengan berbagai aspek kemasyarakatan dan pemerintah daerah.

Penghargaan/insentif untuk karyawan?

Perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi seperti mengikutsertakan karyawan dalam perlombaan pemilihan karyawan teladan, pemberian tas untuk karyawan yang absensinya bagus.

Bagaimana sistem untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman dan menarik?

Sistem yang diterapkan untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, nyaman dan menarik yaitu kita menerapkan sistem budaya saling menghormati (sesuai dengan Visi dan Misi). Selain itu kita mengadakan beberapa sarana komunikasi/sarana penyampaian keluhan bagi karyawan, seperti Grievance Boxes, VoE (Voice of Employee), Hotline Number, tim khusus untuk menangani permasalahan kasus kekerasan dan pelecehan dan departemen HR yang senantiasa terbuka untuk menangani keluhan karyawan.

Seperti apa peran Pemerintah Kabupaten Garut dalam menunjang keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan?

Peran Pemerintah Kabupaten Garut antara lain:

- a. Mempermudah proses aspek legalitas Perusahaan.
- b. Penyediaan infrastruktur dan perbaikan fasilitas pendukung lainnya.
- c. Pemberian keyakinan dan perlindungan rasa aman berinvestasi, aman & nyaman dalam menjalani aktivitas Perusahaan.
- d. Turut membantu dalam mempersiapkan kualitas sumberdaya manusianya untuk dapat diserap sebagai karyawan sesuai dengan kualifikasi dan kebutuhan Perusahaan.

Apa harapan terhadap Pemerintah kedepannya?

Peran Pemerintah yang diharapkan:

- a. Memberikan bantuan kepada pihak Perusahaan melalui program-program pengembangan kapasitas Karyawan.
- b. Mempermudah semua proses perizinan dan perpajakan.
- c. Memberikan program-program bantuan bagi kesejahteraan karyawan. (*)



DINAS KOPERASI DAN UMKM KABUPATEN GARUT

PENINGKATAN EKONOMI BERBASIS POTENSI LOKAL



Pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dapat menjadi pondasi dalam pembangunan ekonomi. Namun, di sisi lain kedua sektor itu masih memerlukan banyak bantuan dalam segala hal. Oleh karena itu, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut memiliki peran strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Garut.

Untuk menggali lebih jauh mengenai kiprah Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Garut, Majalah Diskominfo berkesempatan mewawancarai Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Garut, Drs. Eko Yulianto, MP., belum lama ini. Berikut ini petikan wawancaranya:

Peran apa yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Garut?

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Dinas Koperasi dan UMKM mengalami perubahan struktur Organisasi untuk mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya dalam mewujudkan efektivitas pelaksanaan program pembangunan ekonomi di Kabupaten Garut berbasis potensi lokal.

Sesuai dengan Renja Dinas Koperasi dan UMKM 2014-2019, menyatakan bahwa Arah Kebijakan ditujukan pada peningkatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui pengembangan produk dan komoditas unggulan serta peningkatan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan strategi menguatkan kelembagaan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan dan peluang pasar KUMKM dan untuk mencapai hal tersebut, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui bentuk inovasi pelayanan publik.

Program apa saja yang terus dikembangkan oleh Dinas Koperasi dan UMKM untuk mengembangkan UMKM yang ada di Kabupaten Garut?

Dalam meningkatkan peran KUMKM dalam Perekonomian Daerah yang merupakan Arah Kebijakan Dinas, maka diformulasikan strategi untuk menguatkan kelembagaan usaha, kapasitas sumber daya manusia UMKM dan Aparaturnya serta diperluas akses sistem pembiayaan dan peluang pasar bagi KUMKM. Hal tersebut dituangkan kedalam Program Kerja Pembinaan

UMKM, yaitu :

- Program Penciptaan iklim usaha-usaha KUMKM yang kondusif;
- Program Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif KUMKM;
- Program Pengembangan sistem pendukung usaha bagi KUMKM;
- Peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi.

Kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten dalam menjalankan strategi yang telah ditetapkan?



Gedung PARIGEL.

Pada Tahun Anggaran 2017 ini, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut telah dan sedang melaksanakan beberapa Kegiatan dalam rangka Pengembangan Usaha UMKM, diantaranya :

- Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan;
- Pengembangan Bentuk dan Desain Kemasan Produk UMKM;
- Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama UMKM;
- Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan;
- Pemberian sertifikasi halal bagi UMK;
- Pendataan dan Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah;
- Rintisan Penerapan Teknologi Sederhana/Manajemen Modern pada Jenis-Jenis Koperasi.

Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut melakukan kegiatan-kegiatannya baik untuk sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan untuk mendukung perkembangan UMKM di Kabupaten Garut apakah telah menyediakan Informasi untuk Penyediaan Permodalan bagi UMKM?

Dalam hal penyediaan permodalan bagi UMKM, dikarenakan adanya peraturan yang mengatur bahwa Dinas Koperasi dan UMKM tidak dimungkinkan lagi untuk memberikan bantuan permodalan dalam bentuk apapun kepada para pelaku UMKM, maka akses permodalan bagi UMKM dari sumber-sumber lain dioptimalkan.

Secara formal, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut sesuai dengan kewenangannya melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan Permodalan yang secara teknis mempertemukan para pelaku UMKM dengan stakeholder dari Lembaga Perbankan maupun Non Bank.

Skema Pembiayaan KUR yang diatur oleh Pemerintah Pusat dan pelaksanaannya oleh Bank Penyalur yang ditunjuk, diperkenalkan kepada para pelaku UMKM. Peserta pada kegiatan tersebut yang terdiri dari para pelaku UMKM mendapatkan fasilitas kemudahan dan prioritas dari segi administrasi perbankan apabila berminat untuk mengakses Program KUR.

Selain itu, permodalan bagi UMKM



dapat diakses pula melalui LPDB (Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir) dibawah Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia, pemanfaatan Program PKBL (CSR) dari BUMN, maupun peningkatan akses permodalan melalui pemberian SHAT (Sertifikasi Hak Atas Tanah) yang dapat menjadikan para pelaku UMKM lebih bankable.

Kami juga mendorong para pelaku UMKM untuk menjadi anggota Koperasi yang ada di lingkungan sekitarnya. Dengan menjadi anggota Koperasi, para pelaku UMKM dimaksudkan pula untuk mendapatkan kemudahan akses permodalan dari dana yang dikelola oleh Koperasi ataupun dengan

mendukung asosisasi pelaku usaha untuk membentuk Koperasi bagi anggotanya.

Penyelenggaraan Promosi Produk UMKM merupakan sesuatu yang strategis untuk pengembangan UMKM, bagaimana peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam penyelenggaraan Promosi Produk UMKM di Kabupaten Garut?

Promosi erat kaitannya dengan upaya menciptakan daya tarik, sehingga perlu dimanifestasikan dalam sebuah etalase yang mampu merepresentasikan Kabupaten Garut sebagai suatu daerah dengan produk lokal kreatif pelaku Usaha Mikronya yang memiliki beragam keunikan dan

ciri khas. Oleh karena itu diperlukan sebuah inovasi dalam upaya pengembangan UMKM dalam konteks Promosi dan Pemasaran produk.

Maka kemudian terlahirlah Parigel yang merupakan branding inovasi layanan publik untuk memfasilitasi promosi dan pemasaran produk pelaku Usaha Mikro yang dimaksudkan untuk lebih mendekatkan layanan Pemerintah Kabupaten Garut kepada masyarakat.

Parigel, merupakan kata dalam bahasa Sunda yang secara harfiah dalam bahasa Indonesia berarti terampil dan secara semantik memiliki makna mampu bekerja dan mampu berusaha serta Parigel mengangkat semangat dan tema kearifan lokal, merepresentasikan kondisi para pelaku Usaha Mikro Kabupaten Garut yang identik dengan “kaParigelan” nya, yaitu Usaha Mikro yang berwirausaha secara terampil, kreatif dan inovatif.

Parigel pula menjadi semangat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut untuk senantiasa berinovasi dan optimal dalam melaksanakan pelayanan publik pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro.

Parigel menyediakan fasilitas promosi dan pemasaran produk lokal kreatif pelaku Usaha Mikro Kabupaten Garut yang terdiri dari :

1. Gedung Gallery (Parigelstore) yang menjalankan aktivitas Promosi, Pemasaran, Edukasi dan Pengembangan Usaha Mikro secara offline
2. Website Promosi (parigel.com) dimaksudkan untuk Promosi, Pemasaran, Informasi dan Pendataan Usaha Mikro secara online
3. Mobil Promosi (Parigelmobile) untuk fasilitas Promosi dan Pemasaran produk lokal Kreatif Kabupaten Garut secara mobile

Parigel terbuka dan mengajak para pelaku Usaha Mikro Kabupaten Garut untuk bergabung dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, dengan persyaratan :

1. Usaha Mikro milik perseorangan atau badan usaha yang telah memiliki legalitas usaha IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil);
2. Usaha Mikro dengan jenis usaha Makanan Olahan, Minuman Olahan, Kerajinan, Fashion, Jasa, Kuliner dan



- lainnya;
3. Memenuhi standar produk maupun standar kemasan, untuk produk makanan olahan;
4. Kreatif, Inovatif dan Proaktif berperan secara berkesinambungan mengembangkan Parigel;
5. Pendaftaran dapat dilakukan secara online di www.parigel.com atau menghubungi Admin Parigel.

Apakah Dinas Koperasi dan UMKM dalam program kerjanya telah pula melaksanakan penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan,

Penyusunan Kebijakan Tentang UMKM, dan Fasilitas Pengembangan UMKM di Kabupaten Garut?

Secara khusus dan telah tertuang dalam Program Kerja Dinas, Pelatihan Kewirausahaan dilaksanakan bagi para pelaku UMKM yang bertujuan untuk mewujudkan UMKM yang tangguh dan mandiri sesuai dengan prinsip-prinsip kewirausahaan yang mengedepankan jiwa entrepreneurship yang diwarnai dengan kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi dalam menjalankan aktivitas usahanya.

Selanjutnya pada tahun 2017 ini, telah disusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang KUMKM, untuk dijadikan landasan dalam pembinaan UMKM di Kabupaten Garut yang diselaraskan dengan kearifan lokal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ekonomi di Daerah.

Selain dari Program Kerja Pembinaan UMKM yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas, kami pun memfasilitasi berbagai program pemerintah lainnya bagi UMKM yang sifatnya non budgeter, diantaranya:

- Akses SIKP, KUR, PKBL, LPDB;
- Pelatihan dan Bimbingan Teknis dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi;
- Fasilitasi HAKI, P-IRT dan SHAT;
- Pendampingan bagi Koperasi dan UMKM oleh Tenaga Pendamping;
- Pendampingan IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil), dan;
- Pendampingan KUR (Kredit Usaha Rakyat).

Faktor yang mendukung adalah tersedianya dana atau anggaran yang memadai, jalinan kerjasama dengan para stakeholders, serta adanya sarana dan prasarana yang memadai, apakah faktor-faktor tersebut telah di dukung?

Dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut, telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang cukup memadai. Namun demikian, terlepas dari adanya keterbatasan tersebut kami tetap berupaya sebaik-baiknya melaksanakan pengelolaan anggaran yang telah dipercayakan kepada kami untuk meraih hasil target capaian kinerja pengembangan UMKM yang optimal.

Kami melaksanakan sinergitas program kegiatan dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah yang terkait baik di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Dengan harapan kerjasama tersebut dapat menghasilkan kontribusi positif bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Garut. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah bahwa pengembangan UMKM merupakan upaya bersama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha.

Sebagai salah satu contoh, di Kabupaten Garut ini kami menjalin kerjasama dengan asosiasi para pelaku usaha seperti GAPURA dan GUMKEMINDO yang memiliki potensi sumberdaya manusia yang cukup banyak secara kuantitas dan memiliki kualitas memadai dalam berkontribusi kolektif untuk pengembangan usaha di Kabupaten Garut.

Melalui saluran tersebut kami dapat mensosialisasikan dan mensinergikan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan dan juga sesuai dengan perannya masing-masing dapat saling melengkapi bangunan konsep Pengembangan UMKM untuk mewujudkan tujuan Pembangunan Ekonomi Kabupaten Garut yang lebih baik.

Demikian pula halnya terkait dengan sarana dan prasarana pendukung, kami memandang kondisi eksisting di Dinas Koperasi dan UMKM dapat dimanfaatkan secara efektif melalui pengelolaan yang optimal. Khusus terkait dengan sarana untuk

Pengembangan Usaha, kami sangat berterimakasih kepada Bapak Bupati Garut yang telah memberikan dukungan yang besar dalam hal Pengembangan UMKM. Hal tersebut diwujudkan diantaranya dalam Pembangunan Gedung Galeri dan Penyediaan Mobil Promosi yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh para Pelaku UMKM di Kabupaten Garut. Juga melalui perkenan Beliau, yang merestui inovasi pelayanan publik Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Garut bagi para Pelaku UMKM.

Faktor yang menghambat adalah rendahnya kewirausahaan yang di miliki oleh SDM UMKM yang berdampak pada terhambatnya pelaksanaan strategi pengembangan tersebut, bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM mengatasi permasalahan tersebut, dan program apa saja yang dilakukan?

Tidak dapat dipungkiri bahwa UMKM memiliki kelemahan diantaranya Kompetensi SDM belum optimal, keterbatasan teknologi, keterbatasan jaringan pemasaran, belum mampu membangun keunggulan bersaing yang spesifik dan sering tidak konsisten dalam menjaga kualitas produknya.

Kondisi demikian tentu menjadi perhatian kami untuk mencari pemecahan masalah maupun jalan keluarnya. Seyogyanya Para Pelaku UMKM harus mampu bangkit serta meningkatkan daya saing produknya di pasar. Untuk mewujudkan hal tersebut, apabila dilihat dari sudut pandang praktis dan teoritis, tentu konsep-konsep kewirausahaan berperan besar





dalam mewujudkannya.

Melalui Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan, kami berupaya menstimulasi dan mendorong para Pelaku UMKM agar mampu memberikan nilai tambah pada produk yang dihasilkannya. dan selanjutnya diharapkan mereka dapat lebih berkeasi menciptakan ide-ide pengembangan usaha dan memiliki inovasi untuk mewujudkan kreasi tersebut.

Adanya Program Penciptaan 100.000 Wirausaha Baru (WUB) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Wirausaha Pemula (WP) dari Kementerian Koperasi dan UMKM RI, benar-benar kami sinergikan adanya guna meningkatkan kemampuan berwirausaha para pelaku UMKM.

Selain itu, tidak kalah penting pula memerankan Pelaku UMKM yang telah terlebih dahulu meraih kesuksesan ataupun memiliki pemikiran brilian menjadikannya sebagai role model yang mampu menjadi motivator bagi pelaku usaha lainnya. Oleh karena itu kerjasama dan sinergitas dengan asosiasi pelaku usaha memegang peranan penting.

Upaya lain dilaksanakan diantaranya dengan turut mensukseskan Program Pemerintah dalam memberikan kemudahan Perizinan Operasional Usaha bagi UMKM melalui IUMK (Izin Usaha Mikro dan Kecil) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2014.

Dengan adanya kemudahan legalitas/ perizinan usaha yang

diterbitkan di Kecamatan sesuai kewenangannya diharapkan para Pelaku UMKM lebih bergairah dalam menjalankan kegiatan usahanya serta mendapatkan manfaat diantaranya :

1. Pelaku UMKM mendapatkan kepastian hukum, perlindungan dan kenyamanan dalam menjalankan kegiatan usaha;
2. Meningkatnya akses permodalan,

pemasaran dan kemitraan bagi UMKM;

3. Meningkatnya prosentase perubahan status Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil dan Usaha Kecil menjadi Usaha Menengah;
4. Meningkatnya daya saing dalam berkompetisi di tingkat Internasional terutama dalam menghadapi MEA. ■MD

POTENSI KOPERASI DAN USAHA MIKRO DI KABUPATEN GARUT **Jumlah Koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Kab/Kota**

a. Fungsional	: 89 Koperasi
b. Non Fungsional	: 1.329 Koperasi
c. KSP	: 44 Koperasi
d. KSPPS (KJKS)	: -
e. Koperasi Kredit	: -
f. Jumlah Koperasi tidak aktif	: 409 Koperasi
g. Jumlah USP	: 1.374 Koperasi
h. Jumlah Anggota	: 244.365 orang
i. Jumlah Kontribusi Koperasi dalam Perekonomian Kabupaten/ Kota	
(1.) Jumlah PDRB	: Rp 15.953.599.080.000,-
(2.) Jumlah Omset Koperasi	: Rp 797.679.954.000,-
(3.) Persentase	: 5%

Jumlah Pengusaha Mikro

a. Sektor Perdagangan	: 3.285
b. Sektor Pengolahan/IK	: 20.516
c. Sektor Jasa	: 792
d. Sektor Pertanian	: 7.656
e. Sektor Perikanan	: 6.043
f. Sektor Peternakan	: 3.567
g. Sektor Pertambangan	: 29
h. Sektor Lainnya	: 43
Jumlah	: 51.931
(1.) Jumlah PDRB	: Rp 3.689.774.852,-
(2.) Jumlah Omset Pengusaha Mikro	: Rp 922.443.713,-
(3.) Persentase	: 25%

GARUT DAPAT PENGHARGAAN DI HARI BHAKTI KOPERASI

BUPATI Garut, H. Rudy Gunawan menerima penghargaan Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tingkat nasional dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Anak Agung Gede Ngurah (AAGN) Puspayoga, pada Selasa 11 Juli 2017 di Makasar, Sulawesi Selatan.

Kepala Dinas Koperasi Eko Yulianto dalam penjelasannya mengatakan bahwa Penghargaan Tanda Jasa Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah itu diraih berkat komitmen pimpinan daerah dalam pembinaan Koperasi dan UKM serta keseriusan pelaku Koperasi dan UKM dalam mengelola usahanya dan untuk selanjutnya Pemerintah Kabupaten Garut akan terus berupaya meningkatkan ekonomi kerakyatan dengan memberdayakan pelaku ekonomi usaha kecil menengah (UKM).

Dalam perayaan Hari Koperasi ke-70 tahun 2017 ini, Kabupaten Garut memperoleh beberapa penghargaan dari Menteri Koperasi dan UKM antara lain, Bupati Garut H. Rudy Gunawan dan Sekda H. Iman Alirahman, mendapatkan penghargaan Tanda Jasa Bakti Koperasi, untuk koperasi berprestasi diraih oleh KUD Bayongbong pimpinan Roni A. Soppa, selanjutnya Drs. Awan Sanusi Ketua KPRI Cisarupan meraih penghargaan sebagai tokoh koperasi dan meraih Satya Lencana, untuk UKM berprestasi diraih oleh Kiki Chocodot dan Andris Liwet 1001, serta Drs. H. Nandang Anwar memperoleh penghargaan Wirakarya dari Presiden.

Acara Penyerahan penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil Menengah kepada Kepala Daerah, pelaku Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berprestasi dalam memajukan kegiatan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia.



BUPATI H. Rudy Gunawan, SH, MH, MP saat menerima piagam Penghargaan Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Gubernur Sulawesi Selatan, Ketua Dekopin dan Walikota Makasar.

Sedangkan acara puncak Hari Koperasi Nasional dilaksanakan Rabu (12/7/2017) yang dihadiri Presiden Republik Indonesia. (*)



EKONOMI KREATIF

Perekonomian Indonesia sekarang mulai berubah. Pada masa dahulu Perekonomian Indonesia tidak mengenal dengan sistem ekonomi kreatif. Akan tetapi Negara Indonesia sudah mulai mengetahui tentang apa itu Ekonomi Kreatif.

Disini saya akan memberikan sedikit informasi dari berbagai sumber yang saya dapat tentang ekonomi kreatif. Apa itu Ekonomi Kreatif, apa alasan Indonesia menggunakan sistem ekonomi kreatif, Langkah apa saja yang dilakukan pemerintah untuk menjalankan ekonomi kreatif.

Menurut definisi Howkins, Ekonomi Kreatif adalah kegiatan ekonomi dimana input dan outputnya adalah Gagasan. Benar juga, esensi dari kreatifitas adalah gagasan. Bayangkan hanya dengan modal gagasan, seseorang yang kreatif dapat memperoleh penghasilan yang sangat layak. Gagasan seperti apakah yang dimaksud? Yaitu gagasan yang orisinal dan dapat diproteksi oleh HKI. Contohnya adalah penyanyi, bintang film, pencipta lagu, atau periset mikro biologi yang sedang meneliti varietas unggul padi yang belum pernah diciptakan sebelumnya.

Kemampuan untuk mewujudkan kreativitas yang diramu dengan sense atau nilai seni, teknologi, pengetahuan dan budaya menjadi modal dasar untuk menghadapi persaingan ekonomi, sehingga muncullah ekonomi kreatif sebagai alternatif pembangunan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Alasan mengapa Indonesia perlu mengembangkan ekonomi kreatif antara lain karena ekonomi kreatif berpotensi besar dalam: Memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan; Menciptakan iklim bisnis yang positif; Membangun citra dan identitas bangsa; Mengembangkan ekonomi berbasis kepada sumber daya yang terbarukan; Menciptakan inovasi dan kreativitas yang merupakan keunggulan kompetitif suatu bangsa; Memberikan dampak sosial yang positif.

Ada alasan lain mengapa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kreatif. Ternyata, tersimpan ribuan bahkan jutaan potensi produk kreatif yang layak dikembangkan di Tanah Air. Tengok saja potensi itu: sekitar 17.500 pulau, 400 suku bangsa, lebih dari 740 etnis (di Papua saja 270 kelompok etnis), budaya, bahasa,

agama dan kondisi sosial-ekonomi.

Nilai-nilai budaya luhur (cultural heritage) yang kental terwarisi, seperti teknologi tinggi

pembangunan

Borobudur,

batik,

songket,

wayang,

pencak

silat,

dan

seni bu

daya

lain,

menjadi

aset

bangsa.

Tercatat pula,

tujuh lokasi di

Indonesia yang

dijadikan situs

pusaka dunia (world

heritage site).

Belum lagi

tingkat

keragaman hayati

(biodiversity) yang

sukar ditandingi.

Begitu banyak

spesies yang khas

dan tak dapat

dijumpai di wilayah

lain di dunia, seperti

komodo, orang utan,

cendrawasih. Tak ketinggalan,

hasil budidaya rempah-rempah,

seperti cengkeh, lada, pala, jahe,

kayumanis, dan kunyit.

Semua itu bila diarahkan menjadi

industri ekonomi kreatif, tentu

membuahkan hasil luar biasa. Apalagi,

era saat ini mengarah pada ekonomi

kreatif, setelah era gelombang

pertanian, gelombang industri, dan

gelombang informasi, seperti teori Alvin

Toffler, berlalu.

Ekonomi kreatif, kata Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono, merupakan satu

dari tiga sektor yang dapat mendorong

perekonomian Indonesia di saat

ekonomi dunia melambat. Dua sektor

lain, yaitu pariwisata serta tenaga kerja

yang handal, terampil, dan berbudaya.

Tiga sektor ini, punya potensi cukup

besar, keunggulan serta peluang devisa

yang tinggi.

Ekonomi kreatif sangat tergantung kepada modal manusia (human capital atau intellectual capital, ada juga yang menyebutnya creative capital). Ekonomi kreatif membutuhkan sumberdaya manusia yang kreatif tentunya, mampu melahirkan berbagai ide dan menterjemahkannya ke dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai ekonomi. Proses produksinya bisa saja mengikuti kaidah ekonomi industri, tetapi proses ide awalnya adalah kreativitas.

Berapakah penghasilan seorang seniman yang hebat? Misalnya grup musik terkenal seperti Dewa 19, atau sutradara film papan atas? Ternyata nilainya tidaklah kecil dan bahkan lebih tinggi daripada penghasilan manajer senior di dunia perbankan. Menjanjikan bukan?

Untuk mengembangkan ekonomi kreatif, pemerintah harus membuat beberapa langkah terobosan, diantaranya seperti :

1. Menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya, dengan harapan mampu menyumbangkan devisa sebesar US\$ 6 miliar pada 2010. Insentif itu mencakup perlindungan produk budaya, pajak, kemudahan memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran dan promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional.
2. Membuat roadmap industri kreatif yang melibatkan berbagai departemen dan kalangan.
3. Membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pendidikan, pengembangan SDM, desain, mutu dan pengembangan pasar.
4. Memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Beberapa contoh produk industri kreatif yang dilindungi HKI-nya, di antaranya buku, tulisan, drama, tari, koreografi, karya seni rupa, lagu atau musik, dan arsitektur. Produk lainnya adalah paten terhadap suatu penemuan, merek produk atau jasa, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang.
5. Pemerintah akan membentuk Indonesian Creative Council yang



Kerajinan bambu Kec. Selaawi.

SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF

1. Aplikasi dan Pengembangan Permainan
2. Arsitektur
3. Desain Interior
4. Desain Komunikasi Visual
5. Desain Produk
6. Fashion
7. Film, Animasi, dan Video
8. Fotografi
9. Kriya
10. Kuliner
11. Musik
12. Penerbitan
13. Periklanan
14. Seni Pertunjukan
15. Seni Rupa
16. Televisi dan Radio

Sumber : Badan Ekonomi Kreatif



akan menjadi jembatan untuk menyediakan fasilitas bagi para pelaku industri kreatif. Keenam, pemerintah akan menyelenggarakan lomba Indonesia Creative Idol (ICI) 2008, yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan industri kreatif. Acara ini digelar di 12 kota di Indonesia selama Juni-Agustus 2008.

Dengan menggenjot perkembangan industri kreatif di Tanah Air, banyak manfaat yang bisa diraih apabila pihak pemerintah dan para pendukung ekonomi kreatif serius dalam menjalankan tugasnya, diantaranya seperti :

1. Bisnis UKM makin berkembang sebagian besar UKM bergerak di industri kreatif. Beberapa masalah UKM di Indonesia, seperti pemasaran, promosi, manajerial, informasi, SDM, teknologi, desain, jejaring (networking), dan pembiayaan diharapkan bisa segera teratasi. Alhasil, harapan IKM menjadi penggerak utama perekonomian nasional dengan kontribusi 54% kepada PDB dan pertumbuhan rata-rata 12,2% per tahun pada 2025 bisa diwujudkan.
2. Mengurangi tingkat kemiskinan. Menurut BPS, orang miskin pada 2007 telah mencapai 16,5% (sekitar 37,1 juta jiwa), naik dibanding tahun 2005 yang 15,9%.
3. Mengurangi tingkat pengangguran. Pada 2005, tingkat



pengangguran resmi tercatat pada titik tertinggi, yakni 10,3%. Sementara itu angka pengangguran terbuka pada Agustus 2007 mencapai 10,01 juta orang. Tingkat pengangguran pedesaan sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan. Mulai tahun 2000 seterusnya, ada kecenderungan meningkatnya pengangguran di kalangan perempuan dan orang muda. Studi Profesor Harvey Brenner dari Johns Hopkins University AS menunjukkan bahwa setiap 1% tambahan angka pengangguran akan mengakibatkan 37 ribu kematian, 920 orang bunuh diri, 650 pembunuhan dan 4000 orang dirawat di rumah sakit jiwa.

KESIMPULAN

Kesimpulahan dari hasil penjelasan di atas adalah bahwa realitas dan fenomena ekonomi kreatif sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi Indonesia yang telah terbukti memiliki aset kreativitas sejak dulu. Indonesia tidak kekurangan modal kreatifitas hanya kekurangan kemampuan

mengintegrasikannya. Untuk itu langkah-langkah yang dibutuhkan adalah: Mengenali apa yang kita miliki (jati diri



konprehensif.

3. Menggiatkan inisiatif, baik swasta maupun Pemerintah untuk menciptakan tempat-tempat pengembangan talenta industri kreatif di daerah-daerah.
 4. Menciptakan produk & jasa yang kreatif dan berbasis budaya berdasarkan prioritasnya, misalnya :
 - a. Pariwisata
 - b. Kerajinan
 - c. Gaya Hidup (spa, herbal, kuliner)
 - d. Furniture, dll
5. Menciptakan pasar berbasis budaya didalam negeri karena selama ini selalu menjadi target pasar dari negara lain.
6. Menumbuhkan semangat inovasi dan kreativitas didalam dunia pendidikan agar generasi muda mampu melahirkan gagasan baru berdasarkan apa yang sudah dimiliki sejak dulu.
7. Transfer teknologi yang konsisten terhadap industri kreatif berwawasan budaya seperti disebut diatas.
8. Meningkatkan pendapatan devisa berbasis kreatif atas sektor-sektor tersebut diatas.
9. Promosi Potensi Indonesia.
 - a. Alam
 - b. Warisan Budaya (heritage)
 - c. Budaya

bangsa dan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia) dan menyusun langkah-langkah konstruktif sebagai berikut :

1. Menyusun Cetak Biru Ekonomi Kreatif Indonesia yang melibatkan seluruh stakeholder.
2. Mengajukan usulan kebijakan Ekonomi Kreatif yang



10. Sosialisasi, diseminasi dan promosi secara sistimatis tentang kekuatan Indonesia dibidang Industri kreatif agar diperhitungkan di Peta kompetensi Dunia. (*)

Bupati Rudy Gunawan saat membuka Job Fair 2017.



PERAN DISNAKERTRANS DALAM MENGURANGI TINGKAT PENGANGGURAN

Misi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut

1. Meningkatkan Kesempatan Kerja dengan memacu kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
2. Mengembangkan Sistem Hubungan Industrial dan Meningkatkan Kesejahteraan pekerja serta Perlindungan Ketenagakerjaan
3. Mewujudkan Kesejahteraan Calon Transmigran
4. Meningkatkan Kualitas Kinerja dengan Prinsip Tata kelola Pemerintahan yang Baik.

Pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumberdaya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi serta produktif, merupakan upaya menyeluruh dan menunjukan padah peningkatan, pembentukan dan pengembangan tenaga kerja yang berkualitas, produktif, efisien, efektif, dan berjiwa wirausaha sehingga

mampu mengisi, menciptakan dan memperluas lapangan kerja serta kesempatan berwirausaha.

1 Kedudukan dan Fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut tahun 2017-2019 dalam mencapai Visi Misi Pemerintah Kabupaten Garut 2014-2019 yaitu dengan memperhatikan kondisi permasalahan yang ada, tantangan kedepan serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka untuk mewujudkan Kabupaten Garut yang Bermartabat,

Nyaman dan Sejahtera, didukung dengan Renster Disnakertrans Kabupaten Garut “Terwujudnya Tenaga Kerja dan Transmigran Mandiri, Berdaya Saing dan Terlindungi” dengan misi:

- a. Meningkatkan tata kelola pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, prima untuk mewujudkan kehidupan masyarakat bermartabat dan agamis;
- b. Mewujudkan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal;
- c. Mewujudkan kualitas infrastruktur yang memadai serta lingkungan yang sehat, aman dan yaman;
- d. Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah serta membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dan berbudaya luhur.

2 Program unggulan/Amazing yang memberikan dampak luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan pilar pembangunan Kabupaten Garut, yaitu:

- a. Penguatan ekonomi kerakyatan
- b. Pemantapan infrastruktur wilayah
- c. Optimalisasi pelayanan publik

Telah mengambil langkah-langkah dengan bentuk menciptakan perluasan kesempatan kerja, baik jumlah maupun mutu selama periode tahun 2015 sampai dengan bulan Juli 2017 terlihat bahwa pertambahan angkatan kerja yang terdaftar telah dapat diikuti oleh perluasan kesempatan kerja. Jumlahnya meningkat dari 18.485 orang pada tahun 2015 menjadi 22.528 orang pada tahun 2016 atau bertambah sebesar 4.043 orang. Pada periode yang sama, jumlah yang ditempatkan meningkat dari 1.516 orang menjadi 2.550 orang, atau bertambah sebanyak 1.034 orang. Dengan demikian, pada tahun 2015 terdapat yang belum ditempatkan 20.196 orang atau sekitar 90 persen.

Sedangkan untuk tahun 2017 sampai dengan bulan Juli 2017 pencari kerja yang terdaftar sebanyak 15.638 orang, dengan jumlah penempatan dalam negeri sebanyak 1.525 orang dan penempatan luar negeri sebanyak 15.638 orang, dengan jumlah penempatan dalam negeri sebanyak 180 orang, sisa pencarian kerja yang belum ditempatkan sampai dengan bulan Juli 2017 sebanyak

13.938 dengan sisa lowongan pekerjaan dalam negeri sebanyak 1.369 dan luar negeri sebanyak 1.367.

3 Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.32/MEN/XII/2008 tentang Tata Cara Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Lembaga Kerja Bipartit dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Lembaga Kerja Sama Bipartit berfungsi sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dengan wakil serikat pekerjaan/serikat buruh dan/atau wakil pekerja/buruh dalam rangka pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup, pertumbuhan, dan perkembangan perusahaan termasuk kesejahteraan pekerja/buruh.

Padahal kenyataannya sebagian besar perusahaan belum memahami pentingnya keberadaan LKS Bipartit tersebut. Dari jumlah perusahaan yang tercatat hanya 24 perusahaan yang telah membentuk LKS Bipartit. Untuk itu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Garut mengambil langkah-langkah dalam upaya menanamkan pemahaman pada perusahaan dengan melaksanakan kegiatan berupa sosialisasi berbagi peraturan tentang ketenagakerjaan khususnya dibidang industrial. Disamping itu pula dilaksanakan pembinaan secara langsung ke perusahaan-perusahaan. Adapun proses pengawasan pelaksanaan peraturan tersebut menjadi kewenangan pegawai-pegawai Ketenagakerjaan dimana sejak tanggal 1 Januari 2017 menjadi kewenangan pemerintah propinsi.

4 Dalam penanganan perselisihan hubungan industri antara pekerja dan pengusaha Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang dimediasi oleh Mediator Hubungan Industrial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, Pasal 1 Ayat 11 menyebutkan Mediasi Hubungan Industri yang selanjutnya disebut mediasi adalah penyelesaian perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan

antara serikat pekerja/serikat buruh hanya satu perusahaan melalui musyawarah yang ditangani oleh seorang atau lebih mediator yang netral.

Dalam melaksanakan mediasi setelah menerima pengaduan dari pekerja maka mediator beserta kepala seksi yang menangani perselisihan akan melakukan kajian dan penelitian terkait kasus perselisihan tersebut. Perselisihan hubungan industri wajib diupayakan penyelesaian terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila secara bipartit tercapai kesepakatan maka dilaksanakan mediasi secara tripartit oleh mediator.

Dalam hal tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industri melalui mediasi maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para pihak dan disaksikan oleh mediator serta di daftar di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri di wilayah hukum pihak-pihak yang diengankan perjanjian bersama untuk mendapatkan akta bukti pendaftaran. Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian industrial melalui



Fasilitasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

mediasi maka mediator akan mengeluarkan anjuran tertulis untuk penyelesaian melalui pengadilan setelah perselisihan hubungan industrial.

Sebagai langkah antisipasi untuk mencegah timbulnya perselisihan hubungan industrial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga melaksanakan kegiatan deteksi dini dan pencegahan penyelesaian hubungan industrial. Hal ini dilaksanakan sebagai wujud pembinaan terhadap perusahaan, lebih jauh lagi dapat meminimalisir timbulnya perselisihan.

5 Strategi dan program dalam rangka peningkatan kesempatan kerja, diantaranya :

a. Untuk mendukung tercapainya sasaran pelayanan publik yang optimal serta penciptaan dan perluasan kesempatan lapangan kerja dengan jumlah dan mutu yang meningkat di berbagai bidang dan sektor pembangunan ditempuh serangkaian kebijaksanaan pembangunan ketenagakerjaan, yang meliputi :

Pelayanan publik yang diberikan oleh Disnakertrans Kabupaten Garut kepada masyarakat, antara lain :

- Pembuatan kartu AK. 1
- Pembuatan rekomendasi passport TKI
- Pembuatan rekomendasi SKCK TKI
- Pembuatan rekomendasi Job Fair pihak ketiga
- Pembuatan rekomendasi ijin pendirian BKK-SMK
- Pembuatan rekomendasi perpanjangan IMTA
- Pembuatan rekomendasi bantuan alat penempatan tenaga kerja pihak ketiga
- Pengaduan keluarga TKI
- Pembuatan rekomendasi pendirian cabang PTKIS
- Rekomendasi bantuan program provinsi/pusat
- Pemberian kegiatan perluasan kesempatan kerja
- Pendaftaran/rekrut calon transmigran
- Seleksi calon transmigrasi
- Pemberangkatan calon transmigran

b. Pembangunan rumah informasi kerja, yang memfasilitasi pelayanan

langsung kepada masyarakat tahun 2015 di 10 (sepuluh) kecamatan (Cisewu, Cisompet, Bayongbong, Sukaresmi, Pasirwangi, Semarang, Tarogong Kidul, Garut Kota, Wanaraja, dan Cibatu) dan tahun 2017 di 5 (lima) Kecamatan (Bl. Limbangan, Bungbulang, Singajaya, Cihurip, dan Caringin) yang bermanfaat :

- Memberikan informasi dan jumlah, jenis kelamin, tingkat pendidikan dan bakat/minat pencari kerja.
 - Membantu pencari kerja untuk disalurkan ke perusahaan/instansi sesuai bakat dan keahlian yang dimiliki.
 - Membantu mengatasi jumlah pengangguran.
 - Memudahkan perusahaan/instansi untuk mendapatkan karyawan/tenaga kerja sesuai jenis pekerjaan, posisi dan kualifikasi yang dibutuhkan.
 - Dapat mengurangi dan/atau menghilangkan praktek jasa perantara tenaga kerja yang akan merugikan tenaga kerja.
- c. Pembinaan dan pembentukan TKM bagi perluasan kesempatan lapangan kerja, peningkatan efisiensi, dan produktivitas, antara lain melalui penciptaan iklim usaha yang sehat dan dinamis, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pelatihan produktivitas, penciptaan iklim produktivitas di

masyarakat melalui peningkatan fungsi kelembagaan produktivitas.

6 Dalam pelaksanaan peraturan tentang pengupahan sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2001 tentang Dewan Pengupahan, Bupati Garut Nomor 560/Kep.336-DDT/2017 tanggal 12 April 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Garut Nomor 560/Kep.105-DST/2016 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten Garut Masa Jabatan 2016-2018.

Dewan Pengupahan Kabupaten bertugas :

- a. Memberikan saran pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
- 1) Pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan/atau Upah Minimum Sektor Kabupaten (UMSK).
 - 2) Penerapan sistem pengupahan di tingkat kabupaten.

b. Menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan nasional.

Keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten terdiri dari unsur pemerintahan, organisasi pengusaha, serikat pekerja/serikat buruh, perguruan tinggi dan pakar. Komposisi keanggotaan Dewan Pengupahan Kabupaten dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh adalah 2:1:1

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai unsur pemerintah dalam



Dewan Pengupahan kabupaten bekerja sama dengan instansi pemerintah antara lain seperti Biro Pusat Statistik, Bagian Kesejahteraan Rakyat Serikat Sekretariat Daerah, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral berperan aktif dalam penentuan Upah Minimum Kabupaten setiap tahun. Ditambah lagi dengan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Sekertariat Dewan Pengupahan Kabupaten. Untuk penentuan Upah Minimum Kabupaten sejak tahun 2015 didasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan Pasal 44 dimana penentuan Upah Minimum Kabupaten dihitung dengan menggunakan formula perhitungan Upah Minimum.

Adapun kenaikan upah minimum kabupaten dipengaruhi oleh prosentase tingkat inflasi nasional dan prosentase PDB. Pengawasan dalam penerapan peraturan tentang pengupahan Dinas berkoordinasi dengan pegawai pengawas ketenagakerjaan dimana kewenangan secara normatif dalam hal pengupahan menjadi kewenangan pengawas ketenagakerjaan.

7 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 50 menyebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh. Selanjutnya dinyatakan perjanjian kerja dibuat atas dasar :

- a. Kesepakatan kedua pihak
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam pasal 56 perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu (PKWT) atau untuk waktu tidak tertentu (PKWTT) dimana perjanjian kerja waktu tertentu didasarkan atas jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 (dua) tahun dan hanya boleh



diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

Peran Dinas terutama dalam hal pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) dimana setiap perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja dengan PKWT wajib mencatatkan perjanjian kerja tersebut ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatangani perjanjian kerja. Hal ini tertuang dalam pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 100 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Perjanjian Waktu Tertentu.

Berkaitan dengan pembinaan mengenai dengan persyaratan kerja kepada perusahaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan kegiatan pembinaan persyaratan kerja dan saran hubungan industri. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pengusaha dan pekerjaan mengenai pentingnya dilaksanakan persyaratan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku dan pentingnya pembentukan sarana hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan.

8 Pandayagunaan tenaga kerja produktif, melalui program khusus bagi kelompok angkatan kerja tertentu seperti tenaga kerja terdidik, penganggur dan setengah penganggur; a. Peningkatan kualitas tenaga kerja

antara lain melalui pelatihan keterampilan dengan mengupayakan adanya kemitraan latihan tenaga kerja antara penyelenggara dan pengguna tenaga kerja serta pengembangan kelembagaan pelatihan ; dan

- b. Upaya mempersiapkan tenaga kerja untuk siap memasuki dunia kerja, yaitu dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan pelatihan baik di UPT BLK, di Desa-desa, di LPK-LPK, maupun pemagangan, antara lain pelatihan berbasis masyarakat siap pakai, manajemen wirausaha tahun (2015, 2016 dan 2017) dalam bidang manajemen wirausaha bagi 80 orang, Berbasis masyarakat siap pakai bagi 48 orang, dan wirausaha produktif melalui Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan terapan teknologi tepat guna bagi 148 orang, tenaga kerja terdiri kini diarahkan untuk menjadi kader-kader wirausaha sebagai tenaga kerja mandiri profesional.
- c. Untuk mengatasi pengangguran yang berpendidikan rendah dan setengah pengangguran diupayakan dengan kegiatan keluasan lapangan kerja produktif dengan sistem padat karya. Kegiatan sistem padat karya tersebut adalah padat karya infrastruktur dan

produktif di kantong-kantong kemiskinan daerah tersiolir lainnya, yaitu pada periode tahun 2015-2017 sudah terbangun pembukaan dan perkerasan serta pemadatan jalan desa sepanjang 14.400 meter di 19 lokasi (APBD), sepanjang 5.000 meter di 5 lokasi (APBD Prov) dan sepanjang 10.000 meter (APBD) di 12 lokasi serta tembok penahanan tanah di satu lokasi dan usaha produktif 75 kelompok, dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 4.121 orang.

9 Upaya lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja, dilakukan melalui kegiatan job fair dan sosialisasi tentang kompetensi dunia kerja, dimana masuki dunia kerja diharapkan memiliki kompetensi tertentu atas jabatan kerja yang disediakan oleh perusahaan. Hal ini menjadi acuan bagi perusahaan untuk mengetahui kemampuan kerja bagi pencari kerja sesuai dengan bakat dan minat yang dimilikinya.

10 Upaya pengentasan kemiskinan dan mengurangi kepadatan penduduk di Kabupaten Garut, menjadi sarana efektif mengurangi masalah sosial di masyarakat yaitu melalui transmigrasi, daerah asal hanya menjadi pengangguran maka program



itu sekaligus menyediakan lapangan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja serta pemberdayaan masyarakat miskin. Dengan mengikuti program transmigrasi, peserta catrans mendapat jaminan hidup satu tahun, rumah tipe 36, tanah garapan seluas dua hektar untuk dikelola dan berjuang agar lahan yang didapatkannya bisa menghasilkan.

KESIMPULAN

Dalam rangka mengatasi pengangguran dan setengah peanggungan, masyarakat miskin, korban PHK dan TKI Purna tersebut, diperlukan upaya yang menyeluruh dan terpadu di semua sektor, berorientasi pada menyediakan lapangan pekerjaan dan penciptaan lapangan kerja yang produktif secara berkelanjutan, selama

tahun 2015 dengan Juli 2017, untuk :

1. Pengusaha Ekonomi Kerakyatan

Diupayakan kegiatan penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha melalui penempatan/magang di berbagai perusahaan, di unit-unit kelompok wirausaha ekonomi produktif, dan pembentukan wirausaha baru, baik secara individu maupun kelompok, sesuai dengan latar belakang dan keahliannya sebanyak 13.306 orang (rinciannya lihat Tabel 1).

TABEL 1

NO.	URAIAN	2015	2016	JULI 2017	JUMLAH
a.	Kewirausahaan -APBD -Prov -APBN	96 org/6 Klp 60 org/3 Klp 80 org/4 Klp	- - 14 Org/7 Klp	52 Org/3 Klp - 240 Org/12 Klp	42 Kelpk (542 org)
b.	Pencari Kerja Siap pakai	32 org/2 Klp	64 Org/4 Klp	32 Org/2 klp	8 Kelpk (128)
c.	Penpt. Transmigrasi: -Kab. Bengkulu Utara -Kab. Buton Utara -Kab. Banyuasin -Kab. kapuas	5 KK/16 Jiwa 5 KK/21 Jiwa 10 KK/40 Jiwa	- - 10 KK/39 Jiwa 5 KK/20 Jiwa	- - - -	35 KK (136 Jiwa)
d.	Pelat. Siap Pakai BLK	1.200 Org	2.600 Org	198 Org	3.980 Org
e.	Penpt. Pencari Kerja : -Dalam Negeri -Luar Negeri	1.516 Org 205 Org	2.550 Org 113 Org	1.525 Org 180 Org	6.189 Org 5.591 Org 598 Org
f.	Penyerap. Tenaga Kerja	1.092 Org	619 Org	754 Org	4.121 Org
JUMLAH		4.358 Org	6.019 Org	2.929 Org	13.306 Org

TABEL 2

NO	URAIAN	2015	2016	2017 s.d Juli	JUMLAH
a.	Pembukaan dan perkerasan Jalan Desa:				
a.	APBD				
	- Plurisasi	63 Org/1.000 M	-	-	63 Org/1.000 M
	- Normalisasi	504 Org/8.000 M	-	-	504 Org/8.000 M
	- Perkerasan Jln	129 Org/5.800 M	189 Org/4000 M	252 Org/4.000 M	570 Org/5.5000M
b.	Prov				
	- Perkerasan Jln	-	100 Org/2000 M	150 Org/ 3.000 M	250 Org/5.000 M
c.	APBN				
	- PKI	264 Org/3.000 M	246 Org/3000 M	352 Org/ 3.200 M	880 Org/9200 M
	- PKP	132 Org/700 M	66 Org/300 M	-	198 Org/1000 M
		20 Org/1 Klpk	20 Org/ 1 klpk	-	40 Org/2 Kelpk.
	JUMLAH	1.092 Org/18.500 M	619 Org/8.300 M	754 Org/10.200 M	2465 Org/37.000 M

2. Pemantapan Infrastruktur Wilayah

Untuk mengatasi pengangguran yang berpendidikan rendah dan setengah pengangguran serta pembangunan infrastruktur pedesaan diupayakan kegiatan perluasan lapangan kerja produktif dengan sistem padat karya, kegiatan sistem padat karya tersebut adalah padat pekerja di kantong-kantong kemiskinan, padat karya pedesaan dan padat karya produktif serta pengembangan jalan desa (pembukaan, perkerasan dan pemadatan) sepanjang 37.000 meter (36 Desa) (rinciannya lihat Tabel 2).

Dialokasikan di daerah-daerah yang terkena bencana kekeringan, kebakaran hutan, daerah rawan daya beli daerah terisolir lainnya.

3. Optimalisasi Pelayanan Publik

Upaya lain dalam optimalisasi memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari kerja dan perusahaan, dilakukan melalui kegiatan berbagai jenis pelayanan yang ditetapkan Disnaker, Job Fair, sosialisasi angkatan kerja dan edukasi pencari kerja tentang kompetensi dunia kerja serta advokasi TKI bermasalah.



Pencari Kerja Berdasarkan Pendidikan

NO	URAIAN	2015			2016			JULI 2017		
		L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH	L	P	JUMLAH
1	Tidak Tamat SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SD	348	507	855	521	609	1.130	51	63	114
3	SMTp	921	1.174	2.093	1.039	1.418	2.457	2.011	1.508	3.519
4	SMTA	9.311	5.990	15.301	4.311	4.340	8.651	4.321	4.469	8.790
5	D I DAN D II	40	66	106	458	663	1.121	2	21	23
6	D III	743	719	1.462	1.923	1.820	3.743	1.231	926	2.157
7	Perguruan Tinggi/Universitas	824	601	1.425	3.115	2.311	5.426	421	614	1.035
	JUMLAH	12.187	9.055	21.242	11.367	11.161	22.528	8.037	7.601	15.638

RAGAM KEGIATAN DISNAKERTRANS



Kelompok wirausaha tenaga kerja mandiri kuliner aneka keripik.



Sosialisasi rumah informasi kerja.



Kelompok wirausaha tenaga kerja mandiri budidaya jamur.

Kegiatan infrastruktur padat karya produktif.



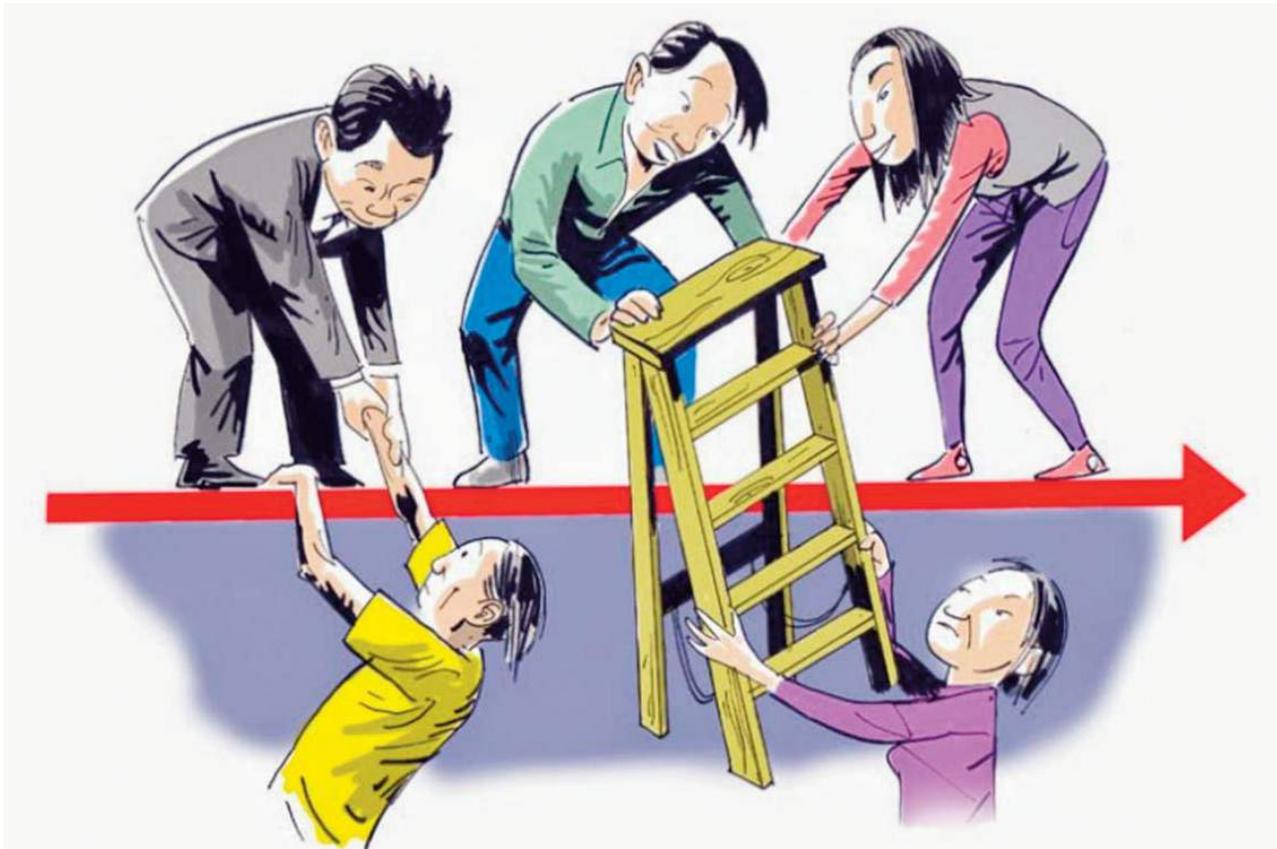
Jumlah Perusahaan yang Terdaftar Menurut Sektor Usaha Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan Sampai dengan Bulan Juli 2017

NO	URAIAN	2015	2016	2017
1	Pertanian Kehutanan, Perkebunan Dan Perikanan	12	13	14
2	Pertambangan dan Penggalian	3	5	5
3	Industri Pengolaan	115	137	138
4	Listrik Gas Dan Air Minum	10	5	5
5	Bangunan	18	17	17
6	Perdagangan, Rumah makan dan Hotel	261	306	306
7	Angkutan, Perundangan dan Komunikasi	9	10	11
8	Keuangan, Asuransi dan Usaha	110	157	137
9	Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan/Finance	54	77	78
10	Jasa Kemasyarakatan/Public service	-	-	-
11	Lain-lain	-	-	-

Bupati Garut H. Rudy Gunawan dan Wakil Bupati dr. H. Helmi Budiman saat melepas peserta Jalan Sehat Bertajuk "Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat" di Kecamatan Pameungpeuk, Minggu (17/09/2017).



Pengentasan Kemiskinan, Masalah Sosial yang Perlu Upaya Keras



Dimulai dari awal Orde Baru, pemerintah telah melakukan berbagai upaya penanggulangan kemiskinan, baik melalui pendekatan sektoral, regional, kelembagaan, maupun strategi dan kebijakan khusus. Program-program tersebut meliputi Program Inpres Desa Tertinggal, Kredit Usaha Tani, UPPKS dan Gerdu Taskin, serta Program Kredit-kredit Mikro dari BRI. Sementara di pemerintahan yang sedang berjalan juga menghadapi hal yang sama yaitu strategi atau cara penanggulangan kemiskinan.

Perdebatan mengenai angka kemiskinan yang masih besar dan konsep penanggulangannya sekarang ini tidak diperlukan lagi. Karena hal tersebut justru akan menghabiskan waktu dan energi. Rakyat miskin kita tidak membutuhkan perdebatan retorika yang berkepanjangan. Mereka butuh suatu konsensus kebijakan kemudian diimplementasikan.

Maka dari itu hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi

pemerintahan yang sedang berjalan. Rakyat mengharapkan suatu penajaman konsep program. Penajaman program bisa juga dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap program dengan memperhatikan kelemahan-kelemahan yaitu kesulitan yang dihadapi dan kelebihan dari program penanggulangan kemiskinan tersebut.

Tetapi pada intinya penanganan berbagai masalah di atas memerlukan strategi penanggulangan kemiskinan.

Kita banyak melihat bahwa selama ini pemerintahan menyelesaikan dan mengadaptasikan rancangan strategi penanggulangan kemiskinan yang telah berjalan. Kemudian hal ini dapat dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan.

Di Kabupaten Garut, jumlah rumah tangga sasaran (RTS) penerima program perlindungan sosial meningkat 13.178 kepala keluarga karena faktor gejolak harga kebutuhan pokok. Sebagian besar rumah tangga yang terkena dampak gejolak kebutuhan pokok tersebut adalah petani.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut tahun 2016 merilis, jumlah RTS meningkat 13.178 kepala keluarga menjadi 315.506 kepala keluarga berdasarkan basis data terpadu 2015. Data itu didapat Bappeda Kabupaten Garut dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan pekan lalu.

Sebelumnya, menurut Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, jumlah RTS di Kabupaten Garut sebanyak 302.338 kepala keluarga. Dari jumlah RTS 2015 sebanyak 315.506, kelompok rumah tangga sangat miskin bertambah 15.714, rumah tangga miskin bertambah 27.995, dan rumah tangga hampir miskin bertambah 24.441. Sementara jumlah rumah tangga rentan miskin berkurang 54.972.

Berkurangnya jumlah rumah tangga rentan miskin karena keluarga tersebut kini menjadi golongan rumah tangga miskin. Penyebabnya karena kenaikan harga bahan pokok dan bahan bakar minyak. Sebagian besar rumah tangga yang statusnya berubah dari rentan miskin menjadi miskin adalah petani. Adapun, 3 kecamatan dengan presentase keluarga sangat miskin tertinggi adalah Banjarwangi (51,19%), Singajaya (43,87%), dan Sukaresmi (43,30%).

Wakil Bupati Garut Helmi Budiman mengakui masih tingginya angka

kemiskinan di wilayahnya. Bahkan angka kemiskinan Kabupaten Garut masih berada di atas angka kemiskinan tingkat Provinsi Jawa Barat dan nasional. Ia menyebut angka kemiskinan berada di kisaran 12,86 persen.

"Jawa Barat dan nasional sudah di bawah sepuluh persen. Sedangkan kami masih diangka 12,86 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Garut. Ya disekitar 300 ribuan," katanya.

Sebagai upaya mengatasi tingginya kemiskinan di Kabupaten Garut, sambungnya, dibutuhkan sinergitas berbagai pihak. Salah satunya dengan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Garut. Sebab zakat selain kewajiban bagi umat muslim, juga merupakan salah satu instrumen pengentasan kemiskinan. Bahkan terdapat aturan soal zakat di UU No 39 Tahun 1999, yang kemudian disempurnakan kembali melalui UU. No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Sehingga diharapkan lembaga amil zakat dapat bekerja profesional dalam membantu pengentasan kemiskinan.

"Peran zakat sangat strategis dan berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan daerah apabila diatur dan dikelola dengan baik dan profesionalisme oleh pengurus Baznas itu



sendiri. Serta didukung melalui regulasi dan perangkat yang terus menerus diberikan oleh pemerintah daerah," ujarnya.

Meski demikian, hingga kini yang masih menjadi permasalahan adalah data kemiskinan. Beberapa waktu lalu,

salah satu kesimpulan peserta workshop yang diinisiasi Bappeda Kabupaten Garut bertajuk Analisa Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Garut, di Ruang Rapat Bappeda Kab. Garut (27/7), forum mendorong Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Perbup berkaitan dengan indikator kemiskinan berdasarkan update data BDT (Basis Data Terpadu) 2015.

Arvian Tiantoro Koordinator P3BM Bappenas Prov. Jawa Barat, menyoroti Kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Ia menekankan TKPKD harus mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan sampai RKA dan DPA yang tepat sasaran. "RKA dan DPA cenderung sistem Rambo; banyak peluru namun tidak tepat sasaran. Mestinya harus diganti RKA sistem Sniper dengan sasaran tembak yang tepat berdasarkan data," selorohnya.

Terlepas dari itu, masalah kemiskinan menjadi masalah utama dan penting karena kemiskinan menyangkut kesenjangan dan pengangguran. Sebagian besar penduduk miskin di Asia Tenggara tinggal di Indonesia. Penanggulangan kemiskinan ditempatkan secara utuh dalam rangka penyelenggaraan pembangunan nasional. Program penanggulangan kemiskinan harus bertumpu pada peran serta aktif dan produktivitas rakyat diupayakan untuk menumbuhkan kemandirian penduduk miskin.

Pemerintah Indonesia dan berbagai pihak terkait lainnya patut mendapat acungan jempol atas berbagai usaha yang telah dijalankan dalam membentuk strategi penanggulangan kemiskinan. Segala program penanggulangan kemiskinan yang telah dan akan dilakukan pemerintah sudah sepatutnya kita dukung bersama. (*)



KETAHANAN PANGAN DI KABUPATEN GARUT TAHUN 2017

I. ASPEK KETERSEDIAAN PANGAN

Kecenderungan produksi beberapa komoditas pangan cukup stabil karena tidak ada peningkatan yang cukup ekstrim. Kecuali komoditas kedelai mengalami penurunan produksi.

Hasil rasio ketersediaan terhadap kebutuhan konsumsi pangan menunjukkan bahwa beberapa pangan strategis sumber energi karbohidrat

surplus seperti beras sebesar 191.417,3 ton, jagung 324.617,4 ton, ubi jalar 30.544,2 ton, ubi kayu 221.193,9 ton, kentang 36.726,5 ton, juga pangan sumber protein nabati seperti kacang tanah, sayuran dan buah-buahan, kecuali kacang hijau - 182,2 ton dan kedelai minus 1.573,3 ton per bulan.

PERKEMBANGAN PRODUKSI PANGAN PADI DAN PALAWIJA KABUPATEN GARUT TAHUN 2012-2016

No.	Komoditi	Produk (ton)					Jumlah	Pertumbuhan (%)
		2012	2013	2014	2015	2016		
1	Padi sawah	879.797	941.933	909.230	843.543	898.264	4.466.766	
2	Pagi gogo	113.750	128.606	130.691	131.488	121.040	625.575	
	Total	933.547	1.070.539	1.033.921	975.031	1.019.304	5.092.342	0,8
1	Jagung	488.433	599.741	576.876	512.967	640.393	2.769.409	0,5
2	Kedelai	21.462	21.441	25.938	22.248	13.424	104.513	-8,3
3	Kacang Tanah	28.823	32.122	32.225	29.073	30.146	152.388	1,4
4	Kacang Hijau	1.130	2.136	2.055	1.091	1.681	8.692	6,7
5	Ubi kayu	483.542	595.276	638.965	612.571	499.259	2.829.616	1,9
6	Ubi jalar	71.544	100.750	89.110	88.224	88.170	437.799	7
	Total	1.095.534	1.311.469	1.356.169	1.266.172	1.273.073	6.302.418	
1	Sayuran	100.61	130.58	87.25	104.91	111.85	535.20	4,9
2	Buah-buahan	81.69	104.42	84.77	112.36	82.41	465.65	3,72

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Garut

RATIO KETERSEDIAAN KEBUTUHAN KONSUMSI PANGAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2017 (s.d bulan Juni)

No.	JENIS PANGAN	KETERSEDIAAN		KEBUTUHAN PENDUDUK per tahun (ton)	RASIO	KELEBIHAN (KEKURANGAN) (ton)
		PRODUKSI (TON)	KETERSEDIAAN (TON)			
1	Padi beras	522.837,0	308.161,8	116.744,5	2,64	191.417,3
2	Jagung	371.115,0	326.952,3	2.334,9	140,03	324.617,4
3	Ubi Jalar	42.227,0	37.159,8	6.615,5	5,62	30.544,2
4	Ubi kayu	266.443,0	255.438,9	34.245,0	7,46	221.193,9
5	Kentang	43.575,0	41.396,3	4.669,8	8,86	36.726,5
6	Kacang tanah	18.517,0	10.554,7	1.556,6	6,78	8.998,1
7	Kacang Hijau	641,0	596,1	778,3	0,77	(182,2)
8	Kedelai	6.944,0	6.596,8	8.172,1	0,81	(1.575,3)
9	Sayur-sayuran	902.745,0	812.470,5	156.550,8	5,09	52.919,7
10	Buah-buahan	433.543,0	390.188,7	38.136,5	10,23	352.052,2
11	Ikan	27.824,6	23.650,9	35.412,5	0,67	(11.761,6)
12	Daging unggas	13.416,8	12.746,0	7.393,8	1,72	5.352,2
13	Daging Ruminasi	2.380,0	2.261,0	3.891,5	0,58	(1.630,4)
14	Telur	5.127,4	4.958,2	11.674,4	0,42	(6.716,2)
15	Susu	28.272,8	23.834,0	31.521,0	0,76	(7.687,0)

Jumlah penduduk Kab. Garut thn 2016: 2.569.505 jiwa (BPS Garut). Data diolah DKP Kab. Garut

II. ASPEK DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

Khusus pangan pokok strategis (beras) hingga bulan Juni 2017, dari beberapa pengusaha huller dan gapoktan, pengusaha beras/petugas/aparat pengelola distribusi pangan, diperoleh data arus keluar masuk beras dan padi, sebagai berikut:

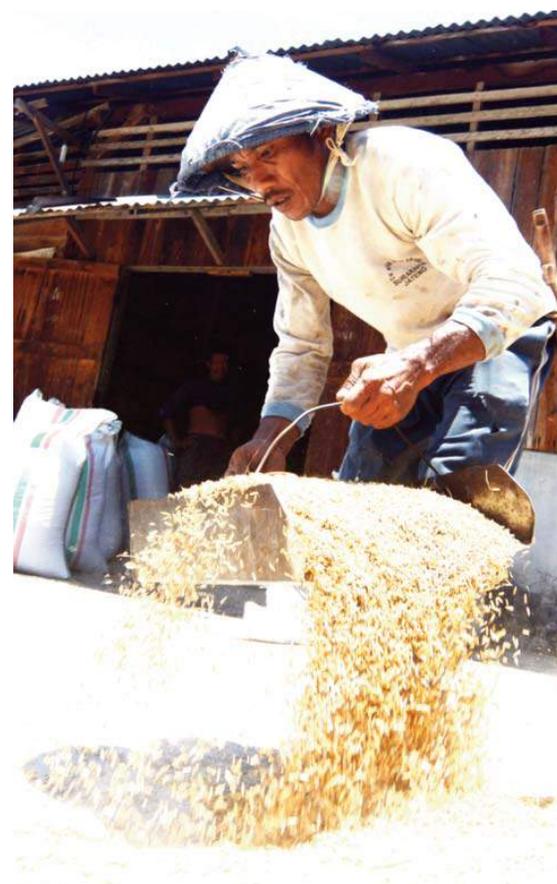
ton. Sisa ini terdapat di cadangan pangan masyarakat. Ketersediaan pangan beras akan mengalami perubahan secara situasional tergantung keluar masuk beras ke dan dari Kabupaten Garut, disamping adanya konsistensi dan stabilitas produksi.

Kelebihan produksi dapat digunakan untuk cadangan pangan, ekspor

No.	KOMODITAS	DISTRIBUSI		KETERANGAN
		MASUK	KELUAR	
1	Padi/gabah	4.792,46	-	
	Konversi ke beras	2.579,63		
2	Beras	1.913,80	4.850,56	(-) 357,13
	Total	4.493,43	4.850,56	
		Tasikmalaya, Ciamis, Subang, Karawang, Sumedang, Majalengka, Cianjur, Banjar, Cilacap, Indramayu, Kebumen	Jakarta, Kota Bandung, Kab. Bandung, Karawang, Sumedang, Tasikmalaya	

Ketersediaan beras yang ada di Kabupaten Garut terdapat kelebihan sebesar 191.417,3-357,13=191.060

ataupun bisnis pangan. Kelancaran arus distribusi pangan dan stabilisasi pasokan berpengaruh terhadap



aksesibilitas masyarakat terhadap pangan dan harga pangan.

TABEL PERKEMBANGAN HARGA PANGAN

Tahun 2017 (Juni)	Beras Medium	Jagung pipilan	Kedelai	Daging sapi	Daging ayam	Telur Ayam Ras	Minyak Goreng	Gula Pasir	Cabe rawit merah	Bawang Merah
Rata-rata	9,937	5,188	8,854	110,417	29,625	20,396	12,625	13,196	74,750	24,292
Standar Deviasi	603	528	1,478	4,403	2,281	4,061	1,086	1,137	37,713	6,696
SD Rata-rata $2 \times 100\%$	6,42	10,7	3,99	3,99	7,70	19,69	8,60	8,62	50,45	25,51
Stabilitas harga	<5%	10%	<10%	<10%	<25%	<10%	<10%	<10%	<25%	25%

III. PERKEMBANGAN HARGA PANGAN

Perkembangan harga pangan secara umum pada beberapa komoditi pangan strategis selama tahun 2017 tidak terlalu ekstrim masih dalam batas toleransi kewajaran kecuali pada komoditas cabe rawit merah, yang terjadi pada bulan Februari 2017 mengalami kenaikan hampir 50% melebihi batas kenaikan harga stabil maksimal 25%.

Stabilitas harga pangan sangat dipengaruhi beberapa aspek antara

lain kemampuan memproduksi bahan pangan, kelancaran arus distribusi pangan dan pengaturan impor pangan



serta daya beli masyarakat.

IV. ASPEK PEMANFAATAN PANGAN

Tingkat kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Garut terus membaik dari tahun ke tahun walaupun masih berada di bawah PPH

yang ideal (masih dibawah 100%).

Pola konsumsi masyarakat belum menunjukkan keanekaragaman dan seimbang, masih didominasi

dengan mengkonsumsi kelompok padi-padian sebesar 138% sebagai penyumbang terbesar pemenuhan energi. Ketergantungan masyarakat terhadap beras

sangat tinggi tetapi konsumsi terhadap sayur dan buah meningkat mencapai

86% pemenuhan protein nabati melalui konsumsi buah/biji berminyak mencapai 70%, akan tetapi konsumsi pangan hewani baru mencapai 20,9%.

V. ASPEK KEAMANAN PANGAN

Kabupaten Garut merupakan daerah penghasil pangan segar yang potensi karenanya untuk meningkatkan produk dan kualitasnya maka keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu dan tidak bertentangan dengan keyakinan dan budaya masyarakat. Keamanan pangan juga dimaksudkan untuk mencegah pencemaran biologis dan kimia yang dapat membahayakan kesehatan manusia.

Sertifikat Prima adalah proses pemberian sertifikat sistem budidaya produk yang dihasilkan setelah melalui pemerintah, pengujian, dan pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk mendapatkan label

POLA KONSUMSI PANGAN KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2016

No.	Kelompok Pangan	Sekor PPH			Skor PPH Maksimal	Persentase PPH 2016
		2014	2015	2016		
1	Padi-padian	25	25	34,65	25	138,6
2	Ubi-ubian	0,9	1,2	0,29	2,5	11,6
3	Pangan hewani	10,7	13,5	5,02	24	20,9
4	Minyak dan lemak	5	5	2,46	5	49,2
5	Buah/biji berminyak	4,3	4,9	1,7	1	70,0
6	Kacang-kacangan	0,1	0,3	0,1	10	1,0
7	Gula	0,7	1,5	0,15	2,5	6,0
8	Sayur dan buah	15,4	15,3	26	30	86,6
9	Lain-lain	-	-	-	-	-
	Jumlah	62,1	66,7	69,37	100	



SERTIFIKAT PRIMA KABUPATEN GARUT TAHUN 2017

SERTIFIKAT	Jumlah s.d 2017			Komoditi
	Berlaku	Kadaluarsa	Jumlah	
Prima 1	-	-	-	
Prima 2	1	-	1	Cabe Merah
Prima 3	18	10	28	Stroberi Jeruk, Cabe Rawit, Cabe Keriting, Tomat, Jagung Manis, Paprika, Kentang
Jumlah	19	10	29	

prima. Tujuan dari pelaksanaan sertifikasi prima tersebut adalah memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan, mempermudah penelusuran kembali dari kemungkinan penyimpangan mutu dan keamanan produk, dan meningkatkan nilai tambahan dan daya saing produk pangan segar asal tumbuhan (PSAT).

Jumlah kebun yang sudah menerapkan budidaya GAP (Good Agriculture Practice) di Kabupaten Garut sebanyak 209 kebun dan yang sudah bersertifikat baru 25 kebun, sehingga masih banyak kebun yang belum memperoleh sertifikasi prima.

VI. ISU STRATEGIS

1. Lemahnya akses pangan masyarakat
2. Rendahnya kualitas konsumsi pangan masyarakat
3. Lemahnya koordinasi lintas sektor
4. Tingginya prosentase penduduk rawan pangan
5. Fluktuasi harga
6. Tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pangan pokok beras
7. Ketersediaan pangan masih tergantung pada pangan impor/luar daerah
8. Masih ditemukan kasus ketidakamanan pangan
9. Merupakan wilayah rawan bencana alam

VII. TIDAK LANJUT

Untuk mengatasi persoalan ketahanan pangan dan optimalisasi peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Garut, maka perlu dibentuk kelompok kerja Dewan Ketahanan Pangan yang terdiri dari

bidang teknis, bidang ahli dan bidang pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian RI selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 689/Kpts/OT.050/10/2016 tanggal 18 Oktober 2016 Tentang

Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan. Dalam personalnya dibantu oleh Tim Koordinasi sesuai dengan tugas dan fungsinya terutama dalam pengendalian stabilitas pasokan dan harga pangan serta keamanan pangan masyarakat. (*)



Masalah Sosial sebagai Inspirasi Perubahan (Kasus Kemiskinan) dan Upaya Pemecahannya

Perubahan sosial adalah sebagai kondisi yang tidak diharapkan, namun dapat mendorong tindakan untuk melakukan perubahan ke arah kondisi yang lebih sesuai harapan. Memang, perubahan kehidupan bermasyarakat yang sering disebut sebagai perubahan sosial merupakan proses yang seolah-olah tanpa akhir.

Apapun yang dilakukan sekarang tidak dapat dilepaskan dengan apa yang telah dilakukan sebelumnya bahkan juga dalam kaitannya dengan pertimbangan tentang prospek di masa mendatang.

Lebih dari itu, perubahan sosial merupakan proses yang berkesinambungan, melihat kenyataan tersebut, dapat di mengerti apabila orang merasa sulit untuk menentukan kapan proses itu berawal dan kapan pula berakhir. Walaupun demikian, apabila proses perubahan tersebut dimaksudkan sebagai penanganan masalah sosial, maka dapat dilihat berbagai kemungkinan posisi masalah sosial dalam proses tersebut.

Masalah sosial merupakan kondisi yang tidak diinginkan karena mengandung unsur-unsur yang dianggap merugikan baik dari segi fisik maupun nonfisik bagi kehidupan bermasyarakat. Lebih dari itu, masalah sosial sering juga mengandung unsur yang dianggap merupakan pelanggaran dan penyimpangan terhadap nilai, norma dan standar sosial tertentu.

Masalah sosial merupakan kondisi yang perlu diubah dan diperbaiki, dengan demikian penanganan masalah merupakan suatu usaha atau suatu proses untuk melakukan perubahan ke arah perbaikan.

Sebagaimana diketahui, kehidupan yang menjadi dambaan masyarakat adalah kondisi yang sejahtera. Dengan

demikian, kondisi yang menunjukkan adanya taraf hidup yang rendah merupakan sasaran utama usaha perbaikan dalam rangka perwujudan kondisi yang sejahtera kondisi kemiskinan di berbagai dimensi dan implikasinya, merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang menggam-barkan kondisi kesejahteraan yang rendah. Oleh sebab itu maka wajar kalau kemiskinan menjadi inspirasi bagi tindakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas perubahan dan di dalam masyarakat yang mengalami masalah sosial tersebut perlu dipahami berbagai

kemiskinan telah distudi oleh berbagai ilmuwan sosial yang berasal dari latar belakang disiplin yang berbeda.

Oleh sebab itu, wajar pula apabila kemudian dijumpai berbagai konsep dan cara pengukuran masalah kemiskinan ini. Dalam konsep ekonomi misalnya, studi masalah kemiskinan akan segera terkait dengan konsep standar hidup, pendapatan dan distribusi pendapatan.

Hal yang sama juga dijumpai dalam usaha untuk melakukan pengukuran tingkat kemiskinan. Konsep taraf hidup (*level of living*) misalnya, tidak cukup dilihat dari sudut pendapatan, akan tetapi perlu dilihat dari sudut pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain. Kenyataan tersebut mengakibatkan pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan juga bervariasi.

Sementara itu, pihak-pihak lain justru lebih menampilkan aspek non ekonomi, sebagai indikator yang dominan. Pandangan ini menghendaki agar indikator pembangunan lebih melihat perbaikan kehidupan yang dilihat dari

aspek manusianya (*improvement of human life*). Dengan demikian, pembangunan seharusnya diperuntukkan bagi semua pihak dan semua lapisan masyarakat, serta paling tidak mengandung tujuan :

- (1) Memperbaiki hal-hal yang berkaitan dengan penopang hidup warga



hal yang berkaitan dengan seluk beluk permasalahannya.

Intensitas dan Kompleksitas Masalah

Memahami masalah kemiskinan sering kali memang menuntut adanya upaya untuk melakukan pendefinisian dan pengukuran. Sehubungan dengan hal ini, perlu disadari bahwa masalah

masyarakat.

- (2) Memperbaiki kondisi kehidupan yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan harga diri.
- (3) Adanya kebebasan, termasuk di dalamnya kebebasan dari penindasan, dari katidakacuhan serta dari kesengsaraan dan kemelantaran.

Adanya berbagai variasi pendekatan dalam pengukuran tersebut sekaligus juga menunjukkan bahwa kemiskinan dapat dilihat secara absolut dan secara relatif. Secara absolut maksudnya tingkat kemiskinan diukur dengan standar tertentu, sehingga kemudian dapat dikatakan bahwa mereka yang taraf hidupnya dibawah standar yang dikatakan miskin, sebaliknya mereka yang berada diatas standar dikatakan tidak miskin. Dengan cara seperti ini dapat dilakukan pengukuran yang lebih mudah dan sederhana, termasuk penggunaannya sebagai suatu indikator untuk melihat keberhasilan suatu proses pembangunan dalam rangka upaya pengentasan kemiskinan.

Oleh sebab itulah disamping adanya kemiskinan yang absolut, dikenal juga pengertian kemiskinan relatif. Konsep ini bertambah relevan digunakan dalam masyarakat yang sudah semakin terbuka dan semakin berkembang. Dalam masyarakat hal tersebut melalui berbagai media komunikasi, pola konsumsi dan gaya hidup serta perilaku lapisan masyarakat tertentu menjadi lebih transparan di lapisan masyarakat lainnya.

Melalui konsep kemiskinan relatif ini, kemiskinan tidak semata-mata diukur dengan menggunakan standar yang baku, melainkan juga dilihat dari seberapa jauh peningkatan taraf hidup lapisan terbawah dibandingkan dengan lapisan masyarakat yang lain, juga dibandingkan dengan kenaikan tuntutan kebutuhan hidup yang berkembang sejalan dengan perkembangan kehidupan bermasyarakat.

Lebih lanjut lagi, agar dapat memahami masalah kemiskinan secara lebih mendalam, maka tidak dapat berhenti sampai pendefinisian dan pengukuran kemiskinan, akan tetapi perlu pula melihat intensitas dan karakteristik masalahnya, serta sampai seberapa jauh masalah tersebut membawa pengaruh pada berbagai segmen kehidupan

masyarakat. Pada umumnya orang berpendapat, bahwa kondisi kemiskinan tersebut telah berpengaruh negatif terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga tidak jarang menciptakan suatu kondisi yang biasanya disebut lingkaran yang tak berujung pangkal, dan kondisi inilah yang membuat masyarakat sulit untuk keluar dari masalah kemiskinan.

Berbagai bentuk lingkaran dan mata rantainya dapat direkonstruksi dari proses kemiskinan. dari sudut ekonomi misalnya, dapat dikatakan bahwa karena kondisi kemiskinan, pendapatan hanya cukup bahkan tidak jarang kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan minimal. Dengan demikian sulit diharapkan adanya kemampuan menabung. Tidak adanya tabungan mengakibatkan tidak adanya investasi sehingga produktivitas tetap rendah. rendahnya produktivitas menyebabkan rendahnya pendapatan dan tetap bertahannya kondisi kemiskinan.

Dari sisi lain, lingkaran kemiskinan dapat terbentuk dari rendahnya gizi dan nutrisi. Dalam hal ini, kondisi kemiskinan dapat membentuk mata rantai: rendahnya nilai gizi dan nutrisi dalam konsumsi pangan, derajat kesehatan rendah, produktivitas kerja rendah, pendapatan rendah, kemiskinan.

Pemahaman dan penanganan masalah kemiskinan tidak bisa tidak perlu melibatkan banyak aspek terutama ekonomis, sosiologis, psikologis, politis. Aspek ekonomis antara lain menyangkut terbatasnya pemilikan faktor produksi, rendahnya tingkat upah, posisi tawar yang lemah dalam menentukan harga, rentan terhadap kebutuhan mendesak karena tidak punya tabungan, kemampuan yang lemah dalam mengantisipasi peluang ekonomi.

Aspek psikologis berkaitan dengan perasaan rendah diri, sikap fatalisme dan merasa terisolasi. Aspek sosiologis terutama rendahnya akses pelayanan sosial, terbatasnya jaringan interaksi sosial dan terbatasnya penguasaan informasi. Aspek politis berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, perlakuan diskriminatif, lemahnya posisi dan melakukan bargaining untuk menuntut hak dan kurangnya keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam masyarakat kota yang lebih bersifat individualistik dengan hasrat berprestasi yang lebih tinggi, dimana faktor kerja dan memperoleh uang merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat, menjadi miskin dan kehilangan pekerjaan akan mempunyai dampak sosiologis dan psikologis yang lebih berat. Walaupun demikian, perlu pula diingat bahwa reaksi kelompok miskin terhadap kondisi yang dihadapinya tidaklah selamanya menjurus pada apatisme dan berserah diri.

Untuk memahami masalah kemiskinan lebih lanjut akan lebih mudah diidentifikasi sifat, keluasan dan kedalaman masalahnya. Penyebab kemiskinan di jumpai adanya dua jawaban yang berbeda.

Yang pertama menyatakan bahwa kemiskinan adalah kondisi yang disebabkan karena beberapa kekurangan dan kecacatan individual baik dalam bentuk kelemahan biologis, psikologis maupun kultural yang menghalangi seseorang memperoleh kemajuan dalam kehidupannya.

Jawaban kedua menunjukkan faktor struktural sebagai penyebabnya. Seorang menjadi miskin karena lingkungan masyarakat yang mempunyai karakteristik antara lain : distribusi penguasaan resources yang timpang, gagal dalam mewujudkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, institusi sosial yang melahirkan berbagai bentuk diskriminasi, perkembangan industri dan teknologi yang kurang membuka kesempatan kerja.

Kedua jawaban tersebut berbeda karena pendekatan yang digunakan berbeda. Yang pertama mencari sumber masalah pada level individu (*individual/person blame approach*) dan yang kedua mencari sumber masalah pada *level sistem atau struktur (system blame approach)*.

Bagi Kabupaten Garut, masalah ketimpangan distribusi pendapatan pada umumnya dijumpai pada tahap-tahap awal proses pembangunan Kabupaten Garut. Hal itu disebabkan karena pada tahap tersebut perhatian lebih difokuskan pada usaha mengejar pertumbuhan ekonomi yang pesat melalui peningkatan GNP.

Bahwa ketimpangan distribusi pendapatan merupakan realita yang harus di

toleransi sebagai harga yang perlu dibayar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pendapat tersebut dapat digunakan untuk menjelaskan adanya realita yang cukup banyaknya penduduk yang tetap hidup dalam kondisi kemiskinan di tengah laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di Kabupaten Garut.

Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan tidak selalu identik dengan lenyapnya kemiskinan. Salah satu penyebabnya adalah mekanisme tetesan ke bawah (*trick down effect*) yang semula diyakini oleh beberapa pihak sebagai salah satu strategi yang tepat untuk memerangi kemiskinan ternyata tidak selalu dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Disamping itu, proses kehidupan ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar, pada kenyataannya selalu kurang menguntungkan lapisan sosial ekonomi rendah.

Penanganan Masalah Sosial Berbasis Masyarakat Kabupaten Garut:

1. Mengembangkan Sistem Sosial yang Responsif

Masyarakat dapat melakukan upaya perbaikan, penyembuhan dan penanganan masalah sosial secara mandiri melalui bekerjanya mekanisme dalam sistem sosialnya. Dalam hal ini sistem sosial dapat dianggap sebagai produk dari proses yang terjadi dalam sistem sosial yang melibatkan berbagai komponennya. Dengan perbaikan mekanisme dan sistem sosialnya akan menghasilkan output yang lebih sesuai harapan dan bukan lagi kondisi masalah sosial.

Pemahaman dan identifikasi tentang kondisi masalah sosial yang terjadi akan menjadi umpan balik yang merupakan referensi untuk menentukan dimensi dan komponen apa yang harus diperbaiki. Dalam masyarakat yang masalah sosialnya sudah mengalami struktur dan institusi sosialnya.

Apabila dalam kehidupan masyarakat ditemukan suatu kondisi dimana banyak nilai dan norma dilanggar sehingga keberaturan dan integrasi sosial terganggu, maka sistem yang baik akan melihatnya sebagai kegagalan mekanisme sosialisasi nilai dan kontrol sosialnya. Hal ini kemudian akan diserap dan dijadikan umpan balik untuk memperbaiki mekanisme yang ada secara melekat.



2. Pemanfaatan Modal Sosial

Kewenangan masyarakat untuk melakukan upaya penanganan masalah sosial tidak akan efektif apabila masyarakat tidak mempunyai kapasitas guna melakukannya. Dari pengamatan tersebut, kehidupan dalam keseharian ternyata masyarakat telah banyak melakukan upaya penanganan sosial ini. Berbagai pola penanganan mereka peroleh melalui proses belajar sosial yang berlangsung dalam dinamika interaksi dan relasi sosialnya. Pada umumnya masyarakat mampu melakukan hal-hal seperti itu karena dalam masyarakat sendiri tersimpan modal fisik dan finansial dapat digunakan sebagai energi penggerak tindakan bersama termasuk dalam menangani masalah sosial.

3. Pemanfaatan Institusi Sosial

a. Organisasi Masyarakat

Secara garis besar organisasi yang melakukan usaha kesejahteraan sosial yang berasal dari masyarakat ini dapat dibedakan menjadi tiga: institusi masyarakat lokal, organisasi yang bergerak atas dasar motivasi filantropi dan lembaga swadaya masyarakat. ketiganya merupakan organisasi sosial nonpemerintahan karena tumbuh dari dalam dan atas prakarsa masyarakat sendiri.

Disamping itu juga merupakan organisasi sosial di luar sektor swasta atau dunia usaha, oleh karena pada dasarnya bersifat non-profit. Dengan demikian, sebetulnya ketiganya merupakan organisasi sosial yang melakukan

fungsi pelayanan sosial dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat, dengan mengaktualisasikan potensi dan energi sosial masyarakat.

Organisasi masyarakat yang bersifat lokal dapat tumbuh sebagai bentuk aktualisasi berbagai pranata sosial yang ada dan tidak jarang pula didasarkan pada pengalaman ajaran agama, dengan demikian lebih di dorong oleh motivasi religius. Dijumpai juga institusi lokal yang menjalankan pelayanan sosial dalam hal pemenuhan kebutuhan air minum, air irigasi yang dapat pula berupa jaminan sosial seperti lumbung paceklik, perkumpulan kematian, pemeliharaan orang tua lewat keluarga termasuk keluarga extended., ikatan kekerabatan, ikatan patron klien, prinsip timbal balik dan solidaritas sosial. Sebagai organisasi yang berbasis pranata dalam masyarakat, institusi ini biasanya kuat eksistensinya termasuk pola kepemimpinannya dan dapat meningkat serta melibatkan mayoritas warga masyarakat dalam komunitas tertentu.

b. Organisasi Swasta

Sektor swasta sesuai sifatnya, pada umumnya adalah bidang usaha yang sangat memperhitungkan profit. Apabila dikaitkan dengan usaha kesejahteraan sosial, maka ditemukan organisasi swasta yang melakukan kegiatan atau usaha pelayanan sosial dalam orientasi profit. Sebagai contoh, bentuk perusahaan asuransi baik yang memberikan jaminan hari tua, pendidikan anak, maupun jaminan kecelakaan atau mu-

sibah yang lain.

Sudah tentu sebagai bentuk perusahaan yang mencari untung, sasarannya tidak difokuskan kepada lapisan masyarakat marginal, melainkan pada masyarakat umum. Bukan berarti tidak ada peluang bagi organisasi swasta untuk melakukan dan memberikan pelayanan sosial yang tidak semata-mata berorientasi profit kepada lapisan masyarakat bawah.

c. Optimalisasi Kontribusi Dalam Pelayanan Sosial

Untuk mendorong kontribusi yang lebih besar berbagai organisasi sosial bagi perwujudan kesejahteraan sosial dan untuk mendorong aktualisasi potensi yang masih laten, dibutuhkan adanya iklim yang kondusif dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Iklim yang kondusif tersebut dapat terbangun melalui semakin besarnya orientasi masyarakat pada nilai kemanusiaan yang universal yang dapat diturunkan pada nilai filantropi, solidaritas sosial dan empati.

Walaupun iklim dalam masyarakat telah kondusif, semangat filantropi telah semakin tumbuh, akan tetapi agar semangat dan sikap tersebut teraktualisasi dalam bentuk tindakan, dibutuhkan stimulus. Berbagai bentuk peristiwa spektakuler yang mengakibatkan penderitaan banyak orang seperti bencana alam, merupakan stimulus yang mudah mengandung simpati dan tindakan filantropi.

Dengan demikian dibutuhkan suatu tindakan untuk mensosialisasi berbagai bentuk masalah sosial dan juga pihak lain terutama media masa dengan memanfaatkan sumber daya dan jaringan informasi yang dimiliki dapat berperan dalam hal ini.

d. Kerjasama dan Jaringan

Dalam rangka optimalisasi kontribusi masing-masing dan mewujudkan hubungan yang sinergis, perlu dijajagi berbagai kemungkinan kerja sama antar organisasi pelayanan sosial yang ada. Keberadaan semacam forum komunikasi cukup relevan dalam rangka membangun komitmen bersama, pertukaran informasi, dan melihat kemungkinan hubungan sinergis dan saling mengisi. Forum semacam ini juga dapat sebagai media bagi stakeholders untuk menjalani proses belajar sosial.

Melalui berbagai dialog dan interaksi antarsesama, masing-masing pihak dapat saling belajar untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kontribusinya bagi perwujudan kesejahteraan sosial. Media tersebut memberikan banyak inspirasi, sehingga masing-masing pihak terdorong untuk melakukan suatu bentuk usaha pelayanan sosial yang sebelumnya tidak terpikirkan.



apabila kemiskinan dianggap merupakan akibat dari kelemahan struktur dan sistem, maka strategi penanganan kemiskinan lebih dititikberatkan pada perubahan sistem dan perubahan ini diharapkan akan dapat terwujud adanya distribusi penguasaan sumber daya yang lebih baik

Upaya Penanganan Masalah

Apabila kemiskinan dilihat sebagai akibat dari cacat dan kelemahan individual, maka strategi yang digunakan untuk pemecahannya akan lebih di tekankan pada usaha untuk mengubah aspek manusia sebagai individu atau warga masyarakat. Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat akan lebih di titikberatkan pada peningkatan kualitas manusianya sehingga akan dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya peningkatan taraf hidupnya. Dengan peningkatan kualitas ini akan memungkinkan peningkatan kemampuan dalam mengantisipasi berbagai peluang ekonomi yang muncul di samping peningkatan kemampuan dan produktivitas kerja.

Sementara itu, apabila kemiskinan dianggap merupakan akibat dari kelemahan struktur dan sistem, maka strategi penanganan kemiskinan lebih dititikberatkan pada perubahan sistem dan perubahan ini diharapkan akan dapat terwujud adanya distribusi penguasaan sumber daya yang lebih baik.

Dalam kaitannya dengan pemba-

ngunan masyarakat desa, adanya dua pendekatan utama, *improvement approach* dan *transformation approach*. Dalam penerapannya untuk masyarakat desa, khususnya masyarakat pertanian, *improvement approach* dimaksudkan sebagai usaha untuk memperbaiki secara berangsur-angsur cara kerja pertanian dengan jalan menggerakkan petani dari segi psikologis dan teknis guna meningkatkan produksi tanpa perubahan radikal dalam sistem sosial tradisional.

Pendekatan ini tidak melakukan perubahan mendasar dalam sistem dan struktur sosial sehingga memungkinkan kesinambungan dan bertahannya institusi sosial dan sistem pemilikan tanah. Dalam gerak pelaksanaannya lebih menitikberatkan pada peningkatan motivasi petani, penguasaan keterampilan, cara kerja dan teknologi baru serta menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan yang dibutuhkan. Di bidang pertanian pendekatan ini pernah diimplementasikan secara luas dalam bentuk revolusi hijau.

Oleh sebab itu, permasalahan yang kemudian tampil adalah kesenjangan antara proram-program pembangunan dengan kondisi, permasalahan dan kebutuhan nyata dalam masyarakat. Karena kesenjangan tersebut, dapat dimengerti apabila banyak program yang dirancang dari atas dan bersifat seragam tidak menyentuh permasalahan warga masyarakat pada tingkat paling bawah (*grass root*). Lebih dari itu, pendekatan pembangunan semacam itu juga dianggap kurang mengundang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya.

Hal ini disebabkan karena masyarakat sekadar berfungsi sebagai konsumen program, dengan demikian merasa tidak memiliki program tersebut karena tidak ikut terlibat dalam proses perencanaannya. Apalagi jika program-program tersebut dianggap kurang relevan dengan permasalahan dan kebutuhannya. Minimnya pendapatan membuat mereka rela tinggal di pinggir kali. Kemiskinan adalah faktor utama banyaknya penderita gizi buruk. Kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Kemiskinan membuat si miskin terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. (*)

KEMENKO PEREKONOMIAN LIRIK SELAAWI JADI PILOT PROJEK KAWASAN



Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Garut, Jawa Barat memboyong Camat Selaawi dan penggiat UMKM Garut mengunjungi Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menemui sejumlah Asisten Deputi menteri membahas pengembangan kawasan Selaawi berbasis komoditas unggulan loka bambu.

Kepala Diskominfo Garut Nurdin Yana mengatakan pihaknya sebagai leading sektor komunikasi mencoba menyambungkan berbagai potensi yang ada di Garut dengan pusat untuk percepatan pencapaian target pengembangan wilayah.

“Tidak hanya pihak kecamatan yang saya bawa tapi juga para penggiat UMKM sebagai bagian dari Komunitas Informasi Masyarakat (KIM),” kata Nurdin, usai bertemu para Asdep di Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (23/8/2017).

Camat Selaawi Ridwan Effendi dalam pemaparannya menyebutkan pihaknya telah membuat zonasi kawasan Selaawi sesuai dengan potensi bambu yang dimilikinya.

“Ada tujuh zonasi yang telah

disepakati dengan warga dimana sesuai dengan perkembangan potensi masing-masing,”ujarnya.

Ridwan menambahkan dalam pengolahan bambu mengenal istilah

“bilah buluh anyam sama laminasi. “Ada zonasi anyaman bambu, kemudian hasil bilah bambu seperti sangkar burung dan aksesoris. Untuk buluh lebih kepada konstruksi dan furniture,” tuturnya.

Sementara itu salah satu Kepala Bidang Pengembahan Kawasan Asdep Kemenko Perekonomian Totok Hari Wibowo menandakan akan segera menindaklanjuti keinginan pengembangan kawasan Kecamatan Selaawi tersebut.

“Kita segera merumuskan langkah langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut dengan menjadikan Kecamatan Selaawi sebagai pilot projek yang akan digarap sejumlah bidang dari kementerian teknis,” paparnya.

Ia memastikan dalam waktu dekat segera mempertemukan tim dari Garut dengan perwakilan bidang bidang di kementerian teknis. “Segera dalam waktu dekat ini, untuk menggelar FGD membahas dan merumuskan hal hal teknisnya,” tukasnya. ■MD



Penggunaan medsos juga memerlukan kreativitas dan inovasi



SEBAGIAN KELOMPOK UKM MASIH MALU-MALU GUNAKAN MEDSOS

Keampuhan media sosial (medsos) dalam mempromosikan produknya, terutama bagi kalangan Usaha Kecil Menengah (UKM) telah dibuktikan para entrepreneur muda. Meski demikian, ternyata bagi kalangan UKM di desa cenderung malu-malu dalam penggunaannya.

Hal itu mengemuka saat diskusi kecil bertajuk Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang digagas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Garut, di Aula Kantor Kecamatan Samarang, Rabu (26/7/2017).

Deden (47) mengakui selama 4 tahun usahanya dalam memproduksi sandal cenderung statis tanpa adanya peningkatan, baik kuantitas maupun dari pengembangan usahanya. "Kami belum mampu memasarkan keluar Garut, karena faktor modal dan manajemen pemasaran," ujarnya.

Keluhan itu langsung ditanggapi narasumber Janur Muhammad Bagus, agar tidak patah arang. Penggunaan medsos juga memerlukan kreativitas dan inovasi, seraya menyarankan untuk memaksakan hadir dalam forum-forum sebagai upaya pengkayaan ilmu.

Sedangkan General Manager CV. Seribu Satu, Undang, menyarankan agar memperhatikan pola manajemen yang baik. "Sekecil apapun pengeluaran dan pendapatan harus dicatat dalam pembukuan," tegasnya

Menurut Sekretaris Diskominfo, Drs. Diar Cahdiar, M.Si, diharapkan pelaku UKM dapat memanfaatkan medsos secara arif, sehingga nilai manfaatnya berdampak terhadap pendapatan pelaku UKM. ■MD



GARUT RAIH LOMBA CIPTA MENU B2SA TINGKAT PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2017

Kabupaten Garut harus puas meraih Juara Harapan I pada acara Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, bertempat di Parkir Barat Gedung Sate Jalan Diponegoro Nomor 22 Bandung, beberapa waktu lalu.

Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kabupaten Garut, Ir. Hj. Enok Rihawati, dalam perhelatan ini pihaknya melibatkan Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut, Asosiasi Chef Indonesia perwakilan Garut (Indonesian Chef Association) dan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Garut. "Alhamdulillah, meskipun meraih penghargaan Juara Harapan I berupa Kategori Umum, namun kami mendapatkan apresiasi dari pihak juri," kata Hj. Enok, Senin (14/8/2017).

Menurutnya, Penghargaan Kategori Umum ini diberikan kepada peserta yang mendapatkan nilai total tertinggi terhadap semua kriteria penilaian, baik terhadap resep menu 3 (tiga) hari, profil pangan lokal, dukungan pemerintah daerah/masyarakat maupun menu di display pada saat

lomba.

Lomba Cipta Menu B2SA berbasis sumber daya lokal diselenggarakan dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman. Setiap individu khususnya ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dalam menentukan dan menyediakan menu makanan keluarga diharapkan mampu menyajikan menu B2SA.

Pelaksanaan lomba kali ini ditekankan pada menu sarapan anak sekolah. Hasil studi menunjukkan bahwa sarapan bergizi bagi anak sekolah ternyata sangat bermanfaat, berpengaruh terhadap fisik dan psikologis, yang pada akhirnya akan meningkatkan proses dan hasil belajar anak-anak. Hal ini juga sejalan dengan salah satu pesan dalam Pedoman Gizi Seimbang yaitu "biasakan makan pagi atau sarapan".

Seluruh peserta lomba dari 27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat menyajikan menu makanan keluarga untuk keperluan satu hari tiga kali makan dalam bentuk display. Hal ini dimaksudkan untuk melihat sejauh mana penerapan aspek keanekaragaman dan keseimbangan pangan dalam menu keluarga, dengan tetap mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal.

Selain penilaian resep dan display, pertimbangan terhadap dukungan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menerapkan konsumsi B2SA menjadi salah satu unsur penilaian yang sangat penting. Dengan demikian prinsip konsumsi pangan B2SA diharapkan tidak hanya berlangsung pada saat lomba saja, namun dapat ditindaklanjuti dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. ■MD

Dalam rangka mempercepat pemahaman masyarakat tentang konsumsi pangan beragam bergizi seimbang dan aman





MENANGGULANGI KEMISKINAN, GARUT BUTUH 'GARUT SATU DATA'

RKA dan DPA cenderung sistem Rambo; banyak peluru namun tidak tepat sasaran. Mestinya harus diganti RKA sistem Sniper dengan sasaran tembak yang tepat berdasarkan data

Workshop bertajuk Analisa Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Garut, di Ruang Rapat Bappeda Kab. Garut (27/7), mendorong Pemerintah Kabupaten Garut mengeluarkan Perbup berkaitan dengan indikator kemiskinan berdasarkan update data BDT (Basis Data Terpadu) 2015.

Demikian salah satu kesimpulan peserta workshop yang diinisiasi Bappeda Kabupaten Garut, menghadirkan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Garut Berdikar Jaya, MM dan Arvian Tiantoro Koordinator P3BM Bappenas Prov. Jawa Barat, dimoderatori Iman P. Ridho.

Arvian Tiantoro menyoroti Kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD). Ia menekankan TKPKD harus mengoptimalkan program penanggulangan kemiskinan sampai RKA dan DPA yang tepat sasaran. "RKA

dan DPA cenderung sistem Rambo; banyak peluru namun tidak tepat sasaran. Mestinya harus diganti RKA sistem Sniper dengan sasaran tembak yang tepat berdasarkan data," selorohnya.

Arvian juga membandingkan dengan inovasi program di Kabupaten Kulonprogo, seperti Beli Bela Kulonprogo, atau Tomira (Toko Milik rakyat) sebagai pengganti minimart-minimart yang kini kian menjamur. Kemudian menyulap daerah kumuh menjadi daerah wisata. Atau daerah santet jadi kota IT seperti di Kabupaten Banyuwangi sebagai percontohan Bappenas.

Workshop juga mengusulkan sebesar 5% dana desa untuk penanggulangan kemiskinan desa serta menupayakan sinergitas dengan Baznas dan Dana CSR untuk penanggulangan kemiskinan.

Sebelumnya acara dibuka Asisten Admionitrasi Pemerintahan dan Kesra, Drs. Didit Fajar Putradi, M.Si, dihadiri Kepala Bappeda Ir. Deni Suherlan, M.Si. Peserta terdiri dari para sekretaris kecamatan, utusan SKPD dan instansi vertikal, serta dari Baznas Kabupaten Garut. ■MD

PROMOTOR KESEHATAN GARUT TERPILIH MENJADI TENAGA KESEHATAN NASIONAL TERFAVORIT TAHUN 2017

Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan tingkat Puskesmas tahun 2017 telah dimulai sejak bulan Mei 2017, dimana rangkaian diawali dengan penilaian tenaga kesehatan di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan jenis profesi yaitu Dokter, Dokter Gigi, Perawat, Bidan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Masyarakat, Nutrisionist, Ahli Teknik Laboratorium Medik dan Tenaga Teknik Kefarmasian.

Amilia, SKM, M.KM (kiri).



Setelah penilaian tingkat Kabupaten/Kota dilanjutkan dengan penilaian di tingkat provinsi dengan melewati 5 pengujian yaitu tes tulis, tes presentasi, tes wawancara, tes praktek dan terakhir tes diskusi. Pada bulan Juni 2017, rechecking 5 besar Tenaga Kesehatan oleh Tim penilai Provinsi, dimana tim penilai akan menilai inovasi yang diajukan dalam penilaian tenaga kesehatan teladan, selain kedisiplinan, kerjasama lintas program dan lintas sektor juga hubungan sosial di masyarakat.

Di Kabupaten Garut dari 3 tenaga kesehatan yang diajukan yaitu Bidan, Sanitarian dan Promotor Kesehatan terpilih Promotor Kesehatan yang melalui proses rechecking, bersaing dengan 4 kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Cianjur, Kota Cirebon, Kuningan dan Kabupaten Bandung. Kabupaten Garut menjadi juara pertama tenaga kesehatan dengan kategori Promkes dalam penilaian dalam rechecking ini dan menjadi kandidat untuk menuju Kementerian Kesehatan pada tanggal 13 Agustus sampai dengan 19 Agustus 2017 untuk mengikuti proses penganugerahan penghargaan tenaga Kesehatan teladan Nasional di Hotel Grand Sahid Jaya. Lalu siapakah promoter kesehatan Garut yang bisa menembus tingkat Nasional ini? Mari kita lihat profilnya.

Amilia, SKM, M.KM telah memegang program promosi kesehatan sejak tahun 2006. Namun diangkat menjadi fungsional penyuluh pada tahun 2011 dan sekarang telah berpangkat III C/ Penata. Ia merupakan lulusan dari STIKes Garut tahun 2007 dan Fakultas Kedokteran UNPAD Bandung tahun 2013. Ibu yang bersuamikan seorang karyawan swasta bernama Rizal Zein dengan 3 orang anak ini telah bekerja sebagai PNS di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Garut pada



Inovasi yang diajukan untuk penilaian tenaga kesehatan teladan dengan memberdayakan radio swasta yang ada di lingkungan wilayah kerja

tahun 2000, dan sekarang bekerja di UPT Puskesmas Cipanas Kecamatan Tarogong Kaler sejak tahun 2011.

Inovasi yang diajukan untuk penilaian tenaga kesehatan teladan dengan memberdayakan radio swasta yang ada di lingkungan wilayah kerja yaitu Radio Indiswara 107,9 FM dengan pemiliknya yaitu H. Babas Bastaman, M.Si. Radio ini terletak di Prapatan Warung Cendol Mega Studio Desa Rancabango Kecamatan Tarogong Kaler.

Kerjasama diawali dengan penandatanganan MOU (Nota kesepahaman) antara Pihak Manajemen Radio dan Pihak Manajemen Puskesmas pada Bulan Mei 2016 dan disepakati akan memberikan penyuluhan setiap hari Rabu pada jam 10.00 sampai dengan 12.00 WIB. Penyuluhan melalui radio ini dinamai dengan nama PROGNOISIS (PROGRAM NGOBROL DAN EKSIS).

Narasumber yang berbeda baik lintas program maupun lintas sektor mencerminkan kolaborasi yang berkesinambungan dengan satu tujuan yaitu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat terutama PHBS dengan meningkatkan angka kontak komunikasi dengan masyarakat.

Bupati Garut, H. Rudy Gunawan, S.H, M.H, MP juga mengapresiasi prestasi yang diberikan kepada ibu Amilia ini dengan memberikan piagam penghargaan yang diberikan langsung saat apel bersama hari Senin, 24 Juli 2017 yang bertempat di lapangan Setda Garut. Bupati berharap agar dengan menyandang predikat teladan akan menjadi contoh (role model) di tempat kerja maupun di masyarakat dengan bekerja sepenuh hati dan ikhlas demi kemajuan kesehatan masyarakat di Kabupaten Garut.

Dalam penganugerahan Penghargaan Tenaga Kesehatan Nasional berjumlah 258 orang yang terdiri dari 9 macam profesi dari seluruh Nusantara, Ibu Amilia terpilih menjadi Tenaga Kesehatan Favorit dan mendapatkan ucapan selamat dari Ibu menteri Kesehatan Republik Indonesia Nila Farid Moeloek. Tentu saja ini merupakan kebanggaan tersendiri sebagai tenaga kesehatan terfavorit sekaligus menjadi amanah sebagai penggerak pembangunan kesehatan

Indonesia.

Keberhasilan ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak maka dari itu Amilia ingin mengucapkan terima kasih yang terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dari mulai awal penilaian yaitu kedua orangtua H. Drs. Aam Sehat dan Hj. Titin Sugibudiarti, Kepala Dinas Kesehatan dr. Tenni Swara Rifa'i, M.Kes dan jajarannya yaitu Bapak Sekretaris Dinas Kesehatan Ubaidillah Syathori, M.Kes, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Eman Sulaeman, BE Kepala Bidang SDM dr. Tri Cahyo Nugroho Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dr. Asep Sani S, M.Kes, Kepala Seksi SDM Jakarta, S.Sos, Kepala Seksi Promosi Kesehatan Hj. Eulis Dahniar, SKM, Camat Tarogong Kaler Saefurrohman, M.Si dan Sekretaris Camat Dindin Jaenuddin, M.Si, Kepala Puskesmas Hj. dr. Yeyen Siti Permana, M.Kes beserta karyawan dan karyawan Puskesmas Cipanas, Unsur MUSPIKA Kecamatan Tarogong Kaler, rekan rekan Penyuluh Kesehatan Kabupaten Garut, tokoh masyarakat dan tokoh agama, para kader di wilayah kerja Puskesmas Cipanas serta semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu. \

"Semoga Allah SWT membalas jasa baik yang telah bapak/ibu berikan," imbuhnya. ■MD

BI GANDENG PEMDA GARUT DAN UNPAD KEMBANGKAN AGRIBISNIS PERTANIAN



Melalui teknologi pertanian yang akan dikembangkan oleh Fakultas Pertanian Unpad, akan mendukung salah satunya pengembangan klaster beras budi daya padi organik

Dalam upaya mengembangkan agribisnis pertanian, Pemkab Garut melakukan kerjasama dengan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Jawa Barat dan Universitas Padjadjaran (Unpad). Ditandai dengan penandatanganan oleh Bupati Garut Rudy Gunawan, Kepala Perwakilan BI Provinsi Jawa Barat Judo Agung, dan Rektor Unpad Prof. Dr. Med. Tri Hanggono Achmad. Nota kesepahaman ini merupakan salah satu bentuk nyata sinergi antara BI, Pemkab Garut dan civitas akademik Unpad dalam rangka program pengendalian inflasi melalui pengembangan agribisnis pertanian di Kabupaten Garut.

Usai acara di Kampung Sentral DEsa Manggurakyat Kecamatan Cilawu, Senin (10/4/2017) Bupati Garut Rudy Gunawan menyatakan pihaknya menyambut baik dengan adanya nota kesepahaman ini, yang dampaknya akan dirasakan petani. Melalui teknologi pertanian yang akan dikembangkan oleh Fakultas Pertanian Unpad, imbuhnya, akan mendukung salah satunya pengembangan klaster beras budi daya padi organik.

Seperti diutarakan dalam siaran persnya, BI bekerja sama dengan Fakultas Pertanian Unpad melakukan kajian (mapping) kebutuhan pasar, baik pasar domestik maupun ekspor, kemudian pemetaan basis produksi, base-line surveyserta pembuatan roadmap pengembangan klaster beras.

Dalam kesempatan tersebut diserahkan pula handspraying alat abantu semprot hama kepada masing-masing Kelompok Tani Simpay Wargi II dan Kelompok Tani Ciawitali sebagai calon penerima manfaat klaster binaan dari BI Perwakilan Jawa Barat. ■MD



WABUP DORONG PERAN TP PKK KECAMATAN

TP PKK sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam mencapai Visi dan Misi Daerah

Tim Penggerak PKK Kabupaten Garut kembali menggelar Bina Wilayah di masing-masing kecamatan, dan pada saat menggelar Bina Wilayah yang secara langsung dilakukan oleh Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Garut Ny. Hani Budiman, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Garut dr. H. Helmy Budiman yang sekaligus memperingati Harganas di Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Garut.

Di sela acara Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Garut Ny. Hani Budiman mengatakan bahwa Bina wilayah ini dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan 10 program PKK dan untuk meningkatkan peran serta ibu-ibu PKK dalam pengembangan dan peran serta Posyandu Dasa Wisma yang selama ini telah berjalan di masing-masing wilayah.

Selanjutnya dalam sambutan Wakil Bupati Garut Helmi Budiman menegaskan Bina wilayah bertujuan pembinaan agar langkah kegiatan program sesuai dengan visi dan misi PKK sampai dengan ditingkat desa/kelurahan.

“Bina wilayah ke desa/kelurahan, dapat meningkatkan pelaksanaan kegiatan PKK di tingkat Kader, meliputi Posyandu, Kader dasawisma, UP2K, 10 Program Pokok PKK, KB dan Kesehatan, PHBS (Perilaku Hidup Bersih Sehat), LBS (Lingkungan Bersih Sehat), dan 3B (Bergizi, Beragam,

Berimbang) Aman,” kata Wakil Bupati dalam sambutannya.

Wakil Bupati juga menyampaikan bahwa TP PKK sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan mempunyai peran yang strategis dalam mencapai Visi dan Misi Daerah.

“Karena TP PKK di Kecamatan diharapkan bisa menyampaikan program-program Pemerintah Daerah sampai ke tingkat desa,” ujarnya.

dr. H. Helmi Budiman menyebutkan program yang telah dicanangkan bersama bahwa Kabupaten Garut merupakan daerah wisata yang sangat potensial untuk terus dikembangkan guna meningkatkan ekonomi kerakyatan, maka TP PKK diharapkan kepada ibu-ibu untuk dapat mensukseskannya dengan cara mempromosikan potensi wisata di daerah masing-masing.

“Selain itu TP PKK melalui anggotanya juga dapat mensosialisasikan berbagai program pemerintah seperti program KB, keluarga sehat, K3 dan masih banyak program-program lainnya,” pesan Wabup.

Acara Bina Wilayah ini dihadiri oleh Camat Pamungpeuk, Muspika Kecamatan Pameungpeuk, para Kepala Desa se-Kecamatan Pameungpeuk, Ibu-ibu TP PKK Kecamatan, TP PKK Desa se-Kecamatan Pameungpeuk. ■MD

UNPAD TERIMA PENGELOLAAN PT KESDA DARI PEMDA GARUT



Rektor Universitas Padjadjaran Prof. Tri Hanggono Achmad pada penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Bupati Garut Rudy Gunawan di Pendopo Kabupaten Garut, Jumat (7/4/2017).

Penerimaan pengelolaan Perguruan Tinggi (PT) Kesehatan Daerah (Kesda) bernama Akademi Keperawatan Pemda Garut ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Rektor Unpad Prof. Tri Hanggono Achmad dengan Bupati Garut Rudy Gunawan, di Pendopo Garut, Jumat (7/4).

Acara dihadiri Direktur Sumber Daya Akademik dan Perpustakaan Unpad Prof. Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K, M.Kes., Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan Unpad Kusman Ibrahim,

M.NS., PhD, Koordinator ASUP Jabar wilayah Garut Dr. Ir. Sudarjat, M.P., Kepala Dinas di lingkungan Pemda Garut, serta perwakilan dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) RI.

Rudy mengatakan, sesuai dengan UU tersebut, pengelolaan PT Kesda harus diserahkan kepada Kemenristekdikti selaku institusi pembina Perguruan Tinggi Negeri atau Kementerian Kesehatan. Dalam hal ini, Pemda Garut sepakat menyerahkan seluruh aset Akper Pemda Garut kepada

Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Garut. Ini merupakan anugerah yang luar biasa selain meningkatnya jumlah mahasiswa asal Garut di Unpad

Kemenristekdikti untuk selanjutnya dikelola Unpad.

“Tentunya kita penyelenggara negara wajib melaksanakan Undang-undang. Dan karena UU-lah, kami harus melepaskan Akper Pemda,” kata Rudy.

Gayung bersambut, melalui upaya lobi intensif yang dilakukan pihaknya, Unpad kemudian mau mengelola akademik program DIII Akper. Pengelolaan ini tentunya disesuaikan dengan ketentuan yang ada di Kemenristekdikti maupun Unpad, salah satunya ialah peralihan jenjang program studi DIII menjadi Sarjana Keperawatan dan Ners.

“Seluruh aset bangunan, tanah, mahasiswa dan alumni, hingga dosen dan tenaga kependidikan PNS semuanya kita serahkan ke Kemenristekdikti,” lanjut Rudy.

Adapun kebijakan yang tercantum dalam UU No, 23 Tahun 2014 menyebutkan, ada 4 opsi terkait penyelenggaraan PT Kesda, yaitu penyatuan dengan PT milik Kemenkes, penyatuan dengan PT milik Kemenristekdikti, menjadi perguruan tinggi swasta, atau passing out (diberhentikan).

Saat ini terdapat 71 PT Kesehatan yang dikelola Pemerintah Daerah di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 25 PT bergabung ke Kemenristekdikti, 22 PT bergabung ke Kemenkes, 4 PT berubah status menjadi swasta/diklat, serta 20 PT masih dalam tahap aspirasi Pemda.

Terkait penggabungan dengan PTN, Kemenristekdikti juga telah menetapkan bahwa lokasi PT Kesda berada di satu Kota/Kabupaten yang sama dengan PTN/berbatasan langsung dengan Kota/Kabupaten lokasi PTN, ada kesepakatan antara PT Kesda dengan PTN, serta proses penggabungan dilakukan dengan catatan: disetujui Rektor, Pemda bersedia menyerahkan aset, PNS diserahkan, lalu anggaran gaji dan biaya operasional dibebankan kepada PTN.

Rudy pun berharap penyerahan pengelolaan akademik Akper kepada Unpad diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Garut. “Ini merupakan anugerah yang luar biasa selain meningkatnya jumlah mahasiswa asal Garut di Unpad,” kata

Rudy.

Ditransformasikan Menjadi Program Sarjana

Sementara itu, Rektor mengatakan, secara teknis Unpad akan mengelola secara akademik, termasuk diantaranya pengelolaan administrasinya. Seluruh aspek aset diserahkan ke Kemenristekdikti. Nantinya, status gedung, tanah, dan sarana prasarana akan dikelola Unpad dengan status Barang Milik Negara. Status pengelolaan akademik akan dilakukan seperti pengelolaan Program Studi di Luar Kampus (PSDKU) Pangandaran.

Terkait transformasi jenjang program studi, Rektor menjelaskan, perubahan ini didasarkan pada sudah tidak dibukanya program DIII di Unpad. Dengan demikian, mahasiswa Akper Pemda Garut saat ini juga akan diarahkan menjadi Sarjana. Untuk mahasiswa tingkat I dan II seluruhnya ditransformasikan menjadi mahasiswa Sarjana.

Adapun untuk mahasiswa tingkat III (tingkat akhir Diploma), Unpad akan menawarkan untuk lanjut ke jenjang Sarjana hingga Ners atau menyelesaikan studi sebatas Diploma. “Mulai tahun akademik mendatang, mereka (mahasiswa) sudah berhak mendapatkan kartu tanda mahasiswa Unpad,” kata Rektor.

Untuk biaya perkuliahan akan disesuaikan dengan ketentuan pembiayaan perkuliahan di Unpad. Hingga saat ini, Unpad masih menerapkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang besaran tarifnya disesuaikan dengan pendapatan dan jumlah tanggungan orang tua. Rektor pun memastikan bahwa mahasiswa Unpad, khususnya mahasiswa eks-Akper Pemda Garut tidak ada yang putus kuliah karena terkendala biaya.

Mulai tahun akademik 2017/2018 Unpad ditargetkan sudah mulai membuka pendaftaran program Sarjana Keperawatan di Garut. Rektor mengatakan, pendaftaran program dilakukan melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), sama halnya dengan pendaftaran program PSDKU Unpad Pangandaran dengan Diploma IV. Basis penilaian didasarkan pada hasil tes SBMPTN. (*)

Teknologi Informasi dan Komunikasi



Teknologi informasi dan komunikasi menjadi suatu hal yang penting pada saat ini. Pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi ini adalah segala teknologi yang digunakan dalam suatu proses penyampaian informasi dan juga pesan dari satu orang ke orang lain dengan tujuan agar informasi dan pesan tersebut lebih cepat dan luas penyebarannya, dan juga lebih lama dalam proses penyimpanannya.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang. Dengan semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini tentu dapat memudahkan kita untuk mendapatkan sebuah informasi atau melakukan komunikasi dari mana saja, kapanpun, dan dengan siapa saja.

Perkembangan teknologi merupakan suatu hal yang bisa dihindarkan karena perkembangan ini memang akan terus terjadi sejalan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan. Setiap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pun memang diciptakan untuk memberikan manfaat yang baik bagi kehidupan manusia dalam melakukan segala aktifitasnya.

Dalam perkembangan sebuah negara pun, keberadaan teknologi informasi saat ini mempunyai peranan yang penting baik dalam beberapa bidang, khususnya dalam kemajuan sebuah negara dalam bidang ekonomi dan juga politik.

Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Bidang Ekonomi

Perekonomian pada suatu negara dapat terlihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada negara tersebut. Tingginya suatu pertumbuhan ekonomi suatu negara menandakan bahwa terdapat perkembangan teknologi yang tinggi pula di negara tersebut.

Fungsi keberadaan teknologi informasi dan komunikasi dalam sebuah kemajuan sebuah negara khususnya dalam bidang ekonomi dapat diuraikan menjadi berikut :

- Membuat pertumbuhan ekonomi menjadi meningkat
- Adanya industrialisasi
- Meningkatnya produktivitas dalam dunia industri. Karena, dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat meningkatkan produktivitas baik itu dalam bidang teknologi industri, ataupun dengan terjadinya investasi dan reinvestasi yang terjadi secara besar-besaran.
- Para pekerja dituntut untuk selalu mempunyai keahlian dan kemampuan lebih karena dengan keberadaan teknologi dan informasi ini akan membuat persaingan kerja yang semakin ketat. Hal ini disebabkan karena perkembangan teknologi akan berdampak pada jumlah tenaga kerja yang diperlukan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Fungsi Teknologi Informasi dan Komunikasi Pada Bidang Politik

Dalam bidang politik pun, keberadaan teknologi informasi dan komunikasi pun merupakan sesuatu hal yang penting. Dalam politik sendiri keterampilan berkomunikasi sangat diperlukan, karena sesuai dengan pengertian politik sendiri yang berarti suatu kegiatan pengambilan keputusan secara kolektif untuk kepentingan bersama.

Tentunya komunikasi merupakan hal yang penting untuk mencapai keputusan yang ingin dicapai. Hal yang membuat teknologi informasi dan komunikasi mempunyai penerapan yang penting dalam bidang politik adalah karena akan lebih memudahkan para penggiat politik dalam melakukan sebuah komunikasi, berbeda dengan komunikasi konvensional yang tidak begitu efisien untuk dilakukan dalam sebuah kegiatan politik.

Lima Pencapaian Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia

1. Penetapan TKDN ponsel 4G

Di awal kuartal ketiga 2015, peraturan menteri tentang tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) ponsel 4G telah diresmikan oleh 3 Kementerian terkait, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemen-

kominfo), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag).

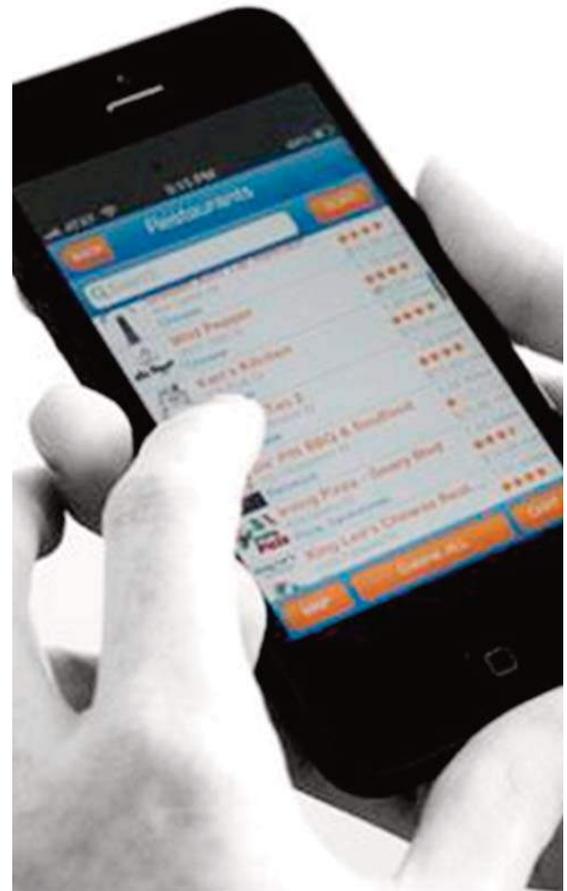
Melalui peraturan tersebut, per 1 Januari 2017 mendatang, ditetapkan bahwa semua produk smartphone 4G FDD (Frequency Division Duplexing) harus sudah memenuhi TKDN minimal 30 persen, sedangkan smartphone 4G TDD (Time Division Duplexing,) baru akan tersentuh regulasi TKDN pada 2019 mendatang.

Dengan demikian, 3 kementerian terkait akan memiliki peran masing-masing yang berbeda sesuai ranah operasionalnya. Kemenkominfo, misalnya, akan berperan sebagai pembuat kebijakan, yang tidak hanya dilihat dari sisi pelanggan, tetapi juga dari sisi jaringan.

Kemudian Kemendag bertugas dalam mengatur mengatur perizinan impor dan peredarannya berdasarkan pada rekomendasi yang dikeluarkan oleh Kemenkominfo. Sementara Kemenperin, berwenang dalam melakukan pengawasan atas distribusi dan sisi industri, yang antara lain meliputi penghitungan komposisi dari TKDN itu sendiri.

2. Penutupan situs film dan musik ilegal

Di Indonesia, pembajakan karya cipta hingga saat ini masih menjadi



masalah serius lantaran menimbulkan kerugian bagi si pemilik hak cipta dan pihak terkait lainnya. Sebagai wujud nyata untuk mengatasinya, Kemenkominfo memutuskan untuk memblokir akses terhadap 22 situs film ilegal dan 22 situs musik ilegal.

Menurut data Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI), 22 situs musik ilegal tersebut mencapai 430.000 orang setiap bulannya.

Sebagai contoh, jika satu orang mengunduh satu lagu, dengan asumsi harga satu lagu Rp 7.000, maka kerugian yang ditimbulkannya kira-kira mencapai Rp 66 miliar per bulan, sehingga potensi pendapatan negara dari pajak yang hilang mencapai Rp 6,6 miliar per bulan.

3. Lisensi, komersialisasi dan reforming 4G-LTE

Juga di awal kuartal ketiga 2015, pemerintah resmi mengomersialisasikan jaringan 4G-LTE (Long Term Evolution) di frekuensi 1800 Mhz.

Terhitung 6 Juli 2015, ada 5 operator telekomunikasi yang mengantongi lisensi operasi layanan 4G-LTE di frekuensi tersebut, yaitu Smartfren, Indosat, Telkomsel, XL Axiata, dan Hutchison 3 Indonesia (Tri).



Bersamaan dengan peluncuran komersialisasi 4G LTE 1800 MHz itu, kelima operator tersebut juga melakukan deklarasi peluncuran layanan 4G LTE masing-masing secara serentak di lima kota yang berbeda. Telkomsel meluncurkan 4G-LTE di Makassar, Indosat di Balikpapan, XL di Lombok, Smartfren di Batam, dan Tri di Banjarmasin.

Kemudian, memasuki pertengahan kuartal keempat 2015 ini, tepatnya pada tanggal 17 November 2015, penataan ulang frekuensi (refarming) di 1.800 MHz dinyatakan selesai. Dengan demikian, operator seluler yang mengantongi lisensi 4G-LTE dapat segera menghadirkan layanannya di frekuensi tersebut secara nasional.

4. Pertemuan dengan pemodal ventura di Silicon Valley

Silicon Valley masih menjadi 'kiblat' bagi teknologi dunia. Maka sangat masuk akal, jika pemerintah kita melakukan kunjungan ke sana. Dan pada Rabu 28 Oktober 2015 lalu, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara bertemu dengan para pemodal ventura (venture capital/VC) di Silicon Valley.

Saat itu ia tidak sendirian, melainkan ditemani lima teknopreneur Indonesia, yang startup atau perusahaan rintisanannya terbilang besar, yaitu Nadiem Makariem (Go-Jek), William Tanuwijaya (Tokopedia), Ferry Unardi (Traveloka), Andrew Darwis (Kaskus), dan Emirsyah Satar. Pertemuan dengan para VC tersebut diharapkan dapat meyakinkan mereka, dengan mengacu pada keberhasilan lima startup Indonesia yang turut hadir, bahwa Indonesia sangat mampu untuk menjadi pemain teknopreneur.

Selain memboyong lima teknopreneur tadi, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani,

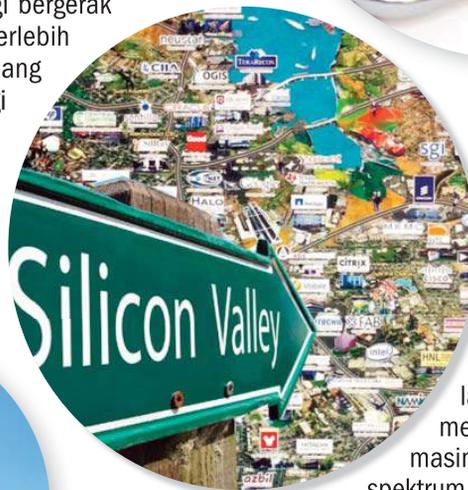
serta Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Triawan Munaf juga turut hadir.



Dan seperti diketahui, pemerintah menargetkan Indonesia menjadi kawasan digital ekonomi terbesar di Asia Tenggara, sehingga membidik e-Commerce sebagai salah satu pendongkrak utamanya.

5. Kerja sama Balon Google (Google Loon)

Perkembangan teknologi bergerak cepat, terlebih di bidang teknologi



komunikasi. Pembahasan kali ini adalah teknologi 4G LTE di Indonesia.

Di samping rombongan Kemenkominfo dan kelima teknopreneur, tiga operator telekomunikasi juga turut bertandang ke Negeri Paman Sam pada akhir Oktober lalu yaitu Telkomsel, Indosat, dan XL. Namun ketiganya bukan menemui para pemodal ventura, melainkan melakukan kesepakatan dengan Google di Laboratorium Google X di Mountain View, California.

Terhitung mulai tahun depan, ketiga operator tersebut akan mulai melakukan uji coba atas Project Loon. Tujuannya, dalam rangka menyokong koneksi LTE, yang akan menjangkau lebih dari 100 juta orang di Indonesia untuk memberikan mereka



kesempatan mengakses pendidikan, budaya, dan ekonomi.

Diungkapkan, balon Google akan mengudara di Indonesia selama satu tahun pada ketinggian kurang lebih 20 kilometer di atas permukaan bumi pada lapisan stratosfer, dengan menggunakan frekuensi masing-masing operator di spektrum 900 Mhz.

Kehadiran balon Google ini dianggap akan membantu para operator telekomunikasi dalam memperluas jaringannya yang sudah ada supaya dapat menjangkau kawasan terpencil. (*)





Terima Kasih atas Dukungan Masyarakat dengan Diraihnya Berbagai Prestasi Kabupaten Garut

PENGHARGAAN BAKTI KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Tahun 2017

OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN dari Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2015 dan 2016

ANUGERAH PANGRIPTA NUSANTARA Terbaik I Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 dan 2017

PENGHARGAAN INOVASI ADMINISTRASI NEGARA (INAGARA) Daerah yang Berkomitmen Tinggi terhadap Keberhasilan Pelaksanaan Laboratorium Inovasi Administrasi Negara Tahun 2016

KEPALA DAERAH INOVATIF dari Pusat Kajian dan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur I Lembaga Administrasi Negara Tahun 2016

ANUGERAH MANGGALA KARYA KENCANA Tahun 2016

STATUS KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DENGAN KATEGORI PRESTASI SANGAT TINGGI atas penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2016

PENGHARGAAN DARI OMBUDSMAN Tahun 2016 dalam Kepatuhan Pelayanan Publik

WAHANA TATA NUGRAHA Tahun 2016 Atas Keberhasilan Mengikuti Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Sistem Transportasi Perkotaan Tahun 2016

SERTIFIKAT ADIPURA atas Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Wilayah Kabupaten Tahun 2016 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

SKPD DENGAN NILAI TERTINGGI DI KABUPATEN GARUT Tahun 2016 berdasarkan penilaian Komisi Ombudsmen dalam penilaian kepatuhan Pemerintah Daerah dalam pemenuhan komponen standar pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

INVESTMENT AWARD dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagai penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) terbaik Tahun 2016

SATYA KARYA KENCANA Penghargaan Kepada Bupati/ Kepala Daerah Dalam Rangka Mendukung Program KB Tahun 2016

PENGHARGAAN SWASTI SABA Kabupaten/Kota Sehat Se Jawa Barat Tahun 2016

PENGHARGAAN KABUPATEN PEDULI HAM Tahun 2016 dari Menteri Hukum dan HAM;

PEMENANG HARAPAN PENGHARGAAN KEPEGAWAIAN BAIK Tingkat Pengelola Kepegawaian Kabupaten/ Kota Se- Jawa Barat Kluster I Tahun 2016

Disamping Pemda, duta-duta Kabupaten Garut juga turut mengharumkan nama Kota Intan, antara lain :

Juara I Nasional Gelar Produk Usaha Bersama Komunitas (UBK) Tahun 2016 a.n. Kecamatan Selaawi

Penghargaan Predikat Best of The Best Tingkat Nasional Bumdes Bersama a.n. Kecamatan Leles Tahun 2016

Juara III tingkat nasional untuk kategori daerah terpencil Tahun 2016, a.n. Puskesmas Cisewu

Juara tiga tingkat Nasional Lomba Kader BKR Tahun 2016 a.n. Rizal

Duta Anak mewakili Provinsi Jawa Barat ke Tingkat Nasional di Mataram Tahun 2016 a.n. Yanti Muthmainah

Andre (SMPN 4 GARUT) peringkat 1 O2SN Tingkat Nasional Tahun 2016

Nabila Rifqi Rabbani siswa SMAN 1 Garut, Prestasi peraih 2 medali perunggu Ice Skating Asia Open di Malaysia, 3 Medali

Emas dan 1 Perak Tk. Asean tahun 2016 di Bandung dan Medali emas di Tafisa Word di Jakarta

(Disamping nama-nama di atas, masih banyak lagi duta-duta Kabupaten Garut yang berprestasi)



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

VISI

**Memberikan Pelayanan dan Penyedia Informasi yang Mudah,
Terpercaya, Akurat dan Bermartabat**

MISI

Meningkatkan Kualitas SDM Pelayanan Informasi Melalui Berbagai Media Komunikasi
Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi dan Telekomunikasi
Meningkatkan Keterbukaan Informasi Melalui Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik

PPID

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

MCAP

MOBILE COMMUNITY ACCESS POINT



www.garutkab.go.id

SIJARDU
SISTEM JARINGAN TERPADU



Diskominfo Kabupaten Garut



@DiskominfoGRT



@diskominfo_kabupaten_garut



Diskominfo Garut